



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN SUIR SYAM SEBAGAI WALIKOTA PADANG PANJANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

SKRIPSI



**INOLA ANWAR
0810831002**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

Inola anwar 0810831002, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. Dengan Judul Skripsi: "Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan". Dibimbing oleh: Dr. Asrinaldi, M.Si dan Indah Adi Putri, S.IP, M.IP. Skripsi ini terdiri dari 148 halaman dengan referensi 22 buku teori, 9 buku metode, 4 data sekunder, 2 Jurnal, 2 skripsi, dan 9 situs internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Karakteristik kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang Panjang, yang di latar belakang oleh ketertarikan peneliti terhadap keberhasilan Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang Panjang, dimana peneliti berasumsi bahwa Karakteristik kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang membawa dia pada sejumlah prestasi, penghargaan serta keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan prestasi, penghargaan serta keberhasilan dan Pertama kali memimpin Kota Padang Panjang selama dua kali periode, bagaimanakah Karakteristik kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang? Karena karakteristik merupakan perpaduan segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi sebuah ciri khas khusus, jati diri atau identitas yang membedakan orang satu dengan yang lain.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini mengacu pada teori sifat dari Keith Davis dengan perbandingan teori sifat dari G.R Terry dan Ordway Tead.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh Walikota Padang Panjang, Suir Syam adalah berani, tegas, mempunyai inisiatif, pengetahuan yang luas, mempunyai ide dan gebrakan yang berbeda dari daerah lain, dan ketika ada persoalan yang sangat darurat, beliau bisa mencncmukan penyelesaian dengan mcncminta saran dari bawahan, serta mengkomunikasikan persoalan tersebut, berani mengambil keputusan dan resiko, mau bermusyawarah dan mufakat, mampu menjalin komunikasi yang akrab, peka terhadap lingkungan serta bawahan. Untuk meningkatkan kinerja Para aparatur dan bawahannya agar mendapatkan hasil yang bagus, dan mendapatkan sejumlah penghargaan dan prestasi Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang mengevaluasi satu kali dalam sebulan, dan hal ini diumumkan dan diberi penilaian, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan hal ini memicu semangat kerja dari aparatur dan bawahannya, agar bekerja lebih baik, dan bisa menciptakan inovasi baru serta program yang berbeda bernilai khas dari daerah lain.

Kata Kunci : Karakteristik, Kepemimpinan.

ABSTRACT

Inola anwar, 0810831002, Political Science Department, Social and Political Sciences Faculty, Andalas University Padang, the thesis title is: "Leadership Characteristics Suir Syam as Mayor of Padang Panjang in implementation of Government". The Thesis Guidance by Dr. Asrinaldi, M.Si and Indah Adi Putri, S.IP, M.IP. This thesis consists of 143 pages with references to the theory of 15 theory books, 9 method books, 4 secondary data, 2 Journal, 2 thesis, and 10 websites.

This study aims to describe and analyze the characteristics of leadership as the Suir Syam Mayor Padang Panjang in governance in the city of Padang Panjang, a researches background by the success of the Mayor of Padang Panjang in governance in the city of Padang Panjang, where researchers assume that the characteristic of leadership Suir Syam Mayor of Padang Panjang took him on a number of achievements, awards and success in governance. Based on the achievements, awards and success and the first time led the city of Padang Panjang for two consecutive periods, what characteristics of leadership as the Suir Syam Mayor of Padang Panjang? Because of the characteristics of a blend of all human nature is fixed, so it became a special characteristic, identity or identities that distinguish people from one another

This study used qualitative methods to the type of descriptive research and case study approach. Techniques of data collection is done by in-depth interviews, and documentation. Meanwhile, the validity of the technique used is triangulation of data sources. The selection of informants was done by using purposive sampling. This study refers to the theory of the trait of Keith Davis with a comparison of the theoretical properties Research states that leadership characteristics possessed by the Mayor of Padang Panjang, Suir Syam is brave, assertive, take initiative, extensive knowledge, have different ideas and movement from other areas, and when there was an emergency issue, he could find a solution to the seek advice from subordinates, as well as communicate the problem, pull the trigger and risk, like deliberation and consensus, was able to establish communication intimate, sensitive to the environment and subordinates. of GR Terry and Ordway Tead. To improve the performance of the officers and their subordinates in order to get good results and get a number of awards and achievements as Mayor Suir Syam Padang Panjang evaluate once a month, and it was announced and given a judgment, from the highest to the lowest, and this triggers morale of officers and subordinates, in order to work better, and be able to create new innovations and value different programs typical of other areas.

Keywords : Characteristics, Leadership

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T, karena dengan berkah dan rahmat-Nya dan dengan segenap upaya, skripsi ini telah dapat diselesaikan dengan baik, walaupun didalam penulisannya masih ada kekurangan, kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa umatnya kejalan yang telah di ridhoi oleh Allah S.W.T.

Seperti biasanya, pada setiap perguruan tinggi, bagi mahasiswa yang akan menamatkan studinya, diberikan tugas untuk membuat karya ilmiah atau skripsi, yang merupakan syarat terakhir untuk mencapai gelar kesarjanaan, disamping tujuannya mendidik mahasiswa untuk menciptakan atau membuat karangan ilmiah, serta mengembangkan wawasannya terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh, demikian pula pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, dimana hal ini juga merupakan salah satu syarat yang telah ditentukan. Maka penulis memilih skripsi yang berjudul **“Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”**

Penulis menyadari, skripsi yang sederhana ini mungkin tidak selesai tanpa adanya bantuan dari pihak lain, baik secara moril maupun materil, dan pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Asrinaldi, M.Si sebagai Pembimbing I dan Ibu Indah Adi Putri, S.IP, M.IP sebagai Pembimbing II yang telah memperkaya wawasan serta memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan penulis dari awal hingga akhir. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu atas bimbingan dan diskusi yang amat bermanfaat sehingga bias mengantarkan nola pada awal impian nola, kenangan selama awal proses bimbingan hingga akhir tak akan pernah nola lupakan.
2. Terimakasih banyak teruntuk Pemerintah Kota Padang Panjang, Walikota Padang Panjang, Bapak Suir Syam yang telah bersedia dengan sepenuh hati, meluangkan waktu untuk bertatap muka, Wakil Walikota Padang Panjang, Bapak Edwin, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Bapak Budi Hariyanto, Staf ahli bagian hukum dan politik, Bapak Sahrudin, Ketua DPRD kota Padang Panjang, Bapak Novi Hendri, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Keneddi, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Mawardi, Kepala Dinas Koperasi, UMKM,PERINDAG Kota Padang Panjang, Bapak reflis, Kepala BAPPEDA, Bapak Rusdianto, Kepala Kantor Pasar, Bapak Iriansyah tanjung, KAN Nagari Gunung, Bapak Doni rahman, DT Simarajo, Bang Fadly, serta semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, pembuatan skripsi ini memang didasari kerja keras.
3. Terimakasih Banyak special untuk Pak Hengki yang tidak bosan-bosannya nola telpon dan jumpai, Bapak Anhar Ali, Bang Oja, ajudan Wawako, Bang Adi, dan Om Yun.

4. Special to my family, mama, papa, dan adikku Widia Monica atas motivasi dan pengertiannya, maafkan nola jika mengecewakan, membahagiakan keluarga itu tujuan utama, nola sayang mama, papa dan widia monica, i love u.
5. Terimakasih untuk Buk Sil, yang telah melayani penulis dalam proses awal hingga akhir.
6. Ibu Lis, Pegawai/staf akademik dekanat FISIP UNAND yang telah membantu dan melayani penulis dalam memenuhi syarat-syarat administrasi penulisan skripsi ;
7. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND Padang ;
8. Seluruh dosen dan staf pegawai di FISIP UNAND Padang atas bantuan selama masa perkuliahan.
9. Akhirnya kepada seluruh pihak yang ikut berperan dalam skripsi ini, yang namanya tidak tertulis tanpa mengurangi rasa hormat penulis ucapkan terima kasih. Semoga amal dan jasa yang telah diberikan mendapatkan balasan dan karunia Allah S.W.T.

Padang, November 2012

Inola Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTACK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. .. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	14
D. Signifikansi Penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Kepustakaan	15
1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
B. Kerangka Teori	20
1. Karakter	20
2. Tipe.....	22
3. Gaya	22
4. Kepemimpinan	24
5. Karakter Kepemimpinan	25
6. Karakteristik Kepemimpinan	26
7. Teori Sifat Kepemimpinan	27
B. Skema Pemikiran.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Peranan Peneliti	43
D. Unit Analisis.....	51
E. Teknik Pemilihan Informan	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Triangulasi Data	57
H. Analisis Data	59
I. Sistematika Penulisan	60

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Daerah Kota Padang Panjang	63
B. Profil Kondisi Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Hukum Dan Keamanan di Kota Padang Panjang	64
1. Pemerintahan	64
2. Pendidikan.....	72
3. Kesehatan	73
4. Hukum Dan Keamanan	75
C. Profil Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang	77

BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Temuan umum mengenai Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	80
B. Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang	93
1. Kecerdasan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	95

a.	Pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin.....	95
b.	Pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya	111
2.	Kedewasaan dan Keleluasaan Hubungan Sosial Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	115
a.	Pemimpin mempunyai emosi yang stabil, karena mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas sosial.....	115
b.	Pemimpin mampu dalam penyampaian sebuah gagasan, terkait dengan pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan.....	120
3.	Motivasi dan Dorongan Berprestasi Suir Syam Sebagai Walikota Padang panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	125
a.	Pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.....	125
b.	Pemimpin diharapkan selalu mempunyai dorongan yang besar untuk dapat menyelesaikan sesuatu.....	129
4.	Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam penyelenggaraan Pemerintahan.....	132
a.	Pemimpin mempunyai perhatian selalu mengetahui bawahan serta berorientasi pada bawahan.....	132
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan	141
B.	Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....		143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perolehan Suara Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Pada Panjang tahun 2008	4
Tabel 1.2	Nama-Nama Walikota Padang Panjang Serta Masa Baktinya	9
Tabel 1.3	Prestasi Keberhasilan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	12
Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.2	Perbedaan Karakter, Tipe dan Gaya.....	23
Tabel 2.3	Kelebihan Teori Sifat Keith Davis	38
Tabel 3.1	Data Informan Yang diwawancara.....	53
Tabel 4.1	Jumlah rukun tetangga (RT) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	68
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Menurut Golongan	69
Tabel 4.3	Komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Menurut Tk.Pendk.....	69
Tabel 4.4	Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2011	70
Tabel 4.5	Kegiatan Sidang/Rapat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2010.....	71
Tabel 4.6	Banyaknya Keputusan DPRD Kota Padang Panjang Menurut Jenis Keputusan 2006-2010.....	72
Tabel 4.7	Kemampuan Baca Tulis Huruf Latin Penduduk 10 Tahun Ke atas Tahun 2010 (%).....	73
Tabel 4.8	Jumlah Murid Baru dan Lulusan pada SD, SMP, SMA dan SMK	73
Tabel 4.9	Statistik Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2010	74
Tabel 4.10	Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kota Padang Panjang Pada tahun 2010	75

Tabel 4.11	Banyaknya Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Dari tahun 2008-2010	75
Tabel 4.12	Jumlah Perkara Pidana pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang	76
Tabel 5.1	Prestasi Keberhasilan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	82
Tabel 5.2	Bentuk Perencanaan kegiatan Kerjasama LGSP USAID Dan Pemerintah Kota Padang Panjang	84
Tabel 5.3	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin menurut PP No. 53 Tahun 2010	136
Tabel 5.4	Ketentuan hukuman disiplin berdasarkan tidak masuk kerja dan menaati jam kerja	137
Tabel 5.5	Data mengenai hukuman disiplin selama tahun 2011	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Poster Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang	86
Gambar 5.2	Kliping-Kliping Pemberitaan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang.....	104
Gambar 5.3	Dokumentasi Perda rokok di Padang Panjang	107

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Gambar Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : *Curriculum Vitae* Suir Syam dari Sub.Bag Protokol dan RT
- Lampiran 4 : Data Prestasi dan Penghargaan Pemerintah Kota Padang Panjang
- Lampiran 5 : Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang
- Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2008.
- Lampiran 7 : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2009
- Lampiran 8 : Keputusan Walikota Nomor 710/07/WAKO-PP/2010
- Lampiran 9 : Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin menurut PP No. 53 Tahun 2010
- Lampiran 10 : Pelanggaran terhadap kewajiban pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010
- Lampiran 11 : Surat Keputusan Dekan FISIP No. 944.SP.X.FISIP.2011 Tentang Dosen Pembimbing.
- Lampiran 12 : Surat Keputusan Dekan FISIP No.39/UN.16.09/PP-2011 tentang Survei Awal
- Lampiran 13 : Surat Keputusan Dekan FISIP No. 818/SP.X.FISIP.2012 tentang Tim Penguji Seminar Proposal
- Lampiran 14 : Surat Rekomendasi Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat, No. B.070./543 /WAS-BKPL/2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL/Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.
- Lampiran 15 : Surat Rekomendasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang No : 070/119/KPPT-PP/IV-2012 tentang izin melaksanakan Penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini, kepemimpinan masih menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena paling sering diamati, namun fenomena ini masih sedikit yang bisa dipahami. Kepemimpinan adalah satu bentuk dominasi yang didasari oleh kapabilitas atau kemampuan pribadi, yaitu mampu mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama.¹ Dalam melakukan sebuah kegiatan bersama atau kerja kelompok, diperlukan adanya pemimpin dan kepemimpinan, guna mengefektifkan setiap langkah dan kegiatan. Kepemimpinan terdapat diseluruh organisasi, dari tingkat yang paling kecil dan intim, yaitu keluarga sampai ke tingkat desa, kota, negara dari tingkat lokal, regional sampai nasional dan internasional dimanapun dan kapanpun juga.²

Kepemimpinan pada umumnya berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu.³ Rahasia kepemimpinan yang berhasil adalah memiliki kemampuan serta keterampilan kepemimpinan, untuk dapat berhubungan bersama

¹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah kepemimpinan Abnormal itu?* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 187.

²Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 5-6.

³Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah kepemimpinan Abnormal itu?* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 6.

orang lain dengan cara yang halus namun tegas. Serta karakteristik kepemimpinan yang berhasil memiliki sifat dan keterampilan tertentu.⁴

Dalam konteks pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota, kepemimpinan Kepala Daerah ikut menentukan keberhasilan organisasi administrasi pemerintahan daerah.⁵ Keberadaan Kepala Daerah sebagai seorang pemimpin di dalam era otonomi daerah sangatlah penting. Sebab, sebagai seorang pemimpin Kepala Daerah adalah orang yang bergerak lebih awal atau memelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat anggota organisasi, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi, memotivasi anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi dan harus dapat mempengaruhi sekaligus melakukan pengawasan atas pikiran, perasaan, dan tingkah laku aparatur pemerintahan yang ia pimpin.⁶

Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin, Kepala Daerah diharuskan memiliki sikap dasar dan sifat-sifat kepemimpinan, teknik dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi organisasi yang dipimpinnya, serta ditopang oleh kekuasaan yang tepat.⁷ Inilah yang menjadi aspek penting penelitian, sehingga perlu menjelaskan lebih lanjut tentang permasalahan kepemimpinan Kepala Daerah.

⁴Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 19.

⁵J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah. (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 8.

⁶*Ibid.*, hlm. 43.

⁷*Ibid.*, hlm. 44.

Keberhasilan kepemimpinan harus di maknai sebagai usaha dalam memajukan pemerintahan yang dipimpin. Maka dari itu komponen masyarakat harus mengetahui bagaimana pemerintahannya melaksanakan tugas dan mengatur urusan pemerintahan, agar masyarakat juga ikut aktif berpartisipasi dan ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah di daerah mereka. Keberhasilan kepemimpinan tersebut dapat di lihat dari beberapa kriteria antara lain semakin berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesehatan, yang merupakan perkembangan dalam berbagai indikator lainnya seperti *human development index*, angka pertumbuhan ekonomi, angka kematian bayi dan banyak lagi indikatornya.⁸

Kepala Daerah merupakan sosok dan figur penentu dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan tersebut bisa terlihat dari kepemimpinan yang dijalankan. Maka dari itu keberhasilan yang dilakukan oleh kepemimpinan Kepala Daerah, patut dipraktekkan oleh pemimpin daerah di mana saja. Konsekuensi dari keberhasilan tersebut, tentunya juga memerlukan upaya dan usaha yang keras, dari kepemimpinan yang melaksanakan pemerintahan.

Dalam hal ini peneliti tertarik membahas kepemimpinan Kepala Daerah, yaitu pada kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang. Setelah melakukan Pemerintahan pada periode 2003-2008, yang dipilih melalui pemilihan yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang, pasangan Suir Syam dan Adirozal meraih kepercayaan untuk memimpin kota Padang Panjang. Pada periode kedua Suir Syam

⁸*Ibid.*, hlm. 8.

mencalonkan menjadi Walikota, dan di periode kedua perolehan suara Suir Syam mendominasi. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang Panjang, Sumbar, menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Suir Syam dan Edwin sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) periode 2008-2013 dengan total perolehan suara 16.247 suara atau 81,5 persen dari total suara sah.⁹

Tabel 1.1
Perolehan Suara Pemilukada
Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2008

No	Kecamatan	Pasangan Calon (Nomor Urut)			Total
		Afrizal M-Fathoni R (1)	Suir Syam-Edwin (2)	Juswar J-Sopendi (3)	
1	Padang Panjang Barat	1.750	8.864	870	11.484
2	Padang Panjang Timur	762	16.247	1.175	305
	Perolehan Suara	2.512	16.247	1.175	19.934
	Persentase	12,6 %	81,5 %	5,9%	

Data Sekunder : Informasi Pemilu dan Pemilukada dalam angka kota Padang Panjang 2011.

Selama kepemimpinannya, Suir Syam telah banyak melakukan perubahan demi perubahan, diantaranya di bidang pendidikan memperoleh Grant Widyakrama atas keberhasilan penuntasan WAJAR 9 tahun, dan terpilihnya SMA 1 Padang Panjang sebagai SMA terbaik di Sumatera Barat, pada bidang kesehatan dikeluarkannya kebijakan tentang tertib rokok, semua iklan berbau rokok dilarang di Padang Panjang,

⁹<http://antara-sumbar.com/eng/index.php?mod=berita&d=5&id=1007>, ditulis oleh Redaksi Antara pada tanggal 7 juli 2008, dengan judul: KPUD Padang Panjang tetapkan Suir Syam dan Edwin sebagai pemenang Pilkada, diakses tanggal 29 januari 2012.

dalam hal perekonomian Padang Panjang terpilih sebagai sentral industri kulit terbesar di wilayah Sumatera.

Maka dari itu segala daya dan upaya dari tahun ketahun terus ditingkatkan dalam pencapaian visi dan misi kota yang berfokus pada bidang pendidikan, bidang ekonomi kerakyatan dan bidang kesehatan, selama periode 2003-2008 kota Padang Panjang telah berhasil meletakkan sendi-sendi dasar ketiga pilar pembangunan tersebut.¹⁰ Keberhasilan dan sejumlah prestasi ini membuktikan, terplihnya lagi Suir Syam pada periode kedua.

Masyarakat ingin Suir Syam melanjutkan keberhasilan dan program strategis yang dirancang, agar tercapai maksimal. Seorang dokter yang jadi politisi atau Kepala Daerah, dalam hal ini Walikota Padang Panjang, mungkin akan membuat kita berpersepsi atau berekspektasi lain, atau justru karena ia terlepas dari jebakan birokratisasi dan politisasi, seorang Suir Syam mampu mengembangkan inovasi, berakselerasi, melakukan perubahan, dan membangun paradigma baru, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan memberdayakan masyarakatnya.¹¹

Sebuah penelitian tentang kepemimpinan dilakukan oleh Heater Sutherland, (1979) yang berjudul *The Making Of A Bueaucratic Elit* yang bertujuan untuk menelaah pengaruh, dari perubahan tata pemerintahan terhadap peranan sosial dan

¹⁰<http://metropublika./2008/12/01/peringatan-218-tahun-kota-padang-panjang/> , ditulis oleh redaksi metropublika pada tanggal 12 januari 2008, dengan judul : memperingati 218 tahun kota Padang Panjang , diakses pada tanggal 14 desember 2011.

¹¹<http://sumbaronline.com/pariwara/padang-panjang/>, ditulis oleh Paul, pada tanggal 3 April 2008, dengan judul: Releksi Kepemimpinan Wako Suir Syam, diakses tanggal 29 januari 2012.

politik elite priyayi, dalam usaha menyusuri kenyataan yang rumit dibalik istilah seperti “tradisional”, “*modern rational*” dan “patrimonial” bahkan mengenai istilah “administratif” dan “politis”, yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah politik pemerintahan Belanda, dalam menguasai daerah jajahan, menerapkan sistem pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk kepentingan penjajahan, kepala swapraja sebagai pewaris penguasa setempat dimasa pra kolonial, telah dijadikan wakil-wakil pemerintahan Belanda yang tidak membawahi satu atau lainnya, memainkan suatu kerja sama politik yang tidak setara, yang tampak dari hubungan hierarki yang dipertahankan untuk jangka waktu lama, antara kepegawaian Eropa dengan pangreh praja, interaksi keduanya berlangsung bukan berdasarkan hubungan administrasi atasan bawahan, melainkan dalam bentuk tawar-menawar yang berkesinambungan antara kedua elite dengan latar belakang budaya dan ras yang berbeda.¹²

Hasil dari penelitian ini adalah Bupati yang pada awalnya hanya berkedudukan sebagai kepala daerah swapraja, telah dijadikan *ambtenaar* yang mempunyai hubungan struktural dengan gubernur jenderal, mempunyai akses langsung kepada rakyat pribumi, Sutherland lebih lanjut mengemukakan bahwa Dandies dan Raffleslah yang menempatkan para pejabat pribumi, di dalam suatu kerangka kerja yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat, sehingga Presiden waktu itu mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai representatif kekuasaan Hindia Belanda

¹²J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah, (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 25.

terhadap penduduk Asia, sebagai pemegang kekuasaan kepolisian dan sebagai pelaksana peraturan dan kehendak pemerintah pusat.¹³

Selain itu, terdapat juga penelitian tentang karakteristik kepemimpinan yang diteliti oleh Kouzes dan Posner, tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin. Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu mereka melakukan survei pada ribuan eksekutif swasta dan pemerintah. Rumusan masalahnya adalah Nilai (sifat atau karakter pribadi) seperti apa yang anda cari dan kagumi dari pemimpin anda ?, penelitian Kouzes dan Posner memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mengetahui karakteristik yang paling dikagumi oleh para pengikut dari eksekutif swasta dan pemerintah, dan melihat ciri khas yang paling dikagumi oleh para pengikutnya.¹⁴

Hasil penelitiannya pada tahun 1987, tahun 1995 dan tahun 2002 yang dilakukan pada enam benua yaitu Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa ciri khas pemimpin yang paling dikagumi yaitu jujur, berorientasi kedepan, kompeten, membangkitkan semangat, Cerdas, berwawasan adil, berwawasan luas, mendukung, dapat dipercaya, dapat diandalkan, kooperatif, tegas, imajinatif, ambisius, berani, perhatian, dewasa, setia, pengendalian diri, independen riset tersebut menunjukkan bahwa para pengikut mengharapkan pemimpin yang mempunyai karakteristik seperti kejujuran, berorientasi kedepan, kompeten, membangkitkan semangat pengikut.¹⁵

¹³*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁴ Kouzes and Posner, *The leadership the challenge (Tantangan Kepemimpinan)*, Erlangga, Jakarta, 2000 (Edisi Ketiga), hlm 19.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 20.

Sebagai seorang Kepala Daerah Suir Syam harus memiliki sifat-sifat seorang pemimpin, seperti yang dikemukakan oleh Mitchell (1978), kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), dan kesanggupan (*capability*) untuk merealisasikan ide menjadi serangkaian kegiatan.¹⁶ Dengan begitu, perannya sebagai pemimpin organisasi administrasi daerah memiliki kualitas kepemimpinan pada umumnya seperti, sifat, gaya, teknik, perilaku, dan kekuasaan) dalam ruang lingkup sistem pemerintahan Indonesia (Pamudji, 1989). Terkait dengan itulah, maka penelitian ini menjadi aspek penting, sehingga penelitian ini dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Fenomena bagaimana kepemimpinan di daerah menyelenggarakan pemerintahannya, menjadi sebuah masalah menarik dan membawa pengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Berkaitan dengan kepemimpinan Kepala Daerah, ada hal yang mendasar melatarbelakangi mengapa kepemimpinan Kepala Daerah menarik untuk dikembangkan dalam meneliti.

Pada masa kepemimpinan Walikota Padang Panjang periode 1998-2003 yang dipimpin oleh Yohanis Tamrin, mengalami kemunduran ini terlihat dari berbagai permasalahan dalam hal bidang pariwisata, objek wisata mifan yang dahulunya tidak terkelola dengan baik dan dibidang pembangunan pasar Padang Panjang yang hanya sebatas perencanaan saja.¹⁷ Tidak begitu terlihat keberhasilan yang diraih pada masa kepemimpinan beliau. Setelah itu di gantikan oleh Suir Syam, berpasangan dengan

¹⁶*Ibid.*, .hlm. 44.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Bustami Narda (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik) Pada tanggal 4 maret 2012.

Adirozal di periode pertama tahun 2003-2008. Selain itu Suir Syam satu-satunya Walikota Padang Panjang dan putra asli daerah yang mendapat kesempatan memimpin Padang Panjang dua kali periode semenjak kota seluas 23 Km² itu berdiri.¹⁸

Berikut nama-nama Walikota Padang Panjang dan masa baktinya dalam penyelenggaraan pemerintahan:

Tabel 1.2
Nama-Nama Walikota Padang Panjang dan masa baktinya

No	Nama	Masa Bakti
1	Umar Ali	1957 - 1958
2	M.Y.Dt.Malano Basa	5-5-1958 - 5-5-1959
3	R.M.Sutoro Tejokusumo	6-6-1959 - 1-1-1960
4	Sujatmoko, BA	1-1-1960 - 1-7-1963
5	St.Mansur Dt.Sati	1-7-1963 - 11-1963
6	Kamaruddin	11-1963 - 28-2-1967
7	Anwardin,BA	8-2-1967 - 19-5-1973
8	Drs. Rustian Said	9-7-1973 - 2-9-1980
9	Drs.Muzahar Mukhtar	2-9-1980 - 20-7-1983
10	Drs.Asril Saman	8-8-1983 - 8-8-1988
11	H.M. Achjarli A. Djalil, SH	8-8-1988 - 11-9-1993
12	Drs. Loekman Gindo	11-9-1993 - 12-9-1998
13	Yohanis Tamrin	12-9-1998 - 12-9-2003
14	Dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR	12-9-2003 - 12-9-2008
15	Dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR	12-9-2008 - Sekarang

Data Skunder : Bagian Pemerintahan Umum Setdako Padang Panjang

Bersama masyarakatnya, kepemimpinan Suir Syam telah mampu memantapkan visi menjadikan Padang Panjang sebagai pusat pendidikan Islam, pusat pelayanan

¹⁸<http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=1014>, ditulis oleh Ryan Syair pada tanggal 10 september 2008, dengan judul : Besok Suir Syam-Edwin dilantik Gubernur, diakes tanggal 12 januari 2012.

kesehatan dan menjadi daerah tujuan wisata.¹⁹ Selama kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, banyak memperoleh prestasi di setiap bidang²⁰ diantaranya bidang pendidikan, terbukti Padang Panjang memperoleh Grant Widyakrama atas keberhasilan penuntasan wajar 9 tahun.²¹ Dalam bidang perekonomian, Padang Panjang adalah sebagai sentral industri kulit terbesar diwilayah Sumatera atau nomor dua setelah pulau Jawa, industri wisata Minangkabau, peringkat 1 Ketahanan Pangan untuk aparatur pemerintahan Kabupaten atau Kota tingkat nasional.

Khusus sektor kesehatan dikonsepsi rumah sakit, dalam proses menuju standar internasional, makin menunjukkan dan memantapkan langkah, sejumlah kerja sama dengan rumah sakit di mancanegara, salah satunya Malaysia, Singapura, ide dan gebrakan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang menjadikan RSUD Padang Panjang jadi rujukan kesehatan di Sumbar, Riau dan Jambi, di samping untuk melayani kesehatan gratis bagi seluruh warga kota Padang Panjang.²²

Kebijakan tentang tertib rokok, semua iklan berbau rokok dilarang di Padang Panjang, dan Walikota Padang Panjang tidak menghiraukan kehilangan pendapatan

¹⁹LKPJ Walikota Padang Panjang akhir tahun 2008.

²⁰http://www.padangpanjangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=889:pemkot-padangpanjang-hujan-prestasi-dikota-serambi-mekkah=8&Itemid=474, ditulis oleh bagian humas pemko Padang Panjang, pada tanggal 10 Desember 2010, dengan judul: Hujan Prestasi di kota Serambi Mekkah, diakses tanggal 05 oktober 2011.

²¹http://www.padangpanjangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=889:pemkot-padangpanjang-hujan-prestasi-dikota-serambi-mekkah=8&Itemid=474, ditulis oleh bagian humas pemko Padang Panjang, pada tanggal 10 Desember 2010, dengan judul : diakses tanggal 05 oktober 2011.

²²http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3110:duagagasan&catid=14:pokok-a-tokoh&Itemid=84, ditulis oleh DN, Pada tanggal 3 April 2011, dengan judul : Dua Gagasan, diakses tanggal 5 oktober 2011.

asli daerah dari iklan rokok. Konsep dan gagasan Suir Syam itu kini banyak di contoh daerah lain di nusantara.²³

Bidang pariwisata di lakukan perbaikan dengan adanya pembangunan Minang Fantasi dilakukan oleh investor Pt. Niagara Fantasi Island (NFI), sedangkan lokasinya di areal MkV seluas 10 Ha adalah milik pemerintah kota Padang Panjang yang dikontrakkan kepada Pt.NFI selama 30 tahun, dengan prinsip bangun tradisi Minang yang ada di MinangKabau Village harus tetap dirawat.²⁴ Menciptakan pemerintahan yang bersih serta berwibawa dengan konsep pelayanan yang prima, pemberantasan bentuk KKN dan menempatkan personil sesuai dengan profesionalitas.²⁵

Selain itu dalam kepemimpinan Suir Syam, Kota Padang Panjang juga menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan. Penghargaan bidang kesehatan tersebut adalah Swasti Saba Wistara yang merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada Kota Sehat di Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang keberhasilan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang Dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

²³http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3110:duagagasan&catid=14:pokok-a-tokoh&Itemid=84, ditulis oleh DN, Pada tanggal 3 April 2011, dengan judul : Dua Gagasan, diakses tanggal 5 oktober 20

²⁴<http://padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=1575>, ditulis oleh Iwan, pada tanggal 2 maret 2008, dengan judul Wisata Minang Village(Mifan), diakses tanggal 5 oktober 2011.

²⁵http://www.padangpanjangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=889:pemkot-padangpanjang-hujan-prestasi-dikota-serambi-mekkah=8&Itemid=474, ditulis oleh bagian humas pemko Padang Panjang, pada tanggal 10 Desember 2010, dengan judul : diakses tanggal 05 oktober 2011.

Tabel 1.3
Prestasi Keberhasilan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

No	Prestasi yang diraih.	Bidang
1	Grant Widyakrama atas keberhasilan penuntasan wajib belajar 9 tahun.	Pendidikan
2	Piala Adipura sebanyak 7 kali tahun 2003 sampai dengan 2010.	Kesehatan
3	Piala Wahana Tata Nugraha sebagai kota tertib lalu lintas.	Keamanan
4	Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM.	Ekonomi
5	Peringkat pertama pelayanan kesehatan melalui penilaian Kementerian PAN dan GTZ Jerman.	Kesehatan
6	Satya lencana bidang Koperasi.	Ekonomi
7	Penghargaan Swasti Shaba Wiwerda.	Kesehatan
8	Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Arutala.	Kesehatan
9	Penghargaan Perlindungan Anak Nasional terhadap bahaya rokok.	Kesehatan
10	Penghargaan Askes Award.	Kesehatan
11	Memperoleh "NO Tobacco Award dari WHO.	Kesehatan
12	Penghargaan peringkat 1 ketahanan pangan untuk aparatur pemerintahan kabupaten atau kota.	Ekonomi
13	Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyampaian LAKIP tepat waktu.	Pemerintahan
14	Penghargaan WHO TAPS (Tobacco Advertisement, Promotion and Sponsorship.)	Kesehatan
15	Penghargaan dari WHO Award For Significant Performance on Tobacco/Smoke Free Area Development.	Kesehatan
16	Penghargaan tertinggi Swasti Saba Wistara atas Kota sehat.	Kesehatan
17	Penghargaan pemerintah di bidang industri Piala Upakarti.	Ekonomi
18	Penghargaan Golden Press Award.	Pemerintahan
19	Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri atas pencapaian target rekam data 100 persen.	Pemerintahan
20	Piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) 2011 terbaik di bidang pelayanan publik.	Pemerintahan

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, LKPJ Walikota Padang Panjang, Biodata Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang.

Keberhasilan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam memimpin, tak lepas dari kepemimpinannya yang mampu mengembangkan produktivitas dan efektivitas, pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Namun dengan hal itu kepemimpinannya tak lepas dari permasalahan, dimana kepemimpinannya diuji dengan kejadian terbakarnya pasar Padang Panjang, beredar isu dikalangan pedagang dan masyarakat bahwa pasar sengaja dibakar oleh pihak-pihak tertentu, karena dikaitkan dengan rencana dimulainya pembangunan pasar baru dilokasi yang sama bulan November mendatang.²⁶ Namun pembangunan untuk pasar Padang Panjang telah dijadwalkan, dengan masa sosialisasi dari Januari hingga April 2012 sudah harus dilaksanakan, karena pedagang yang berada di pasar saat ini sudah tidak nyaman lagi, apalagi semenjak peristiwa dua kali kebakaran pada September lalu.²⁷

Berdasarkan keberhasilan, kebijakan, prestasi, serta permasalahan yang terjadi selama kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang di atas, peneliti mencoba untuk mengetahui tentang bagaimana karakteristik kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintah di Padang Panjang.

Hal ini diperlukan untuk menilai sukses atau gagal nya pemimpin dengan mengamati sifat, mental dan kepribadian yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Serta pemimpin di daerah lain, bisa mempraktekkan hal tersebut.

²⁶<http://www.wartaporos.com/daerah/846-pasca-kebakaran-kios-pasar-padangpanjang>, ditulis oleh Andre Wartaporos pada tanggal 9 september 2011, dengan judul pasca-kebakaran-kios-pasar-padangpanjang, diakses pada tanggal 17 Maret 2012.

²⁷http://www.padangpanjangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=78%3Ape_mangunan&layout=blog&Itemid=477&limitstart=5, ditulis oleh kominfo Padang Panjang, dengan judul rencana pembangunan pasar dapat respon positif, diakses pada tanggal 17 Maret 2012.

Berkenaan dengan Perumusan Masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Padang Panjang.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan baru kepada kalangan akademisi, khususnya pada mahasiswa perguruan tinggi dalam mengetahui karakteristik kepemimpinan seorang kepala daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, dalam kaitannya dengan tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dalam penelitian ini digunakan sejumlah acuan yaitu tinjauan penelitian terdahulu dan teori. Hal ini dilakukan agar didapatkan gambaran, jawaban serta penjelasan secara teoritis terhadap penelitian yang dimaksud.

1. Penelitian Terdahulu

Selain mendapatkan penjelasan melalui teoritis berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, maka penting juga diketahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang cukup berhubungan dengan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Purwatiningtyas²⁸ yang berjudul Keberhasilan Kepemimpinan CEO (Chief Executive Officer) di Indonesia, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode Studi Pustaka, Penulis mencoba mendeskripsikan tentang keberhasilan Kepemimpinan dengan teori Keith Davis, dan peneliti menambahkan satu teori lagi yaitu kejujuran, hasil dari penelitian ini adalah seorang pemimpin bisa menuju seorang CEO (Chief Executive officer)

²⁸ Dilihat dalam jurnal yang ditulis oleh Purwatiningtyas (1995), *Keberhasilan Kepemimpinan CEO di Indonesia*, Gema Stikubank vol 14 No.5 ISSN332.105 .

haruslah mempunyai karakter yakni berkompeten, jujur, berpandangan jauh ke depan, berpandangan luas, cerdas, bisa memberi inspirasi, adil, berani dan matang.

Peneliti juga melampirkan Skripsi dalam penelitian terdahulu, Skripsi yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ria Panca Putri (2009)²⁹, yang berjudul, Tipe Kepemimpinan Walikota Padang periode 2004-2009 dalam mewujudkan Good Governance di Kota Padang – Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui metode wawancara mendalam dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam memilih beberapa informan yang terdiri dari Walikota Padang, Assisten I Walikota Padang, DPRD Kota Padang, Ketua dan Sekretaris Bappeda, dan juga masyarakat Kota Padang. Unit analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah Institusi atau lembaga, dan berlokasi di kantor Pemerintah Kota Padang. Teori yang ia gunakan dalam penelitian ini adalah empat macam tipe kepemimpinan, yang dikemukakan oleh Ralph White dan Ronald Lippit (2000) yang sesuai juga dengan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yaitu otokratis, demokratis, bebas (*Laissez Faire*), dan kharismatis.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan terhadap penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang diteliti oleh Ase

²⁹Ria Panca Putri. *Tipe Kepemimpinan WaliKota Padang periode 2004 - 2009 dalam mewujudkan Good Governance di Kota Padang - Sumatera Barat*. Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND Padang, 2009.

Kusuma Dewi (2011)³⁰ yang berjudul, *Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Studi Pada Kenagarian Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Unit analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah individu, yaitu Wali Nagari Tanjung Bingkung.

Dari beberapa penelitian di atas terlihat berbeda. Ada satu jurnal, membahas mengenai Keberhasilan Kepemimpinan CEO di Indonesia. Ada dua skripsi yang dirujuk sebagai penelitian terdahulu, yang pertama membahas tentang tipe kepemimpinan Kepala Daerah, dan yang satunya berusaha mencari tahu tentang analisis Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ase Kusuma Dewi yang berjudul *Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*, serta penelitian yang dilakukan oleh Purwatiningtyas terdapat dalam jurnal Keberhasilan kepemimpinan CEO (Chief Executive Officer) di Indonesia, memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dimana persamaannya terlihat pada topik yang diteliti tentang keberhasilan kepemimpinan.

³⁰Ase Kusuma Dewi. *Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Studi Pada Kenagarian Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)*. Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND Padang, 2011.

Penelitian ini juga berbeda, Jurnal yang ditulis Purwatiningtyas mencoba mendeskripsikan tentang Keberhasilan Kepemimpinan pada CEO di perusahaan Indonesia, pada penelitian Ria Panca Puteri menfokuskan pada tipe kepemimpinan Walikota Padang, yang mengkaji terhadap proses good governance yang dilakukan selama kepemimpinannya. Ase Kusuma Dewi fokus pada Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan Tanjung Binkung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam penelitian ini peneliti juga berusaha mendeskripsikan tentang Program dan keberhasilan kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, ketika menjabat sebagai kepala daerah, yaitu prestasi, keberhasilan Suir Syam, Walikota Padang Panjang dalam memimpin Pemerintahan Kota Padang Panjang, serta menganalisa karakteristik kepemimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sifat yang di kemukakan oleh Keith Davis, ada kelebihan sifat-sifat umum yang berkaitan terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, dalam hal ini kepemimpinan Suir Syam, keberhasilan yang dimilikinya selama menjabat sebagai Walikota Padang Panjang, tidak lepas dari kemampuan seorang Suir Syam Walikota Padang Panjang, dalam mensukseskan pembangunan daerah, baik itu di bidang ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan pendidikan.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Teori dan Konsep	Metode Penelitian	Informan	Lokasi	Hasil Penelitian
Purwaningtyas Keberhasilan Kepemimpinan CEO Di Indonesia	Teori sifat Kepemimpinan	Kualitatif Eksplanasi	Perusahaan di Indonesia	Studi Pustaka	Seorang pemimpin bisa menuju seorang CEO (Chief Executive officer) memiliki karakter yakni berkompeten, jujur, berpandangan jauh ke depan, berpandangan luas, cerdas, bisa memberi inspirasi, adil, berani dan matang.
Ria Panca Putri Tipe Kepemimpinan Walikota Padang Periode 2004 - 2009 dalam mewujudkan Good Governance di Kota Padang - Sumatera Barat.	Tipe Kepemimpinan dan prinsip Good Governance.	Kualitatif Desriptif	Pemko. Padang.	Kota Padang.	Walikota Padang Fauzi Bahar menggunakan tipe kepemimpinan yang otokratis, demokratis, bebas (Laissez Faire), dan kharismatis dalam situasi dan kondisi kebijakan Kota Padang yang berbeda.
Ase Kusuma Dewi Analisis Gaya Kepemimpinan Walinagari Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Studi Pada Kenagarian Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)	Teori Gaya Kepemimpinan.	Kualitatif Deskriptif	Perangkat Nagari	Solok	Keberhasilan yang diraih selama masa kepemimpinan dikarenakan gaya kepemimpinan yang diterapkan tidak hanya berorientasi kepada hasil tetapi juga mampu memadukan antara kebutuhan produksi dan manusianya.
Inola Anwar Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Teori Sifat Keith Davis	Kualitatif Deskriptif	Pemko Padang Panjang.	Kota Padang Panjang	Karakteristik Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang adalah berani, tegas, mempunyai inisiatif, pengetahuan yang luas, mempunyai ide dan gebrakan yang berbeda dari daerah lain, dan ketika ada persoalan yang sangat darurat, beliau bisa menemukan penyelesaiannya dengan meminta saran dari bawahan, serta mengkomunikasikan persoalan tersebut, berani mengambil keputusan dan resiko, mau bermusyawarah dan mufakat, mampu menjalin komunikasi yang akrab, peka terhadap lingkungan serta bawahan.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber. Purwaningtyas (2005). Ria (2009). Ase (2011).

B. Kerangka Teoritis

1. Karakter

Bila di lihat dari asal katanya, istilah karakter berasal dari bahasa Yunani *Karasso*, yang berarti 'cetak biru', 'format dasar' atau 'sidik' seperti dalam sidik jari.³¹ Dalam buku kamus lengkap Psikologi, karakter diartikan satu kualitas sifat yang tetap, terus menerus dan kekal, yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu objek, atau kejadian.³² Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu, yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi.³³

Karakter merupakan perpaduan segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi sebuah ciri khas khusus, jati diri atau identitas yang membedakan orang satu dengan yang lain, jadi karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu, karena itu jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut, akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu.³⁴ Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran

³¹ Saptono, *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter (wawasan strategi, dan langkah praktis)*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 18.

³² Kartini, Kartono, *Kamus lengkap Psikologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 82.

³³ Prayitno dan Belferik, *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*, PT Grasindo, Jakarta, 2011, hlm 47.

³⁴ N.K. Singh dan Mr. A.R. Agwan, *Encyclopaedia of the Holy Qur'an*, (New Delhi: balaji Offset, 2000) Edisi I hlm. 175.

karena pikiran, yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya.³⁵

Mounier (1956) mengajukan dua cara interpretasi dalam melihat karakter yaitu³⁶ :

- a. Kumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja, atau telah ada begitu saja dalam diri kita, karakter yang demikian dianggap sebagai sesuatu yang telah ada atau kodrat.
- b. Tingkat kekuatan melalui jika seorang individu mampu menguasai kondisi tersebut, karakter yang demikian disebut sebagai sebuah proses yang dikehendaki.

Menurut Doni Koesoema orang yang berkarakter adalah seperti orang yang membangun dan merancang masa depannya sendiri, dan dia tidak mau dikuasai oleh kondisi krodatnya, yang menghambat pertumbuhannya, sebaliknya dia menguasai, mengembangkan demi kesempurnaan kemanusiaan.³⁷ Karakteristik adalah Sifat dan kepribadian secara umum, beberapa karakteristik pribadi yang dianggap determinan yaitu, kecerdasan, kemantapan pribadi, kepercayaan diri, kemandirian, penuh pertimbangan, sifat dominan.³⁸

³⁵Rhonda Byrne, *The Secret*, PT Gramedia, Jakarta, 2007, hlm.17.

³⁶Mounier, Emmanuel, *The Character Of Man*, Translate into English by chyntia Rowland, New York, Harper dan Brother, hlm 22.

³⁷Doni koesoema, A, *Pendidikan Karakter*, PT Gramedia, Jakarta, 2007, hlm 20.

³⁸Simon Devung, *Pengantar ilmu administrasi dan manajemen*, Jakarta, 1998, hlm 19.

Sebagaimana yang diketahui, Karakteristik adalah sifat dan kepribadian secara umum, maka dari itu peneliti memilih teori sifat dalam penelitian ini, dikarenakan teori sifat telah berusaha menggeneralisasi sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin seperti: fisik, mental, dan kepribadian, dengan asumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kualitas sifat atau karakteristik tertentu yang dimiliki atau melekat dalam pemimpin tersebut.³⁹

2. Tipe

Tipe dalam bahasa inggris berarti model, contoh atau bentuk.⁴⁰ Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing, gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan.⁴¹

3. Gaya.

Gaya dalam bahasa inggris disebut dengan *style*, yang berarti corak atau mode seseorang yang tidak banyak berubah dalam mengerjakan sesuatu, hal ini karena gaya merupakan kesanggupan, kekuatan, cara, irama, ragam, bentuk, lagu, metode yang khas dari seseorang untuk bergerak serta berbuat sesuatu.⁴²

³⁹Harbani pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 89.

⁴⁰Wojowasito, Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris dengan ejaan yang disempurnakan*, Penerbit Hasta, Bandung, 1980, hlm 249.

⁴¹Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 42.

⁴²Inu Kencana, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, PT RefikanAditama, Bandung, 2003, hlm 27.

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik.⁴³

Berikut Perbedaan Karakter, Tipe dan Gaya dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Perbedaan Karakter, Tipe dan Gaya

No	Perbedaan	Karakter	Tipe	Gaya
1	Pengertian	sifat yang tetap, terus menerus dan kekal, yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi	model, contoh, atau bentuk seseorang melakukan sesuatu.	metode yang khas dari seseorang untuk bergerak serta berbuat sesuatu
2	Makna Konsep	sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu, yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi	aktivitas yang dipilah-pilah, gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan	sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik

⁴³Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 35.

4. Kepemimpinan

Definisi kepemimpinan menurut Veithzal Rivai (2003) secara luas adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.⁴⁴

Menurut Ralph M Stogdill dalam Noggi Tangkilisan kepemimpinan adalah sebagai suatu proses mempengaruhi kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi, dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan.⁴⁵ Edwin A Locke mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi dan inspirasi, maksudnya setiap pemimpin harus memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain tanpa paksaan tapi secara persuasif.⁴⁶ Dengan demikian kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain, tanpa paksaan dalam situasi tertentu, agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

⁴⁴Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 203

⁴⁶Lijan Poltak, *op.cit.*, hlm. 105

5. Karakter Kepemimpinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak.⁴⁷ Secara konseptual istilah karakter dipahami dalam dua kubu pengertian, pertama, bersifat deterministik, disini karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah teranugerahi atau dari asalnya.⁴⁸ Kedua, bersifat non deterministik atau dinamis. Disini karakter dipahami sebagai tingkat kekuatan atau ketangguhan seseorang dalam upaya mengatasi kondisi rohaniah yang sudah dari asalnya.

Salah satu guru Manajemen terkemuka abad ini menunjukkan, kunci keberhasilan hidup yang sesungguhnya, terletak pada *attitude*, karakter atau watak. Setelah watak, baru keberanian (*courage*) dan kemampuan (*ability*). Ke-pintaran, kompetensi, inteligensia, bahkan kerja keras sekalipun tak akan pernah membuat sebuah bangsa menjadi kuat dan disegani tanpa pemimpin dan rakyat yang berkarakter.⁴⁹

Inti atau karakter dalam kepemimpinan adalah kredibilitas, kejujuran, integritas, kebijaksanaan, dan pengorbanan, karakter-karakter inilah yang

⁴⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 623.

⁴⁸ Doni koesoema, A. *Pendidikan Karakter*, PT Gramedia, Jakarta, 2007, hlm 22.

⁴⁹ Gangsar Pamungkas, *Tips dan Trik Dahsyat Menjadi Pemimpin Dahsyat*, Araska, Yogyakarta, 2011, hlm 28.

menjadi pilar dan fondasi-fondasi utama kepemimpinan, sekaligus dasar dimana hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dibangun.⁵⁰

Beberapa karakter yang harus dikembangkan oleh pemimpin :⁵¹

1. Berilmu, efektif, efisien dan produktif dalam bertindak. Mampu menggunakan waktu dan memanfaatkan peluang.
2. Tahu akan kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
3. Berorientasi pada keluaran.
4. Membangun kekuatan, termasuk diri sendiri dan para sahabat kita.
5. Mau menerima kelebihan orang lain tanpa merasa malu.
6. Memusatkan perhatian pada beberapa bidang utama dan menyadari bahwa hanya melalui kerja keras secara terus menerus akan memperoleh hasil yang cemerlang.
7. Tawakal kepada Allah dengan meletakkan cita-cita yang tinggi.
8. Yakin pada diri sendiri bahwa hidup ini semata-mata hanya untuk mengabdikan pada Allah.

6. Karakteristik Kepemimpinan

Perubahan karakter adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin sejati.

Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan

⁵⁰ Gangsar Pamungkas, *Tips dan Trik Dahsyat Menjadi Pemimpin Dahsyat*, Araska, Yogyakarta, 2011, hlm 27.

⁵¹ Veithzal Rivai, *Kiat Pemimpin dalam abad ke 21*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 79.

tantangan, dan visi serta misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati.⁵²

Karakteristik kepemimpinan pada umumnya dimanapun dan apapun tingkatannya adalah jelas yaitu dia harus mempunyai kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain guna bersama-sama berjuang, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama.⁵³

Menurut J. Kaloh di dalam bukunya *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)* mengemukakan bahwa Salah satu Karakteristik pemimpin pemerintahan, khususnya para Kepala Daerah yaitu⁵⁴ :

- a. Tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat.
- b. Memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran dan mungkin juga pengawasan yang datangnya dari masyarakat.
- c. Tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat.

7. Teori Sifat Kepemimpinan

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Karakteristik adalah Sifat dan kepribadian secara umum, beberapa karakteristik pribadi yang dianggap

⁵²<http://politik.kompasiana.com/2011/09/02/kepemimpinan-berkarakter/>, Tulisan ini ditulis oleh Elias Sumardi Dabur, Pada tanggal 11 Desember 2011, dengan judul *Kepemimpinan Berkarakter*, diakses pada tanggal 26 juni 2012.

⁵³ ⁵³Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah kepemimpinan Abnormal itu?* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 328.

⁵⁴J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah, (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 5.

determinan yaitu, kecerdasan, kemantapan pribadi, kepercayaan diri, kemandirian, penuh pertimbangan, sifat dominan.⁵⁵, sehingga peneliti memakai teori sifat kepemimpinan, karena teori sifat berusaha mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Diantara penganut teori ini adalah George R. Terry, Ordway dan Keith Davis.

1. Teori sifat George R. Terry⁵⁶

George R. Terry dalam bukunya "*principles of management*" 1964 menuliskan 10 sifat pemimpin yaitu:

1. Kekuatan

- Pemimpin harus memiliki kekuatan badaniah dan rohaniyah dan ini merupakan syarat pokok bagi pemimpin yang bekerja lama dan berat pada waktu yang lama.
- Pemimpin harus memiliki mental yang kuat dalam hal mengatasi permasalahan, agar pemimpin dapat menemukan solusi untuk sebuah permasalahan.
- Pemimpin harus memiliki motivasi kerja dalam memimpin, agar bisa mengatasi semua permasalahan yang dihadapi.

⁵⁵ Simon Devung, *Pengantar ilmu administrasi dan manajemen*, Jakarta, 1998, hlm 19.

⁵⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah kepemimpinan Abnormal itu?* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 47.

2. Stabilitas Emosi

- Pemimpin yang baik itu memiliki emosi yang stabil. Dia tidak mudah marah, tersinggung perasaan, dan tidak meledak-ledak secara emosional.
- Pemimpin diharapkan bisa mengendalikan emosi dalam setiap tindakannya.
- Pemimpin harus memiliki rasa simpati yang tulus, diikuti dengan rasa yang tulus dan mau berkorban dalam tindakan, agar dalam setiap interaksi orang-orang merasa senang dan nyaman.

3. Pengetahuan tentang relasi insani

- Salah satu tugas pokok pemimpin ialah memajukan dan mengembangkan semua bakat serta potensi anak buah, untuk bisa bersama-sama maju dan mengecap kesejahteraan.
- Pemimpin diharapkan memiliki pengetahuan tentang sifat, watak dan perilaku para anggota kelompoknya, agar pemimpin bisa menilai kelebihan dan kelemahan pengikutnya.
- Pemimpin harus mengenali pribadi pengikutnya agar bisa berinteraksi dengan baik.

4. Kejujuran

- Pemimpin yang baik itu harus memiliki kejujuran yang tinggi, yaitu jujur pada diri sendiri dan pada orang lain.

- Pemimpin selalu menepati janji, agar tidak ada yang merasa dikecewakan karena semua janji yang diucapkan dipenuhi.
- Pemimpin harus menjaga kepercayaan dari para pengikutnya, agar tidak ada rasa saling curiga, sehingga apapun kegiatan dijalankan dengan penuh kepercayaan.

5. Objektif

- Pertimbangan pemimpin itu harus berdasarkan hati nurani yang bersih, supaya objektif. Dia akan mencari bukti-bukti nyata dan sebab dari kejadian dan memberikan alasan yang rasional atas penolakkannya.

6. Dorongan Pribadi

- Keinginan dan kesediaan untuk menjadi pemimpin itu harus muncul dari dalam hati sanubari sendiri.
- Pemimpin mendapatkan dukungan dari luar, hal ini akan memperkuat keinginan untuk memberikan pelayanan dan pengabdian diri kepada kepentingan orang banyak.

7. Keterampilan berkomunikasi

- Pemimpin diharapkan mahir menulis dan berbicara, mudah menangkap maksud orang lain, cepat menangkap esensi pertanyaan orang luar dan mudah memahami maksud para anggotanya.

- Pemimpin harus bisa mengkoordinasikan sumber tenaga manusia.
- Pemimpin harus bisa mengintegrasikan berbagai opini, serta aliran yang berbeda untuk mencapai suatu kerukunan dan keseimbangan.

8. Kemampuan mengajar

- Pemimpin yang baik itu diharapkan juga menjadi guru yang baik. Tujuannya agar pemimpin bisa mandiri, mau memberikan loyalitas dan partisipasinya.

9. Keterampilan Sosial

- Pemimpin juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola manusia agar mereka dapat mengembangkan bakat dan potensinya.
- Pemimpin dapat mengenali segi-segi kelemahan dan kekuatan setiap anggotanya, agar bisa ditempatkan pada tugas yang cocok dan pembawaan masing-masing.

10. Kecakapan teknis atau kecakapan manajerial

- Pemimpin harus superior dalam satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu. Juga memiliki kemahiran manajerial untuk membuat rencana, mengelola, menganalisis keadaan, membuat keputusan, mengarahkan, mengontrol, dan memperbaiki situasi yang tidak mapan.

Selain George R. Terry, Ordway Tead juga mengemukakan 10 sifat pemimpin yaitu :⁵⁷

1. Energi jasmaniah dan mental

- pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa yang tidak akan pernah habis, agar mempunyai daya tahan yang kuat, dan tidak mengalami sakit sehingga menghambat menjalankan tugas sebagai pemimpin.

2. Kesadaran akan tujuan dan arah

- Ia memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan, dia tahu persis kemana arah yang mau dituju, memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi kelompok yang dipimpinya.

3. Antusiasme, semangat

- Pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang akan dicapai itu harus sehat, berarti, bernilai, memberikan harapan-harapan yang menyenangkan, memberikan sukses dan memberikan semangat.

4. Keramahan dan kecintaan

- Kecintaan itu berarti simpati yang tulus, disertai kesediaan berkorban bagi pribadi-pribadi yang disayangi. Sebab pemimpin ingin membuat suasana senang dan bahagia. Sedangkan

⁵⁷Ibid., hlm 44

keramahan mempunyai sifat mempengaruhi orang lain juga membuka setiap hati yang masih tertutup.

5. Integritas

- Pemimpin harus bersifat terbuka, merasa utuh bersatu.
- Sejiwa, dan seperasaan dengan anak buahnya.
- Merasa senasib dalam satu perjuangan.

6. Penguasaan teknis

- Setiap pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu.
- Pemimpin mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.

7. Ketegasan dalam mengambil keputusan

- Pemimpin yang berhasil itu pasti dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas dan cepat, sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya.

8. Kecerdasan

- Kecerdasan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin itu, merupakan kemampuan untuk melihat dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang krusial dengan cepat dan menemukan penyelesaiannya.

9. Keterampilan mengajar

- Pemimpin yang baik itu adalah seorang guru yang mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu.

10. Kepercayaan

- Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan anak buahnya. Kepercayaan bahwa para anggota pasti dipimpin dengan baik, dan diarahkan pada sasaran yang benar.

Keith Davis dalam Miftah Thoha (2009) dalam bukunya yang berjudul *Human Behavior at Work : Human relations and Organizational Behavior*, Davis mengemukakan empat macam kelebihan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin, yakni kecerdasan, kedewasaan dan keeluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan.⁵⁸ Selanjutnya, untuk menjelaskan karakteristik dari keempat kelebihan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin, yang dikemukakan oleh Keith Davis, dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut⁵⁹

⁵⁸Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.33.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 34.

1. **Kecerdasan.**
 - a. Pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin.
 - b. Pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya.
2. **Kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial.**
 - a. Pemimpin cenderung menjadi matang.
 - b. Pemimpin mempunyai emosi yang stabil, karena mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas sosial.
 - c. Pemimpin mempunyai keinginan menghargai dan dihargai.
 - d. Pemimpin dapat melakukan kerjasama.
 - e. Mempunyai keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri.
3. **Motivasi diri dan dorongan berprestasi.**
 - a. Pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.
 - b. Pemimpin berusaha bekerja untuk mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan yang ekstrinsik.
 - c. Pemimpin diharapkan harus selalu mempunyai dorongan yang besar untuk dapat menyelesaikan sesuatu.
4. **Sikap-sikap hubungan kemanusiaan.**
 - a. Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya.

- b. Pemimpin mempunyai perhatian.
- c. Pemimpin harus selalu lebih mengetahui terhadap bawahannya
- d. Pemimpin perlu berorientasi kepada bawahannya.

George R. Terry dalam Kartono (2010) dalam bukunya *principles of management* (1964), mengatakan bahwa ada sepuluh sifat pemimpin dan dari penjelasan ke sepuluh sifat tersebut tidak membahas mengenai kecerdasan, padahal dalam sebuah kepemimpinan kecerdasan sangat diperlukan sebagai upaya dari pemimpin dalam berfikir dan bertindak, bersifat deskriptif, tidak mempunyai analisis bagaimana sifat-sifat itu kaitannya dengan keberhasilan seorang pemimpin, sedangkan Ordway tead lebih menjelaskan Sifat-sifat tersebut untuk para pemimpin pada umumnya, tetapi dalam prakteknya kesepuluh sifat tersebut tidak harus semuanya secara bersamaan, dimiliki oleh seorang pemimpin, melainkan sangat bergantung pada tingkat kondisi dari pengikutnya. Teori sifat yang dikemukakan oleh Ordway Tead ini tidak mempunyai hubungan antara-antara sifat yang dianggap unggul tersebut dengan keberhasilan kepemimpinan.

Kemudian peneliti memilih teori sifat yang dikemukakan oleh Keith Davis karena teori sifat telah berusaha menggeneralisasi sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin seperti: fisik, mental, dan kepribadian, dengan asumsi

bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kualitas sifat atau karakteristik tertentu yang dimiliki atau melekat dalam pemimpin tersebut.⁶⁰

Peneliti bisa menemukan bagaimana karakter serta kelebihan sifat kepemimpinan yang diterapkan oleh Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, selama memimpin Kota Padang Panjang. Pada awalnya peneliti berasumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kualitas sifat atau karakter tertentu yang dimiliki oleh pemimpin tersebut, dimana dalam teori Keith Davis lebih dominan menjelaskan mengenai kelebihan sifat-sifat kepemimpinan yakni Kecerdasan, kedewasaan dan keeluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap hubungan kemanusiaan.

Sementara, teori George R. Terry dan Ordway selalu saja terjadi sifat-sifat kepemimpinan yang tumpang tindih, kekuatan tumpang tindih dengan energi jasmaniah dan mental, stabilitas emosi tumpang tindih dengan keramahan dan kecintaan dan seterusnya, sedangkan kelebihan dari teori Keith Davis yang mengemukakan kelebihan sifat-sifat umum, telah mewakili ke sepuluh sifat dari George R.Terry dan Ordway Tead, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

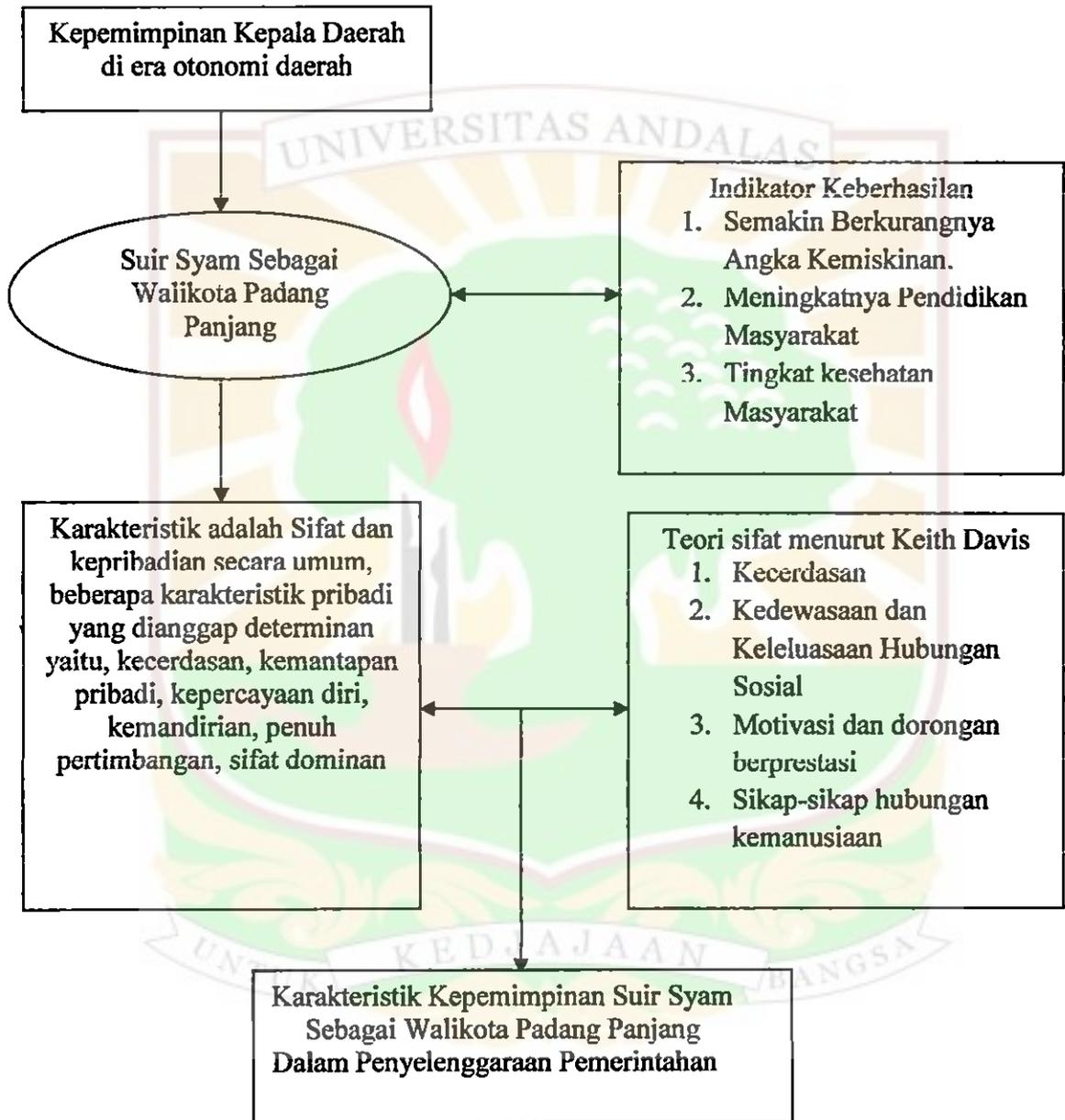
⁶⁰Harbani pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 89.

Tabel 2.3
Kelebihan Teori sifat Keith Davis

No	Teori sifat Keith Davis	Teori sifat George R. Terry dan Ordway tead
1	Kecerdasan	Kecerdasan, keterampilan komunikasi, keterampilan mengajar, penguasaan teknis, kemampuan mengajar
2	Kedewasaan dan keeluasaan hubungan social	Stabilitas emosi, pengetahuan tentang relasi insani, keterampilan sosial, ketegasan dalam mengambil keputusan, energi jasmaniah dan mental, kekuatan
3	Motivasi diri dan dorongan berprestasi	Dorongan pribadi dan entusiame
4	Sikap hubungan kemanusiaan	Kepercayaan, objektif, kejujuran, keramahan dan kecintaan, kesadaran akan tujuan arah

Maka dari itu peneliti memilih teori sifat Keith Davis dalam hal ini lebih sederhana dan sudah mewakili ke sepuluh teori sifat dari George R.Terry dan Ordway tead, dan juga teori sifat Keith Davis lebih menjelaskan kelebihan sifat-sifat yang dimiliki oleh kepemimpinan organisasi yang berkaitan dengan keberhasilan kepemimpinan organisasi.

C. Skema Pemikiran



Penjelasan skema pemikiran, Penelitian karakteristik kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang Panjang tentang kepemimpinan dalam otonomi daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, Seorang kepala daerah dalam melaksanakan implementasi kepemimpinannya tidak hanya terfokus pada pembuat keputusan tetapi juga memperhatikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang nantinya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengangkat tentang bagaimana fenomena kepemimpinan Walikota Padang Panjang, bisa di lihat dari segi prestasi yang ia peroleh di dalam pemerintahan, kebijakan yang ia keluarkan di dalam kepemimpinan Walikota Padang Panjang. Pada pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota, kepemimpinan Kepala Daerah ikut menentukan keberhasilan organisasi administrasi pemerintahan daerah, Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa kriteria antara lain semakin berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesehatan.

Selama kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, telah banyak melakukan perubahan demi perubahan, diantaranya di bidang ekonomi Padang Panjang terpilih sebagai pusat sentral industri kulit terbesar nomor 2 setelah pulau jawa, memperoleh Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM, Penghargaan pemerintah di bidang industri, Piala Upakarti membuat perekonomian kota Padang Panjang meningkat. Dalam hal pendidikan, memperoleh Grant Widyakrama atas keberhasilan penuntasan wajar 9 tahun, dan terpilihnya SMA 1 Padang Panjang

sebagai SMA terbaik di Sumatera Barat. Pada aspek kesehatan kota Padang Panjang terpilih sebagai kota sehat tertinggi. Selama masa bakti Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, telah berhasil meletakkan sendi-sendi dasar ketiga pilar pembangunan tersebut

Dalam hal ini karakteristik Sifat dan kepribadian secara umum, beberapa karakteristik pribadi yang dianggap determinan yaitu, kecerdasan, kemantapan pribadi, kepercayaan diri, kemandirian, penuh pertimbangan, sifat dominan, untuk itu peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Keith Davis, Dimana Keith Davis merumuskan empat sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, Karena peneliti ingin melihat karakteristik Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Teori ini berusaha mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶¹ Pendekatan ini dipilih karena lebih mampu menemukan fakta dalam melihat realitas di lapangan dengan teori kepemimpinan akan menjelaskan bagaimana karakteristik Walikota Padang Panjang dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang cermat terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan gejala-gejala. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan kondisi yang terjadi saat penelitian, dengan kata lain untuk memperoleh informasi tanpa pengujian hipotesa.⁶²

Metode studi kasus adalah salah satu dari metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang lebih cocok bila pertanyaan penelitiannya berkenaan dengan "How atau Why", bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena

⁶¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Kosda Karya, Bandung, 2007, hal. 3.

⁶² Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Bandung, 2006, hal. 26.

kontemporer di dalam kehidupan nyata.⁶³ Studi kasus dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor Pemerintah Kota (Pemko) Kota Padang Panjang, terutama pada beberapa bagian yaitu Walikota, Sekda, Staf Ahli, Lembaga lain, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah. Kemudian untuk triangulasi Sumber maka penelitian ini juga dilaksanakan pada DPRD Kota Padang Panjang Sebagai legislatif, Ketua KAN, dan Wartawan sebagai pihak yang merasakan hasil dari kepemimpinan Suir Syam di Kota Padang Panjang.

C. Peranan Peneliti

Dalam metode penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Peneliti juga berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁶⁴ Peranan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti merupakan instrument utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data.

Pada penelitian ini, peneliti turun ke lapangan sebagai pengumpul data atau sebagai instrument penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan upaya untuk

28 Robert K. Yin, *Studi Kasus Design & Metode*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 10-11.

⁶⁴Sugiono, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 60.

mendapatkan data sesuai dengan obyek yang akan diteliti, dengan tetap berada di luar realitas atau lingkungan sosial yang akan diteliti. Peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat luar agar mampu untuk meminimalisir unsur subjektifitas, dan hasil penelitian benar-benar mampu untuk mendeskripsikan tujuan dari penelitian ini.

Pada tanggal 11 April 2012 peneliti memperoleh surat izin penelitian dari bagian akademik, melaksanakan penelitian pada tanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan I FISIP atas nama Dekan dengan Nomor: 685/UN.16.09/PP/2012, selanjutnya peneliti melanjutkan pengurusan surat izin penelitian ke kantor Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas Sumatera Barat.

Pada tanggal 16 April 2012, mulai saat itu peneliti resmi melaksanakan penelitian dengan adanya surat Keterangan atau Rekomendasi untuk melakukan penelitian dengan Nomor: B.070/543/WAS-BKPL/2012 yang didalam surat itu ditujukan tembusan kepada Bapak, Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang, Sdr. Walikota Padang Panjang Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Padang Panjang.

Pada tanggal 25 April 2012 peneliti pergi ke lokasi penelitian di Padang Panjang untuk mengurus surat izin selanjutnya, prosesnya melalui kantor pelayanan perizinan terpadu (KP2T) dikota Padang Panjang, pada saat mengurus surat tersebut peneliti tidak membawa kartu tanda pengenal serta fotocopy proposal, akhirnya peneliti mencoba melobi pegawai KP2T, agar kartu tanda pengenal bisa menyusul,

karena peneliti tidak menetap di Padang Panjang, selanjutnya proses lobi berbuah hasil, surat izin rekomendasi penelitian dengan Nomor: 070/119/KPPT-PP/IV-2012.

Pada Tanggal 10 Mei 2012 peneliti mengunjungi Kantor Balai Kota Padang Panjang, dan langsung bertemu dengan ajudan Walikota Padang Panjang, Bapak Hengki sebelumnya peneliti sudah mengenal pada saat survei awal, kemudian peneliti menyatakan maksud untuk melakukan wawancara dengan Walikota Padang Panjang, Bapak Hengki menawarkan tanggal 16 Maret 2012 jam 08.00 WIB, karena pada saat itu Bapak Suir Syam ke kantor dan bisa langsung bertemu, peneliti menyetujui tanggal tersebut, pada hari itu juga peneliti dibantu Bapak Hengki memasukkan surat pada Sekretaris daerah kota Padang Panjang, sekaligus staff ahli bagian hukum dan politik, Bapak Hengki menawarkan tanggal yang sama yakni 16 Mei 2012, dikarenakan peneliti tidak menetap di Padang Panjang.

Di hari yang sama, peneliti juga memasukkan surat izin penelitian ke Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, untuk membuat jadwal wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, pada saat itu peneliti di suruh menghadap bagian administrasi, untuk dibuatkan disposisi, pada saat kepala bagian administrasi hendak meminta tanda tangan, kepala dinasnya keluar dan peneliti diminta untuk menunggu, tetapi dari pada menunggu disana, peneliti mohon izin untuk melanjutkan ke kantor dinas selanjutnya, setelah itu peneliti melanjutkan perjalanan ke kantor Dinas Kesehatan Padang Panjang untuk membuat jadwal wawancara, sesampainya di kantor dinas tersebut, Kepala Dinas Kesehatan pergi keluar kota menghadiri sebuah acara, karena peneliti mempunyai nomor Kepala Dinas Kesehatan, jadi tidak perlu

acaha' kareua beuehii meureunah' nomoi. Kabaja Dinas Kesehatan' laqi' ijak beueh
 kantoi qinag' ierobur' Kabaja Dinas Kesehatan' beueh' keuag' kora' meueh' qin' kereua
 Dinas Kesehatan' Badaung' Badaung' puitik' meureunah' laq' laq' *ma'maneua' zek' meureunah' q'*
 ke' kantoi' qinag' zek' meureunah' zek' iin' beuehii' meureunah' beueh' zek' ke' kantoi'
 meureunah' ierabi' qin' beueh' meureunah' qin' beuehii' meureunah' iin' puitik' meureunah'
 beueh' meureunah' meureunah' kabaja' qin' keuag' kora' beuehii' qin' puitik'
 beueh' meureunah' puitik' qin' beuehii' beueh' zek' kabaja' beueh' meureunah'
 Dinas' beueh' keuag' kora' Badaung' Badaung' beueh' zek' iin' beuehii' q' zek' meureunah'
 beueh' keuag' kora' Badaung' Badaung' puitik' meureunah' laq' laq' *ma'maneua' qin' kabaja'*

Di' pui' zek' zek' beuehii' iin' meureunah' zek' iin' beuehii' ke' Dinas'
 qin' beuehii' ijak' meureunah' q' Badaung' Badaung'

beuehii' Babak' Heneki' meureunah' beuehii' zek' zek' zek' 10' Mei' 2015'
 beueh' zek' keuag' kora' Badaung' Badaung' zek' zek' zek' puitik' puitik' qin'
 beuehii' ierobur' beueh' pui' iin' beuehii' qin' Babak' Heneki' meureunah' zek'
 iin' Babak' Heneki' zek' ke' kantoi' qin' puitik' beuehii' beuehii' meureunah'
 Babak' Heneki' meureunah' beuehii' 10' Mei' 2015' iin' 08:00' WIB' kareua' beueh' zek'
 meureunah' puitik' puitik' *ma'maneua' qin' Meureunah' Badaung' Badaung'*
 Heneki' zek' beuehii' zek' beuehii' beueh' zek' zek' zek' keuag' kora' beuehii'
 Badaung' qin' beuehii' beuehii' zek' Meureunah' Badaung' Badaung' Babak'

Bada' beuehii' 10' Mei' 2015' beuehii' meureunah' kantoi' Bada' keuag' kora' Badaung'
 beuehii' zek' iin' zek' beuehii' beuehii' keuag' kora' 020110JKPPT-PRVA-2015'
 kareua' beuehii' ijak' meureunah' q' Badaung' Badaung' zek' beuehii' beuehii'

mendapat disposisi, langsung saja menghubungi Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat jadwal wawancara.

Pada tanggal 16 Mei 2012, peneliti berangkat ke Padang Panjang dengan tujuan untuk mewawancarai Walikota Padang Panjang, ternyata setelah peneliti sampai di kantor Walikota Jam 08.00 WIB, terlihat pegawai sedang melakukan Apel pagi, Peneliti bertemu protokoler dan langsung di suruh keruangan, tiba diruangan, protokoler menemui peneliti dan menginformasikan, bahwa Bapak Suir Syam ternyata ada jadwal keluar kota, ada perasaan kecewa karena sudah jauh-jauh dari padang, namun protokoler menyarankan tanggal 28, 29 Mei 2012 tetapi peneliti harus menelpon untuk memastikan Bapak Suir Syam ada di kantor atau tidak, peneliti menyetujuinya, setelah itu peneliti mendapat kesempatan untuk mewawancarai Sekretaris Daerah kota Padang Panjang, Bapak Budi Hariyanto, wawancara dilakukan kurang lebih setengah jam.

Selanjutnya peneliti juga memperoleh waktu untuk mewawancarai staf ahli bagian hukum dan politik kota Padang Panjang, Bapak Saharuddin, dan pada hari yang sama peneliti mewawancarai kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Bapak Jon Kenedi, proses wawancara berjalan lancar, sungguh peneliti merasa waktu tidak terbuang walaupun tidak jadi mewawancarai Bapak Suir Syam, namun tiga dari salah satu informan dapat diwawancarai.

Pada tanggal 23 Mei 2012, peneliti berangkat ke Padang Panjang jam 07.00 WIB untuk mewawancarai Bapak Kepala Dinas Kesehatan, walaupun jadwalnya di siang hari, sampai di Padang Panjang pergi ke kantor BAPPEDA, dikarenakan surat

izin penelitian sudah dimasukkan, ingin mengetahui disposisi nya, sampai di kantor, pegawai mengatakan Bapak kepala ada, bisa wawancara sekarang, tapi peneliti perhatikan bapak sedang ada tamu, dan peneliti menunggu, setelah beberapa menit menunggu Bapak serta tamu tersebut keluar, peneliti menyampaikan maksud pada Bapak untuk wawancara, Bapak bilang tidak bisa karena ada rapat, seharusnya bikin janji terlebih dahulu, setelah itu peneliti memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, karena sudah bikin janji dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, dr Mawardi, MMK, sampai di Kantor Dinas Kesehatan, Peneliti bertanya pada salah satu staff, apakah bapak sudah datang, dan ternyata bapak belum sampai di kantor, peneliti menunggu dan memberitahu Bapak lewat sms, kalau peneliti sudah sampai di kantor, setelah 4 jam, akhirnya peneliti bertemu dengan Bapak Mawardi, mewawancarai beliau pada jam 15.00 WIB.

Pada hari selanjutnya peneliti berangkat ke Padang Panjang, karena sudah membuat janji dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang, sampai di kantor peneliti mencari informasi apakah Bapak sudah datang, salah satu pegawai memberitahu Bapak sedang *Hearing* di Kantor DPRD Kota Padang Panjang, peneliti menunggu Bapak di kantor dan memberitahu lewat sms, kalau peneliti sudah berada di kantor, akhirnya pada jam 12.30 WIB peneliti bertemu dengan Bapak Reflis, kepala Dinas Koperasi UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang dan melakukan wawancara.

Pada Tanggal 28 Mei 2012 akhirnya peneliti mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala BAPPEDA, sebelumnya Peneliti mengirim sms dengan

maksud untuk mewawancarai bapak Kepala BAPPEDA, Rusdianto, SIP,MIP, Bapak memberi waktu jam 08.00 WIB, peneliti berangkat dari Padang jam 06.30 WIB sampai dikantor BAPPEDA jam 07.45 WIB, saat itu pegawai dan Kepala BAPPEDA sedang melaksanakan upacara pagi, selesai upacara peneliti menemui Bapak Rusdianto diruangannya, alhamdulillah bisa mewawancarai Bapak Rusdianto dengan lancar.

Pada hari yang sama peneliti berkesempatan mewawancarai Ketua DPRD Kota Padang Panjang, sampai di Kantor DPRD Peneliti menghubungi ajudan Ketua DPRD dan memberitahu kalau sudah berada di kantor, kemudian ajudan Ketua DPRD Kota Padang Panjang mengatakan untuk menunggu, karena Bapak Novi Hendri ada kemalangan, peneliti memutuskan untuk menunggu, dari pada tidak ada kerjaan peneliti mengambil dokumentasi, serta pergi ke perpustakaan membaca Koran dan banyak buku sejenis LPJ, Risalah, Laporan Kunjungan, pada jam 13.00 WIB peneliti akhirnya bertemu Ketua DPRD Kota Padang Panjang, dan mewawancarai Bapak Novi Hendri diruangannya.

Pada tanggal 29 Mei 2012 peneliti pergi ke kantor Kepala Dinas Pasar untuk mewawancarai Bapak Kepala Kantor Pasar, Iriansyah Tanjung, dan sampai di kantor Pasar Bapak ada di kantor dan bisa langsung mewawancarai beliau, tetapi sedang wawancara pegawainya memberitahu bahwa ada tamu dari Kapolres Padang Panjang, terpaksa waktu wawancara dipersingkat, dengan jawaban yang tegas, padat dan jelas, dan selesai mewawancarai kepala kantor Pasar. Setelah mewawancarai kepala kantor pasar, peneliti tidak mau membuang-buang waktu ketika di Padang Panjang, peneliti

mencari informasi mengenai ketua KAN daerah asal Bapak Suir Syam, di Gunung, dan peneliti memilih ojek sebagai kendaraan untuk mengantarkan ke kantor KAN daerah gunung, dan ternyata tukang ojek tersebut tahu, bahwa ketua KAN Nagari Gunung bekerja di Kantor Dinas Pendidikan, yang gelar beliau Datuk Simarajo, tanpa pikir panjang peneliti langsung ke kantor, menanyakan informasi tentang Bapak tersebut, alhamdulillah Bapak tersebut ada dikantor, Bapak bersedia untuk diwawancarai.

Pada tanggal 3 Juni 2012 akhirnya bisa melihat Bapak Walikota Padang Panjang, sesampai dikantor dengan mobil BA 1 N, tidak bisa dibayangkan rasa senang, dan terharu karena sudah satu bulan lamanya menanti waktu untuk dapat bertemu beliau. Sesampai dikantor tamu sudah banyak menanti, mulai dari SKPD, Wartawan, Kepala IPDN, Kepala rumah sakit, tapi tadi ajudan sudah memberitahu, akan disempatkan untuk wawancara, setelah menunggu 4 jam, ternyata Bapak dikabarkan akan menghadiri penerimaan piala Adipura malam ini di Istana Negara, dan wawancara hari ini dibatalkan, karena Bapak harus berangkat ke Jakarta.

Pada hari yang sama peneliti mendapat kesempatan untuk wawancara dengan Bapak Wakil Walikota Padang Panjang, peneliti berangkat ke rumah dinas Wakil Walikota Padang Panjang, peneliti dapat sms dari ajudan, untuk tetap dirumah karena Bapak masih menghadiri acara bersama Menteri koperasi dan UMKM, setelah menunggu akhirnya peneliti dipersilahkan masuk ke rumah dinas dan bertemu dengan Bapak Edwin, Wakil Walikota Padang Panjang, walaupun beliau terlihat lelah, tapi masih menyempatkan waktu untuk wawancara dengan peneliti.

Pada tanggal 6 Juni 2012, peneliti dikabari oleh ajudan walikota Padang Panjang, untuk hadir dalam acara penyambutan piala adipura di kantor walikota, dan wawancara dengan Bapak walikota, peneliti segera menuju Padang Panjang, dan sampai disana semua pegawai bersiap-siap diluar bersama Bapak Edwin dan Bapak Budi Hariyanto, menyambut piala adipura, akhirnya rombongan yang ditunggu datang, bersama dengan beberapa petugas kebersihan yang membawa piala adipura, diawali dengan berfoto bersama, setelah itu makan bersama Bapak Suir Syam, Sekretaris daerah serta aparatur lainnya, dan wartawan, berakhir acara makan bersama, peneliti pergi keruangan tunggu, untuk wawancara dengan Bapak Suir Syam, tak lama kemudian ajudan memanggil untuk masuk keruangan Bapak, dan akhirnya kesempatan yang dinanti datang, dan bisa mewawancarai Bapak Walikota Padang Panjang pada jam 11.15 WIB.

Pada tanggal 7 Juni 2012, peneliti berkesempatan hadir dalam acara peringatan HTTS, Bulan Bakti gotong royong di kantor Balaikota Padang Panjang, pada saat itu wartawan banyak hadir, peneliti berusaha mencari informasi tentang wartawan yang bisa dijadikan informan untuk diwawancarai, peneliti memilih Fadly, Wartawan Padang Ekspres yang merupakan kontributor Padang Panjang, Fadly pun bersedia untuk di wawancarai.

Pada tanggal 18 juli peneliti berangkat ke Padang Panjang, untuk mencari data taambahan, dan melakukan wawancara dengan beberapa orang wartawan, yang pada saat itu berhasil diwawancarai, wartawan dari ANTARA News, dan Merapi News di kantor Balaikota Padang Panjang.

Selama melakukan penelitian ini, Peneliti memakan waktu kurang lebih satu setengah bulan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merasa tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi pembacanya.

D. Unit Analisis

Dalam sebuah penelitian unit analisis berfungsi untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain objek yang diteliti ditentukan berdasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah individu yaitu Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang. Sementara untuk menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinannya digunakan aparatur atau bawahannya di dalam institusi yang di pimpin.

Pada tingkat analisis subjek ini harus terikat dengan keanggotaan dalam organisasi atau Institusi. Mereka berposisi sebagai anggota atau bawahan yang menempati posisi tertentu dalam struktur. Dari mana data fenomena penelitian diperoleh hanya terfokus, pada subjek yang terkait dengan keanggotaan dalam kelompok atau organisasi.⁶⁵

⁶⁵ Burhan Bungin, *Op.cit.*, hlm. 127.

E. Teknik Pemilihan Informan

Untuk mendapatkan informasi dari informan, maka peneliti menggunakan teknik pemilihan informan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pemilihan sampel atau informan yang dipilih secara khusus atau ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitiannya.⁶⁶ Kriteria yang peneliti maksud adalah⁶⁷ 1) informan telah cukup lama intensif dan menyatu dengan suatu kegiatan / medan aktifitas yang menjadi sasaran / perhatian peneliti 2) informan masih terlibat dalam kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. 3) informan mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.

Kriteria dalam pemilihan informan adalah Walikota sendiri, dan aparatur dari Instansi Pemerintahan Kota Padang Panjang, yang berhubungan langsung dengan kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, serta mengetahui bagaimana Karakteristik kepemimpinan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Di dalam penelitian ini peneliti membagi Informan menjadi Informan Kunci dan Informan Biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara keseluruhan terhadap permasalahan yang ingin diteliti, sementara informan biasa adalah informan yang bisa memberikan informasi tambahan mengenai permasalahan penelitian.⁶⁸

⁶⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta. 2003, hlm. 46.

⁶⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi*, YA3, Malang. 1990, hal 58.

⁶⁸ Burhan Bungin, *Op.cit.*, hlm. 101.

Berdasarkan kriteria penetapan informan diatas dan untuk mewakili beberapa bagian dari struktur Pemerintah Kota Padang Panjang, yang nantinya ingin peneliti wawancara untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. maka informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Data informan yang diwawancara

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMK	Walikota Padang Panjang	Informan Kunci
2	Ir. H. Edwin, SP	Wakil Walikota Padang Panjang	Informan Biasa
3	Budi Hariyanto, ST	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang	Informan Biasa
4	Saharrudin, SH	Staf ahli bagian hukum dan politik Kota Padang Panjang	Informan Biasa
5	Drs. Kenedi	Kepala dinas Pendidikan Kota Padang Panjang	Informan Biasa
6	dr. Mawardi, MKM	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	Informan Biasa
7	Drs. Reflis, M.TP	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, PERINDAG Kota Padang Panjang	Informan Biasa
8	Iriansyah Tanjung, SE, M.Si	Kepala Kantor Pasar	Informan Biasa
9	Rusdianto, SIP, MM	Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang	Informan Biasa
10	Novi Hendri, SE, M.Si	Ketua DPRD Kota Padang Panjang	Triangulasi Data
11	Doni Rahman, DT. Simarajo	Ketua KAN Nagari Gunung	Triangulasi Data
12	Fadly	Wartawan Padang Ekspres	Triangulasi Data
13	Riyan	Wartawan ANTARA News	Triangulasi Data
14	Rita	Wartawan Merapi News	Triangulasi Data

Alasan Pemilihan informan diatas adalah sebagai berikut, Informan kunci adalah tokoh yang menjadi objek penelitian yaitu Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang. Informan Biasa adalah orang-orang yang berinteraksi secara langsung, dengan kepemimpinan Walikota Padang Panjang, dan mengetahui Karakteristik kepemimpinan yang ada dalam diri beliau dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Alasan memilih Wakil Walikota Padang Panjang, Bapak Edwin sebagai informan, karena Bapak Edwin merupakan orang yang paling sering berinteraksi dalam mewujudkan Visi dan Misi di Kota Padang Panjang, Alasan memilih Sekda, Bapak Budi Hariyanto dan Staf ahli bagian hukum dan politik, Bapak Saharuddin sebagai informan, adalah untuk mengetahui bagaimana Karakteristik Walikota Padang Panjang, melakukan konsultasi dengan Sekda dan Staf ahli bagian hukum dan politik tersebut, tentang proses pembuatan kebijakan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kenedi, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Mawardi dan Kepala dinas koperasi UMKM, PERINDAG, Bapak Reflis terkait dengan visi dan misi Suir Syam, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, tiga kepala SKPD ini yang sering berinteraksi dengan beliau dalam menyelenggarakan pemerintahan, kemudian alasan memilih Kepala Kantor Pasar, Bapak Iriansyah Tanjung sebagai informan, karena terkait dengan koordinasi Walikota dengan Kepala Kantor Pasar, dalam penyelesaian masalah pembangunan pasar modern Padang Panjang.

bagi masyarakat luas.

Masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda ini perlu mendapat informasi yang akurat dan tepat mengenai perkembangan dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang. Untuk itu, perlu diadakan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik dan lancar.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik dan lancar. Selain itu, perlu juga diadakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif bagi terciptanya pembangunan yang maju dan pesat.

Alasan memilih Kepala Bappeda, Bapak Rusdianto sebagai informan, terkait dengan proses instruksi dalam rencana pembangunan Kota Padang Panjang, dan proses lahirnya beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan di kota Padang Panjang yang terkait dengan fungsi dan tugas dari badan dan dinas-dinas tersebut. Selanjutnya, Alasan memilih Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Bapak Novi Hendri sebagai Triangulasi Sumber, adalah untuk mengetahui bagaimana proses *check and balances*, serta kerjasama yang terjadi antara Walikota dengan DPRD di dalam urusan pemerintahan, dan ikut terlibat dalam Muspida Kota Padang Panjang. Dari proses tersebut bagaimana pandangan DPRD Kota Padang Panjang terhadap Karakteristik Kepemimpinan Walikota Padang Panjang. Kemudian Ketua KAN nagari Gunung, Bapak Doni Rahman, karena beliau merupakan tokoh adat di daerah asal Walikota Padang Panjang, jadi beliau mengetahui karakteristik Walikota Padang Panjang dalam kehidupan Sehari-hari dan di pemerintahan.

Peneliti juga mewawancarai seorang Wartawan harian pagi Padang Ekspres, yaitu saudara Fadly, yang merupakan kontributor untuk wilayah Padang Panjang, dan untuk melihat pandangannya dan memperoleh informasi tentang Karakteristik kepemimpinan Walikota Padang Panjang, Suir Syam dari pemberitaan yang pernah ia liput. Wartawan ANTARA News dan Merapi News yang merupakan media yang bekerja sama dengan Bagian Humas Pemerintah Kota Padang Panjang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengannya.⁶⁹ Sedangkan menurut Taylor⁷⁰ wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dan informan yang dilakukan berulang-ulang kali. Wawancara ini diupayakan untuk memperoleh data sebanyak mungkin dari Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga data-data yang nanti muncul adalah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan informan sesuai dengan topik penelitian.

Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada informan, sehingga diperoleh gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti. Yang dimaksud dengan pertanyaan yang relevan dengan penelitian disini adalah pertanyaan tentang bagaimana karakteristik kepemimpinan yang diterapkan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang Panjang.

⁶⁹ Nasution, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Transito, Bandung, 1992, hal.59.

⁷⁰ Afrizal, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian Sampai Pemulisan Laporan*, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang, 2005. hal 69.

2. Dokumentasi

Dokumentasi di dapat melalui data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs yang sama, kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain di media massa.⁷¹ Hasil wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya, kalau didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk menguatkan data-data yang ditemukan dilapangan, yaitu melalui rekaman dari proses wawancara mendalam (*indepth interview*).

Dalam hal ini peneliti juga memerlukan data-data sekunder dimana data-data sekunder tersebut dapat diperoleh melalui perpustakaan Labor Ilmu Politik Unand, perpustakaan Universitas Andalas, serta dokumen dan arsip-arsip penting yang relevan dengan penelitian ini yang peneliti dapatkan selama dilapangan, baik yang berupa struktur organisasi dan daftar nama pejabat pemerintah Kota Padang Panjang. Serta artikel dan jurnal yang peneliti peroleh dari berbagai sumber, untuk menyelesaikan penelitian ini.

3. Uji Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Dalam penelitian ini untuk melakukan uji keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data, yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau

⁷¹Robert K. Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2003. hlm. 104.

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat, kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan⁷²:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau golongan atas dan elit-elit pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi sumber data yang peneliti lakukan disini adalah dengan melakukan perbandingan diantara informan penelitian, serta dengan beberapa sumber data sekunder seperti peraturan daerah dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Triangulasi data juga dilakukan dengan DPRD kota Padang Panjang, Wartawan, serta Tokoh adat yang ada di kota Padang Panjang untuk mengetahui proses check and balances yang terjadi selama pemerintahan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang.

⁷²*Ibid.*, hal. 178

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana, di mana proses penyederhanaan data tersebut terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan, dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.⁷³

Data yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa gambaran-gambaran tentang kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Kota Padang Panjang dan Data tentang kepemimpinan yang ia terapkan atau gunakan. Data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi serta buku-buku atau artikel yang relevan dengan kajian ini, ditelaah dan kemudian dilakukan penganalisaan secara *emik* dan *etik*. Analisis Emik adalah penganalisaan data dengan menggunakan persepsi atau pandangan dari informan yang ditemui dilapangan. Sedangkan Analisis Etik adalah penganalisaan data dengan menggunakan persepsi atau pendapat peneliti atau dengan kata lain menggunakan bahasa peneliti sendiri⁷⁴, dan kemudian data dideskripsikan serta dielaborasikan sesuai dengan kajian ilmu politik.

Secara umum tahapan analisis data yang peneliti lakukan yaitu :

1. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsisten.

⁷³ *Ibid.*, hal 103

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 82-83.

2. Di lanjutkan dengan langkah-langkah abstraksi teoritis terhadap informasi di lapangan dengan mempertimbangan hasil pertanyaan yang sangat memungkinkan.
3. Semua data yang terkumpul di analisis dengan menginterpretasikannya melalui perspektif etik (pandangan dan pengetahuan yang disampaikan subjek berupa pendapat atau informasi).
4. Pada penulisan laporan hasil wawancara di lapangan sebagaimana yang dituturkan oleh informan kemudian dibahas diinterpretasikan atau dianalisis oleh peneliti sesuai dengan pandangan dan pengetahuan peneliti (analisis emik).

Peneliti memilih untuk menggunakan analisis data emik dan etik ini karena peneliti berusaha mengurangi kesubjektifitasan peneliti, karena data yang diperoleh dari orang diluar peneliti akan lebih akurat dari pada data yang diperoleh dari persepsi peneliti sendiri, sehingga kevaliditasan data lebih terjaga.

5. Sistematika Penulisan

Adapun rancangan struktur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB Pendahuluan terdapat latar belakang kenapa peneliti melakukan penelitian mengenai Keberhasilan Kepemimpinan dan pentingnya sebuah karakteristik kepemimpinan dalam pemerintahan, menjelaskan tentang pemerintahan Syuir Syam sebagai Walikota Kota Padang Panjang selama ini. Selanjutnya juga

menjelaskan rumusan masalah penelitian dan menjelaskan tujuan penelitian serta memaparkan signifikansi penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Tinjauan pustaka menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan teori dan Konsep yang berhubungan dengan Kepemimpinan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori sifat Keith Davis kelebihan sifat-sifat yang berkaitan dengan keberhasilan kepemimpinan organisasi yakni kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis Individu (Syuir Syam), lokasi penelitian di Pemerintah Kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Uji triangulasi data dilakukan pada sumber informan

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian yaitu di kantor Pemerintahan kota Padang Panjang yang meliputi beberapa bagian yaitu : Walikota, Sekda, Staf Ahli, Lembaga lain, Inspektorat, Bappeda, Dinas Daerah, pada bagian ini terdapat orang yang langsung berhubungan dengan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA

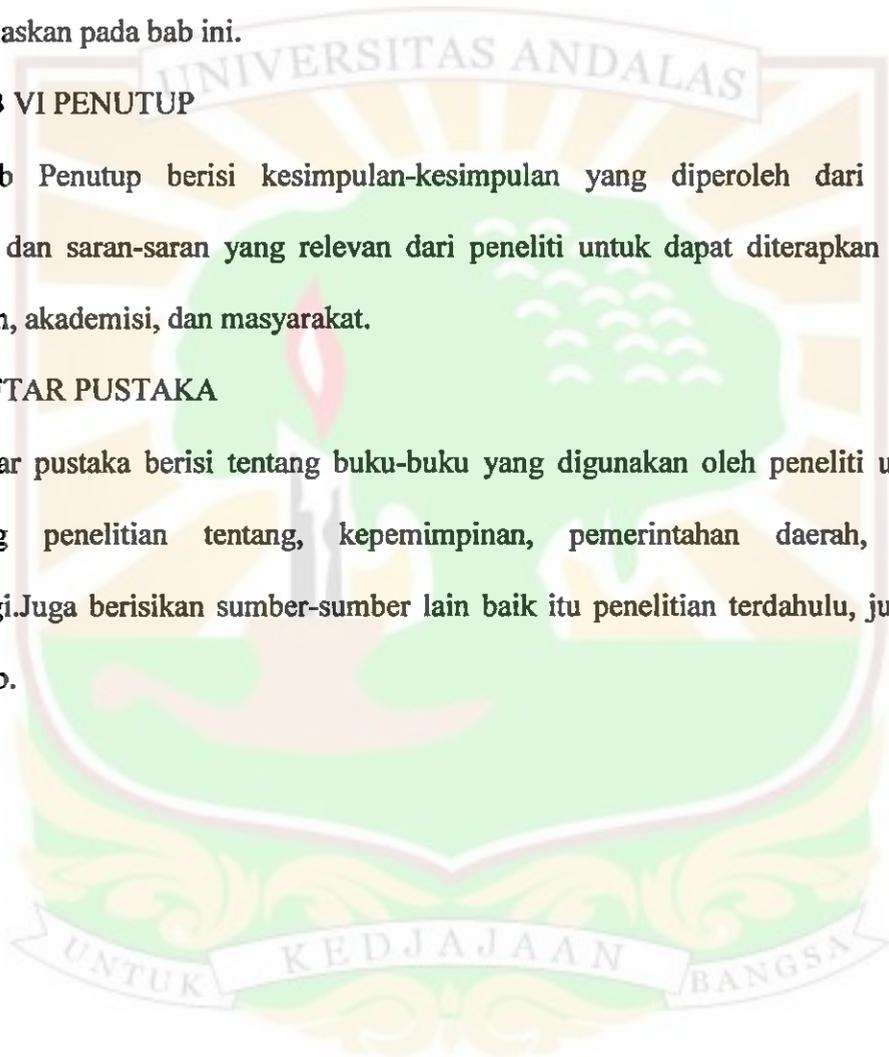
Dalam Bab ini peneliti mengumpulkan data-data hasil temuan di lapangan dan setelah itu dianalisis sesuai dengan teori dan metode yang digunakan, yang kemudian peneliti jelaskan pada bab ini.

BAB VI PENUTUP

Bab Penutup berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan dari peneliti untuk dapat diterapkan oleh pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang buku-buku yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang penelitian tentang, kepemimpinan, pemerintahan daerah, dan metodologi. Juga berisikan sumber-sumber lain baik itu penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dsb.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Daerah Kota Padang Panjang.

Penelitian mengenai karakteristik kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan di Kota Padang Panjang. Padang Panjang merupakan daerah tingkat II terkecil dalam wilayah provinsi Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05 persen dari luas Sumatera Barat. Secara geografis Padang Panjang terletak antara 100°20' dan 100°30' Bujur Timur serta 0°27' dan 0°32' Lintang Selatan dan diapit oleh Kecamatan X koto dan Batipuh yang merupakan dua wilayah dari Kabupaten Tanah Datar⁷⁵. Kota Padang Panjang berbatasan dengan kabupaten Tanah Datar, adapun batas-batas daerahnya antara lain⁷⁶ :

Sebelah Barat	: Kecamatan X Koto
Sebelah Timur	: Kecamatan Batipuh
Sebelah Utara	: Kecamatan X Koto
Sebelah Selatan	: Kecamatan X Koto

Lembaga-lembaga pemerintahan daerah yang ada di kota Padang Panjang tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di kota-kota lainnya di

⁷⁵BPS, *Padang Panjang dalam angka*. 2005 hlm 3.

⁷⁶*Ibid.*, Hlm 4

Sumatera Barat, antara lain dinas pendidikan, peternakan, kesehatan, dan dinas-dinas lainnya. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian ini antara lain Kantor Balaikota Padang Panjang, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Dinas Koperasi UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang, BAPPEDA Kota Padang Panjang, Kantor Pasar Kota Padang Panjang, DPRD Kota Padang Panjang.

B. Profil Kondisi Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, hukum dan keamanan di Kota Padang Panjang.

1. PEMERINTAHAN

Padang Panjang yang terkenal dengan nama kota Serambi Mekkah, memiliki sejarah yang berawal dari dibentuknya setelah proklamasi kemerdekaan RI yang wilayahnya meliputi Padang Panjang, Batipuh dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang. Berdasarkan ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950, tentang Pembagian Provinsi juga sekaligus merupakan pembagian Kabupaten dan Kota, Batipuh dan X Koto masuk kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto. Kemudian berdasarkan UU No. 8 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, maka lahirlah secara resmi Kota Kecil yang bernama Padang Panjang.

Berdasarkan keputusan DPRD tentang Peralihan Kota Praja tanggal 25 September 1957 No. 12/K/DPRD-PP/57, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi ke dalam 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah Kota Praja, diganti menjadi Kota Madya dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, maka Resort diganti menjadi Kecamatan dan Jorong diganti menjadi Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1982, Kota Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur.

A. Perangkat Daerah

I. Sekretariat Daerah kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan UU No.8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No.1 tahun 1957 maka kota kecil Padang Panjang memiliki status yang sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia⁷⁷.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun

⁷⁷ Ibid., hlm 21

2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

II. Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- f. Dinas Pekerjaan Umum
- g. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- h. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- j. Dinas Pertanian

III. Lembaga Tekhnis Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang terdiri dari :

- a. BAPPEDA
- b. BKD
- c. Inspektorat
- d. Kantor Lingkungan Hidup
- e. Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
- f. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
- h. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- i. RSUD
- j. Kantor Pengelolaan Pasar

IV. Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1982, Kota Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Dua kecamatan ini masing-masing memiliki delapan kelurahan.

Tabel 4.1
Jumlah rukun tetangga (RT) di lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	RT		
			2009	2010	2011
1	Padang Panjang Barat	Silaing Bawah	20	20	20
		Silaing Atas	8	10	10
		Pasar Usang	16	16	16
		Kampung Manggis	29	19	6
		Tanah Hitam	25	15	15
		Pasar Baru	6	6	24
		Bukit Surungan	9	9	19
		Balai-Balai	18	24	9
Jumlah			111	119	119
2	Padang Panjang Timur	Koto Panjang	15	17	11
		Koto Katik	4	4	10
		Ngalau	9	9	11
		Ekor lubuk	11	11	4
		Sigando	7	9	17
		Ganting	10	11	13
		Guguk Malintang	15	15	8
		Tanah Pak Lambik	6	8	22
Jumlah			77	84	96
Total Kota Padang Panjang			188	203	215

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2011.

B. Aparat Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu didukung oleh ketersediaan, aparatur pemerintah daerah yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Gambaran umum mengenai komposisi PNS di lingkungan pemerintah kota Padang Panjang tahun 2010, dimana terdapat 2.711 pegawai di lingkungan pemerintah dan 607 pegawai pada instansi vertikal. Jika dilihat dari golongannya, jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah pada tahun 2010, Golongan I sebanyak 62 orang, Golongan

II sebanyak 792 orang, Golongan III sebanyak 1.270 orang, dan 587 orang Golongan IV.

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun 2010 Menurut Golongan

No	Golongan	2009	2010
1	Golongan I	73	62
2	Golongan II	775	792
3	Golongan III	1684	1270
4	Golongan IV	682	587
Total		884	2711

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010

Tabel 4.3
Komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang Menurut Tk.Pendk.

No	Tingkat Pendidikan	2008	2009	2010
1	SD	45	34	26
2	SLTP	103	165	59
3	SLTA	1024	849	654
4	Diploma	616	786	679
5	Sarjana	1414	1372	1183
6	Pasca Sarjana	223	229	112
7	S 3	0	3	1
Total		3425	3438	2714

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang tahun 2010

Pada tahun 2010 tercatat pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Padang Panjang menurut tingkat pendidikan sebanyak 2714 orang yang terdiri dari 26 orang pada tingkatan SD, dan 654 orang pada tingkatan SLTA, Sedangkan menurut tingkat pendidikan yang terbanyak ada ditingkat Sarjana 1183 orang, dan hanya 1 orang yang ada pada tingkatan S3.

C. Partai Politik, Anggota DPRD.

Komposisi keanggotaan DPRD Kota Padang Panjang hasil Pemilu 2009 di dominasi oleh partai-partai besar. Dari 20 kursi parlemen di DPRD Kota Padang Panjang, Partai Golkar dan PAN masing memperoleh 4 kursi. Sementara itu PBB, PKS, dan Partai Gerindra sama memperoleh 2 kursi. Sedangkan Partai Demokrat menguasai 3 kursi. PPP, PDI/PDIP dan Partai Keadilan Bangsa sama-sama hanya memperoleh 1 kursi saja. perubahan tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4.
Banyaknya Anggota DPRD
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
Tahun 2011

No	Partai Politik	Anggota			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Golkar	3	1	4	20
2	PAN	3	1	4	20
3	Partai Demokrat	3	0	3	15
4	PKS	2	0	2	10
5	PKB	1	0	1	5
6	PDIP	1	0	1	5
7	PBB	2	0	2	10
8	PPD	0	1	1	5
9	Partai Gerindra	1	1	2	10
Jumlah		16	4	20	100

Sumber :Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang Panjang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang dibebankan, kepada setiap anggota maupun kepada lembaga DPRD Kota Padang Panjang, telah dilakukan serangkaian kegiatan kedinasan yang meliputi sidang-sidang dan rapat-rapat pembahasan, baik perubahan produk-produk hukum daerah, maupun pembahasan dan penyelesaian permasalahan aktual yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat, termasuk yang menyangkut kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Secara lebih lengkap dapat di lihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Kegiatan Sidang/Rapat DPRD Kota Padang Panjang
Tahun 2010

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2010
1.	Sidang Paripurna :	
	a. Istimewa	3
	b. Terbuka	26
	c. Tertutup	-
2.	Rapat Fraksi	6
3.	Rapat Komisi	6
4.	Rapat Panitia Khusus	2
5.	Raker/Konsultasi dengan Eksekutif:	
	a. Panitia Anggaran	15
	b. Rapat Lerka Gabungan	3
	c. Rapat Kerja Panitia Khusus	3
6.	Rapat Pimpinan	5
7.	<i>Hearing</i>	45
8.	Rapat Gabungan Komisi	3
9.	Rapat Panitia Musyawarah	12
Jumlah		129

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang

Dari sidang-sidang yang telah dilaksanakan DPRD Kota Padang Panjang tahun 2010, telah dihasilkan produk hukum daerah secara lebih lengkap dapat di lihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Banyaknya Keputusan DPRD Kota Padang Panjang
Menurut Jenis Keputusan 2006-2010

No	Jenis Keputusan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Peraturan Dearth	8	32	21	6	23
2	Keputusan DPRD	12	4	14	5	11
3	Keputusan Pimpinan DPRD	12	4	6	0	9
4	Keputusan Daerah/bersama DPRD	4	4	11	2	9
5	Rapat <i>hearing</i> /kunjungan lapangan	325	375	309	151	191
6	Lainnya	8	9	7	5	0

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang

2. PENDIDIKAN

Peranan pendidikan dalam pembangunan tidak dapat diabaikan, karena dengan pendidikan akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai generasi penerus bangsa. Jadi, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam majunya pendidikan. Pada tahun 2010 kemampuan membaca dan menulis huruf latin penduduk Kota Padang Panjang usia 10 tahun ke atas sangat tinggi sekali yakni 98,86 persen. Sebaliknya hanya ada 1,14 persen penduduk Kota Padang Panjang usia 10 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin, dengan komposisi 1,38 persen perempuan dan 0,90 persen laki-laki, dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Kemampuan Baca Tulis Huruf Latin
Penduduk 10 Tahun Ke atas Tahun 2010 (%)

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dapat membaca dan menulis	99,10 %	98,62 %	98,86 %
2	Tidak dapat membaca dan menulis	0,90 %	1,38 %	1,14 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang

Untuk jumlah lulusan, hanya jenjang SMK yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009 dari 660 siswa menjadi 702 siswa. Jenjang SD mengalami penurunan dari 938 menjadi 903 siswa, SMP turun dari 938 siswa menjadi 740 siswa, dan SMA turun dari 598 menjadi 564 siswa. Jumlah Murid Baru dan Lulusan pada SD, SMP, SMA dan SMK dapat di lihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Jumlah Murid Baru dan Lulusan pada SD, SMP, SMA dan SMK

No	Tingkat Pendidikan	Uraian	
		Murid Baru	Lulusan
1	SD	1072	903
2	SMP	1148	740
3	SMA	748	56
4	SMK	873	703
Total		3841	2402

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang

3. KESEHATAN

Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kota Padang Panjang memiliki berbagai sarana kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas. Jumlah rumah sakit di Kota Padang Panjang pada tahun

2010 tercatat 2 unit, puskesmas 4 unit, puskesmas pembantu 7 unit, serta puskesmas kelurahan sebanyak 16 unit. Salah satu yang membanggakan Kota Padang Panjang saat ini sudah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang bertaraf internasional yang terletak di Kecamatan Padang Panjang Timur. Semuanya dapat di lihat dalam tabel 4.9 statistik Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2010.

Tabel 4.9
Statistik Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2010.

No	Sarana Kesehatan	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Rumah Sakit Umum	1	1
2	Rumah Sakit Swasta	1	1
3	Rumah Bersalin	-	-
4	Poliklinik	3	4
5	Puskesmas	3	4
6	Puskesmas Pembantu	7	7
7	Tempat Praktek Bidan	15	15
8	Tempat praktek dokter	34	34
9	Pos Kesehatan kelurahan	16	16
10	Apotik	7	7
11	Toko Obat	6	6
Total		93	95

Sumber : Padang Panjang dalam angka 2010.

Di sisi lain jumlah tenaga kesehatan juga mengalami peningkatan dari 561 orang menjadi 564 orang. Bisa di lihat pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kota Padang Panjang
Pada tahun 2010

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Rumah Sakit Umum Daerah	272	272
2	Rumah Sakit Ibnu Sina	83	86
3	Puskesmas	206	206
Total		561	564

Sumber : Padang Panjang dalam angka 2011

4. HUKUM DAN KEAMANAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari institusi hukum yang ada di Kota Padang Panjang, seperti Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Kejaksaan Negeri Padang Panjang diperoleh data kasus-kasus perdata yang terjadi selama tahun 2009 di Kota Padang Panjang. Jumlah Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Padang Panjang selama tahun 2009 mengalami peningkatan dari 136 kasus tahun 2008 menjadi 137 kasus di tahun 2009. Data yang lebih terperinci disajikan pada tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.11
Banyaknya Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Padang Panjang
Dari tahun 2008-2010

No	Perkara Hukum	2008	2009	2010
1	Sisa Bulan Lalu	136	137	11
2	Masuk Bulan ini	100	92	80
3	Putus Bulan ini	80	97	95
4	Sisa Bulan ini	141	132	11

Sumber : Pengadilan Negeri Padang Panjang

Dari 136 perkara pidana pada tahun 2008, dan pada tahun 2010 menyisakan 11 perkara, ini berarti ada peningkatan penyelesaian kasus, ada 100 perkara pidana yang masuk pada tahun 2008, hanya 80 kasus yang dapat diselesaikan dan sisa

sebanyak 20 kasus. Sementara pada tahun 2010 dari 95 kasus yang diputuskan dan sisa sebanyak 11 kasus.

Kasus perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang diproses pada kejaksaan negeri menurut jenis perkara bisa dilihat pada Tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Jumlah Perkara Pidana pada
Kejaksaan Negeri Padang Panjang

No	Jenis Perkara	2008	2009	2010
1	Tilang	2836	2267	3037
2	Lalu Lintas	23	8	6
3	Pencurian	20	21	22
4	Perkosaan	-	0	2
5	Pembunuhan	6	11	5
6	Lain-lain	51	53	59
Total		2636	2360	3131

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang Panjang

Terlihat pada data yang disajikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, pada tahun 2008 jumlah perkara tilang sejumlah 2836 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sejumlah 3037, dan perkara lalu lintas pada tahun 2008 sejumlah 23 dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sejumlah 6 perkara, selanjutnya pada perkara perkosaan yang pada tahun 2008 dan 2009 tidak ada kasus perkosaan, namun pada tahun 2010 terjadi sejumlah 2 kasus perkosaan.

C. Profil Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang.

Dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMK lahir pada tanggal 03 Desember 1949 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Suir Syam adalah seorang Walikota Padang Panjang. Riwayat pendidikan yang pernah dijalani oleh Suir Syam, pada jenjang sekolah dasar Suir Syam menamatkan di SD 07 Padang Panjang pada tahun 1963, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 2 Padang Panjang tamat pada tahun 1966, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bukittinggi pada tahun 1969. Setelah itu beliau melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, beliau menyelesaikan jenjang pendidikan S1 tahun 1979, kemudian melanjutkan ke Magister Management Rumah Sakit di Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan program S2 pada tahun 2001.

Riwayat pekerjaan atau jabatan yang pernah di lalui beliau, berawal dari Kepala Puskesmas Sitiung I Kab Sawahlunto pada tahun 1987, dan juga pernah menduduki jabatan sebagai kepala Puskesmas Sungai Dareh Kab Sawahlunto pada tahun 1990 serta Kepala Puskesmas Koto Baru Kab Sawahlunto pada tahun 1991. Selain pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Puskesmas, Suir Syam juga berkesempatan menempati jabatan sebagai Direktur RSUD Sungai Dareh Kab Sawahlunto pada tahun 1991 hingga 1996, dan Direktur RSUD Adnan W.D Payakumbuh pada tahun 1996 hingga 2000, terakhir beliau menduduki jabatan sebagai Direktur RS Ahmad Muchtar Bukittinggi pada tahun 2000 sampai tahun 2003.

Selanjutnya, Suir Syam dipilih menjadi Walikota Padang Panjang pada tahun 2003 melalui sistem perwakilan di DPRD Kota Padang Panjang. Kemudian pada tahun 2008 terpilih kembali untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai walikota Padang Panjang dalam pemilihan langsung yang dilaksanakan pada tanggal 7 juli 2008 di Kota Padang Panjang, dan memperoleh 2013 dengan total perolehan suara 16.247 suara atau 81,5 persen dari total suara sah. Selama Kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, ia mempunyai sebuah visi terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang Maju, Makmur dan Islami, untuk mewujudkan visi tersebut di dalam penyelenggaraan pemerintahannya sebagai Walikota Padang Panjang, ia memilih beberapa misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan.
2. Mewujudkan Pusat Pelayanan kesehatan berstandar internasional.
3. Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat.
4. Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Di dalam masa kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang sejak tahun 2003 dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang Panjang, beliau telah melaksanakan beberapa upaya dan program untuk membangun serta meningkatkan kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang yang maju, makmur , dan islami.

Selain sebagai Walikota Padang Panjang, Suir Syam juga aktif di dalam kehidupan organisasi, baik organisasi politik, organisasi profesi, dan non-profesi.

Selain itu, beliau juga berperan aktif dalam beberapa acara atau kegiatan seperti seminar, konferensi, dan *workshop* baik di tingkat dalam dan Luar Negeri. Suir Syam juga merupakan seseorang yang cukup memiliki banyak prestasi, hal itu dapat dilihat dari penghargaan-penghargaan yang pernah ia peroleh, baik secara perseorangan maupun secara institusi di pemerintahan Kota Padang Panjang selama periode kepemimpinan beliau. Dan untuk melihat lebih lengkap prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Suir Syam, dapat dilihat pada lampiran 11.



BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Temuan umum mengenai Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, sebelum menduduki jabatan sebagai kepala daerah, memiliki pekerjaan sebagai Dokter. Selain itu Walikota Padang Panjang, Suir Syam pernah memimpin Rumah Sakit daerah di Sumatera Barat. Suir Syam yang merupakan putra daerah asli kota Padang Panjang, mendapat dukungan dari masyarakat untuk memimpin kota Padang Panjang. Perjalanan karier kepemimpinan Suir Syam diawali dengan pencalonannya sebagai pemimpin Kepala Daerah, pada periode 2003-2008. Pada waktu itu pemilihan masih melalui anggota DPRD Kota Padang Panjang periode 1999-2004. Pada saat itu pemilihan yang melalui sistem voting, Suir Syam menguasai voting tertinggi dengan berbagai dinamika yang ada. Disaat itu anggota dewan yang jumlahnya hanya sedikit, dan Suir Syam terpilih sebagai Walikota Padang Panjang bersama Adirozal periode 2003-2008.

Awal mula kepemimpinannya Suir Syam bersama Adirozal, mempunyai tiga misi yang ingin diwujudkan yaitu, Mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan, Mewujudkan Pusat Pelayanan kesehatan berstandar internasional, Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut, Suir Syam memiliki sejumlah program yang strategis dan

berbeda. Dalam hal ini Suir Syam mempunyai sebuah gebrakan dan inovasi terhadap program tersebut, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

Salah satu gebrakan di bidang Pendidikan adalah terwujudnya WAJAR 12 tahun dan sekolah gratis. Pada bidang kesehatan, adanya perda rokok yang manfaatnya sangat baik untuk kesehatan masyarakat kota Padang Panjang. Semenjak dikeluarkan perda rokok, Suir Syam banyak menerima undangan untuk jadi pembicara di tingkat Nasional maupun Internasional. Dalam bidang ekonomi kerakyatan, adanya pusat industri kulit terbesar di Sumatera.

Kemudian pada tahun 2008, Suir Syam terpilih kembali untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai Walikota Padang Panjang, dalam PILKADA yang dilaksanakan pada bulan juli 2008. PILKADA tahun 2008 pencalonan terdiri dari tiga pasang kandidat dan akhirnya terpilih Suir Syam dan Edwin sebagai Kepala Daerah. Pada saat pemilihan duet pasangan Suir Syam dan Edwin memiliki perolehan suara 81,5 %. Hal ini merupakan salah satu bukti, bentuk dukungan masyarakat, untuk Suir Syam kembali memimpin Kota Padang Panjang periode 2008-2013. Suir Syam menjadi Walikota Padang Panjang pertama, yang memimpin kota Padang Panjang selama dua kali periode. Selama kepemimpinannya, berhasil mendapatkan prestasi dan penghargaan serta keberhasilan dalam pencapaian misinya.

Untuk itu Peneliti juga mempunyai data mengenai keberhasilan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, dalam mengeluarkan ide dan kebijakan dapat di lihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Prestasi Keberhasilan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Prestasi yang diraih.	Bidang
1	Grant Widyakrama atas keberhasilan penuntasan wajib belajar 12 tahun bersama Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang	Pendidikan
2	Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM bersama Dinas Koperasi Kota Padang Panjang	Ekonomi
3	Peringkat pertama pelayanan kesehatan melalui penilaian Kementerian PAN dan GTZ Jerman bersama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	Kesehatan
4	Satya lencana bidang Koperasi bersama Dinas Koperasi Kota Padang Panjang.	Ekonomi
5	Perda Rokok bersama Dinas Kesehatan Kota Padang panjang, serta DPRD Kota Padang Panjang	Kesehatan
6	Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Arutala bersama Dinas kesehatan Kota Padang Panjang.	Kesehatan
7	Penghargaan Perlindungan Anak Nasional terhadap bahaya rokok .	Kesehatan
8	Penghargaan Askes Award.	Kesehatan
9	Memperoleh "NO Tobacco Award dari WHO.	Kesehatan
10	Penghargaan WHO TAPS (Tobacco Advertisement, Promotion and Sponsorship.)	Kesehatan
11	Penghargaan dari WHO Award For Significant Performance on Tobacco/Smoke Free Area Development bersama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.	Kesehatan
12	Penghargaan tertinggi Swasti Saba Wistara atas Kota sehat bersama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.	Kesehatan
13	Penghargaan pemerintah di bidang industri Piala Upakarti bersama Dinas Koperasi UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang.	Ekonomi
14	Sentral Industri Kulit terbesar di Sumatera bersama Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Dinas Koperasi UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang.	Ekonomi

Sumber : Data Olahan dari LKPJ Pemko Padang Panjang.

Untuk lebih jelasnya mengenai prestasi dan keberhasilan Walikota Padang Panjang Suir Syam dapat dilihat pada lampiran 4.

Pada periode kedua ini Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, bersama Edwin wakilnya menambahkan satu poin lagi kedalam misi pemerintahannya, yaitu mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam mewujudkan misi tersebut, Syuir Syam sebagai Walikota Padang Panjang menerapkan transparansi anggaran pada setiap SKPD yang ada, dengan adanya poster anggaran yang bisa di lihat secara langsung, oleh masyarakat di setiap Kantor Kepala Dinas di Kota Padang Panjang.

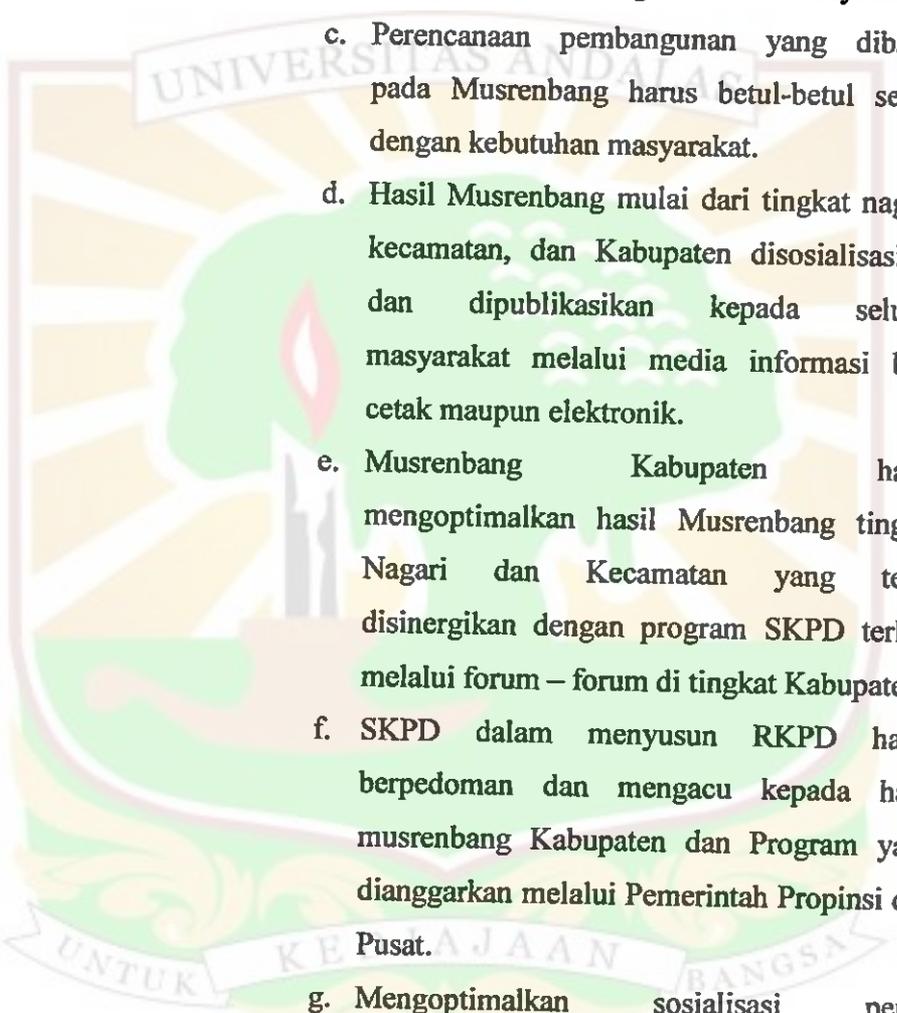
Kegiatan ini merupakan kerjasama LGSP dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. LGSP (*Local Governance Support Program*) USAID dalam prakarsa pemerintahan yang baik, dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, dan salah satu daerah yang ikut dalam kegiatan ini adalah kota Padang Panjang.⁷⁸ Penjelasan ini juga ditujukan untuk memperlihatkan ruang lingkup dampak dari bantuan teknis LGSP USAID pada perbaikan proses penyusunan rencana di semua daerah.

Berikut bentuk kegiatan yang diadakan LGSP bersama Pemerintah Kota Padang Panjang, yang dapat di lihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

⁷⁸ http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ388.pdf, USAID dan LGSP, Bahan bacaan dan pendampingan Prakarsa Pemerintahan yang baik dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (September 2005- Mei 2007).

Tabel 5.2
Bentuk Perencanaan kegiatan Kerjasama LGSP USAID Dan Pemerintah Kota Padang Panjang

No	Bentuk Perencanaan	Kegiatan
1	RPJPD (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah)	Pemerintah daerah mengundang Bappenas untuk berkontribusi dalam Workshop Orientasi Penyusunan RPJPD, terutama berkaitan isu dan kebijakan pembangunan nasional yang perlu diakomodasikan dalam penyusunan RPJPD.
2	RKPD (Rencana Kegiatan pemerintah Daerah)	<p>Pemerintah Daerah melaksanakan Pelatihan orientasi Musrenbang bagi staff pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil sebagai suatu kegiatan Pra Musrenbang. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, tentang landasan hukum Musrenbang, prosedur dan mekanisme serta kesepakatan Musrenbang agar peserta Musrenbang lebih siap.</p> <p>Berpartisipasi dan memberikan usulan yang efektif dalam Musrenbang. Sebagai langkah pengawalan yang selama ini dimana program-program dari Level Kecamatan dan Nagari dirasakan kurang terakomodasi, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang lebih nyata untuk meningkatkan kualitas Musrenbang:</p> <p>Langkah konkrit pelembagaan partisipasi dalam Musrenbang dan Konsultasi Publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Musrenbang harus dilaksanakan mulai dari tingkat nagari dengan melibatkan semua komponen dan tokoh masyarakat nagari dan perantau.

- 
- b. Keberadaan Tenaga Pemandu atau Fasilitator Tingkat Nagari dan Kecamatan dalam rangka menggali partisipasi masyarakat perlu dilanjutkan dan ditingkatkan keberdayaannya
 - c. Perencanaan pembangunan yang dibahas pada Musrenbang harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Hasil Musrenbang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan Kabupaten disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat melalui media informasi baik cetak maupun elektronik.
 - e. Musrenbang Kabupaten harus mengoptimalkan hasil Musrenbang tingkat Nagari dan Kecamatan yang telah disinergikan dengan program SKPD terkait melalui forum – forum di tingkat Kabupaten.
 - f. SKPD dalam menyusun RKPD harus berpedoman dan mengacu kepada hasil musrenbang Kabupaten dan Program yang dianggarkan melalui Pemerintah Propinsi dan Pusat.
 - g. Mengoptimalkan sosialisasi perda transparansi

Pemerintah Daerah menerbitkan POSTER APBD untuk diseminasikan ke publik secara luas dalam rangka transparansi anggaran APBD.

Berikut Dokumentasi Peneliti untuk Poster Anggaran Yang diperlihatkan di depan kantor Dinas Koperasi UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang.

Gambar 5.1



Poster Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan prestasi, penghargaan serta keberhasilan dan Pertama kali memimpin Kota Padang Panjang selama dua kali periode, bagaimanakah Karakteristik kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang? Karena karakteristik merupakan perpaduan segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi sebuah ciri khas khusus, jati diri atau identitas yang membedakan orang satu dengan yang lain.

Dari uraian di atas, maka diperoleh sebuah asumsi bahwa Karakteristik kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang berdampak pada sejumlah prestasi, penghargaan serta keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti memberikan pertanyaan yang bisa di lihat dari jawaban Walikota Padang Panjang, Suir Syam sebagai berikut :

Kita yang pertama, kalau ada program dari pemerintah pusat atau program kita, kita harus fokus, harus fokus menyelesaikannya, yang kedua, berkelanjutan, harus serius, jadi jalan itu memang lurus, jangan menyimpang, istilahnya bagi kita, kita ingin sempurna, jadi kita tidak asal-asalan, kalau tidak selesai, sudahlah, tidak begitu, jangan diprogramkan, bagus lah dibuat program yang bisa selesai, dan program yang dibuat itu yang bisa dilaksanakan, sebagai contoh, ada visi daerah lain, akan menjadi kota terkemuka di Indonesia” bagaimana kita menilainya, akan menjadi kota yang bermatabat, jadi indikatornya apa, nggak usah besar-besar, kan 5 tahun jadi visi yang bisa dicapai, kalau ndak berarti kita ngaur.⁷⁹

Pernyataan di atas terlihat bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang memang fokus dan serius terhadap program untuk mencapai misi dalam pemerintahannya. Hal ini merupakan karakter yang dimiliki oleh Suir Syam dan mempunyai dampak terhadap keberhasilan program tersebut, dengan adanya prestasi, penghargaan serta keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Beliau juga menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan ingin terlihat sempurna. Selain itu beliau juga memikirkan visi yang bisa dilaksanakan, dalam hal ini beliau tidak mau bersikap sombong, dengan membuat visi yang tidak ada penyelesaiannya. Beliau juga menegaskan sangat serius dengan program yang dijalankan.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, pukul 11.30 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BAPPEDA, Rusdianto, yang menjelaskan sebagai berikut :

Sebelumnya saya baru di BAPPEDA, kemudian betul itu, masalah karakter kepemimpinan, Pak Suir Syam ini Sudah dua kali periode, sudah tahu kan, 2008-2013 satu dan 2003-2008, beliau seorang Dokter, bukan seorang Politikus, tapi ternyata beliau itu dalam mengambil kebijakan luar biasa, memang kalau icon beliau itu satu kesehatan, dua pendidikan dan tiga ekonomi kerakyatan, nah ketiga ini beliau sangat fokus ini, fokusnya bukan hanya dalam segi kebijakan tetapi juga dalam implementasinya.⁸⁰

Dalam wawancara dengan Kepala BAPPEDA, Rusdianto, terlihat bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang sangat fokus, bukan hanya dalam hal pelaksanaan program tetapi juga dalam hal implementasinya. Dalam hal ini pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.

Selanjutnya untuk melihat karakteristik Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, yang membuat beliau berhasil dalam pencapaian program, peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri yang menyatakan sebagai berikut :

Jadi bapak Suir Syam ini orangnya “ obsesif “, artinya punya keinginan, sebagai putra daerah, beliau bertekad bagaimana jauh lebih baik dari pada tahun sebelumnya sehingga beliau memiliki pemikiran atau ide-ide berkaitan pada pertama itu Pendidikan, setelah itu kesehatan, kalau soal pendidikan beliau melihat kota Padang Panjang ini sebagai pendidikan, sudah jauh-jauh hari memiliki daya tarik khusus untuk masyarakat, artinya kita menyediakan magnetnya, Bagaimana kota Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan, magnet itulah beliau jadikan sebagai strategi itu beliau buat, sehingga alhamdulillah dua kali periode beliau ini pendidikan luar biasa sekali yang datang ke Padang Panjang, dengan WAJAR 12 tahun, yang kedua kesehatan, dan beliau berobsesi bagaimana Padang Panjang ini menjadi kota tujuan kesehatan, dan beliau mempunyai ambisi, dan beliau sangat mudah untuk

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Rusianto kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Kantor BAPPEDA Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012. Pukul 09.00 WIB.

bergaul, mendekati diri dengan masyarakat sangat gampang, kemudian beliau juga orangnya rendah hati.⁸¹

Dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri, terlihat bahwa karakter Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang adalah seorang yang obsesif, punya motivasi untuk lebih baik lagi dalam memimpin, dan beliau juga memberikan ide-ide yang berkaitan dengan visi dan misi. Menurut beliau, ide yang di keluarkan itu menjadi magnet disetiap misi Walikota Padang Panjang Suir Syam, dalam hal ini menjadikan kota Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan dengan program WAJAR 12 tahun, dan kota tujuan kesehatan dengan pengobatan gratis. Dalam wawancara ini juga beliau tegaskan, bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang mempunyai ambisi untuk berhasil, dan sangat mudah mendekati diri pada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, mengkoordinasikan tugasnya pada Sekretaris Daerah, untuk itu peneliti juga mewawancarai Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Budi Hariyanto sebagai berikut :

Karakteristik nya begini, karena dari profesi beliau yang dapat memahami kejiwaan karena seorang dokter pasti belajar hal tersebut, sehingga dalam rangka pembinaan staf kebawah artinya untuk pembinaan seluruh aparatur, beliau memang melakukan pendekatan.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Novi Hendri Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Kantor DPRD Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012, Pukul 12.00 WIB.

⁸² Wawancara dengan Bapak Budi Hariyanto Sekretaris Daerah kota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 16 Mei 2012, Pukul 09.15 WIB.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang yang juga berprofesi sebagai dokter, mampu memahami para bawahannya, dalam hal membina aparaturnya beliau melakukan pendekatan diri; Berarti beliau sangat dekat dengan bawahan dan juga mempunyai perhatian, beliau juga memantau bawahannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Fadly, salah satu jurnalis Padang Ekspres yang merupakan kontributor untuk Kota Padang Panjang, dia menjelaskan sebagai berikut :

Karakteristik kepemimpinan Suir Syam cukup dekat dengan bawahannya, ee inyo tidak terlalu keras urangnyo, lebih sering memberikan reward, ketimbang punishment, inyo lebih apa, untuak periode kedua inyo agak jarang bertemu muka jo bawahannya, masyarakat, nyo lebih banyak mendelegasikan kekuasaannya ka Pak Edwin, Pak Suir Syam ko trade recordnyo kan dulunyo Dokter, jadinya dekat dengan masyarakat kecil, dan itu tabawok an kasiko, untuak di Padang Panjang ko, dikemenangannya periode kaduo ko, bisa wak caliak 80 %, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap inyo gadang.⁸³

Dalam Bahasa Indonesia :

Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam cukup dekat dengan bawahannya, dia tidak terlalu keras orangnya, lebih sering memberikan *reward*, ketimbang *punishment*, dia lebih apa, untuk periode kedua dia agak jarang bertemu muka dengan bawahannya, masyarakat, dia lebih banyak mendelegasikan kekuasaannya pada Pak Edwin, Pak Suir Syam trade recordnya dulu Dokter, Jadinya dekat dengan masyarakat kecil, itu terbawa untuk di Padang Panjang, kemenangannya periode kedua, bisa dilihat 80 %, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dia besar.

Berdasarkan jawaban dari Wartawan Padang Ekspres, Fadly tersebut, di peroleh penjelasan mengenai karakteristik kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota

⁸³ Wawancara dengan Fadly Wartawan Padang Ekspres, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 7 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Padang Panjang, sangat dekat dengan bawahan, berarti beliau mengetahui kondisi bawahannya. Serta merasa perlu berorientasi kepada bawahannya, agar tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan senang hati, tanpa beban oleh bawahannya. Beliau tidak begitu keras dalam memimpin, berarti beliau mempunyai emosi yang stabil, dan tidak mudah marah, terbukti dengan beliau lebih sering memberikan *reward*, dibandingkan dengan *punishment*. fadly juga menegaskan bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang pada periode kedua lebih jarang bertemu dengan bawahan, dan lebih sering menyerahkan kekuasaan pada Edwin, Wakil Walikota Padang Panjang.

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai Wakil Walikota Padang Panjang, Edwin, dan pernyataannya sebagai berikut :

Bapak Suir Syam Karakteristik Kepemimpinannya bagus, dan kita juga sudah membagi tugas untuk masalah internal saya, masalah evaluasi, Pak Walikota eksternal, Pak Wali dulu juga PNS, dan lobi-lobi keluar lebih banyak Pak wali.⁸⁴

Menurut pernyataan Wakil Walikota Padang Panjang, di atas, beliau membenarkan bahwa adanya pembagian tugas, untuk masalah eksternal dan melakukan lobi dengan pihak luar Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang. Sedangkan beliau di delegasikan masalah internal, terkait dengan pelaksanaan tugas dengan bawahan, dan masalah evaluasi program pemerintahan.

Lain halnya yang disampaikan oleh Wartawan ANTARA News, Riyan, yang pernyataannya sebagai berikut :

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Edwin Wakil Walikota Padang Panjang, Rumah Dinas Wakil Walikota Padang Panjang, Pada tanggal 3 Juni 2012, Pukul 12.30 WIB.

Bapak Suir Syam ini pada periode pertama sangat mudah ditemui, bisa dikatakan sering datang ke kantor, dan masyarakat pun mudah untuk menemui Bapak Suir Syam, orangnya merakyat, anehnya pada periode kedua, intensitasnya sangat jarang dikantor, walaupun ada, pada acara peresmian, pembukaan, yang di hadiri tokoh penting, dan karena dia sangat jarang dikantor, susah untuk bertemu Bapak Suir Syam.⁸⁵

Wartawan ANTARA News, Riyan menyatakan bahwa, pada periode pertama Walikota Padang Panjang Suir Syam mudah untuk ditemui, lain ketika periode kedua, beliau sangat sulit untuk ditemui, bahkan kehadirannya dikantor sedikit berkurang.

Dalam pernyataan Riyan tersebut, dapat dilihat bahwa Walikota Padang Panjang terkesan tidak peduli, pada periode kedua, dan terkesan menyerahkan kekuasaan pada Wakil Walikota Padang Panjang, dan lebih banyak dengan urusan diluar Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Dari hasil temuan umum mengenai karakteristik kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang. Secara umum peneliti menemukan bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang Berdasarkan prestasi, penghargaan serta keberhasilan dan Pertama kali memimpin Kota Padang Panjang selama dua kali periode, beliau memang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin seperti : fisik, mental, dan kepribadian, dengan asumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kualitas sifat atau karakteristik tertentu yang dimiliki atau melekat dalam diri beliau, yaitu motivasi diri dan dorongan berprestasi, dimana beliau fokus pada program yang diwujudkan untuk mencapai visi dan misi, ingin hasil sempurna.

⁸⁵ Wawancara dengan Riyan Wartawan ANTARA News, Kantor Balaikota Padang Panjang, pada tanggal 18 Juli 2012, Pukul 11.30 WIB.

Dalam hal kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial beliau sangat mudah untuk bergaul, mendekati diri dengan masyarakat sangat mudah, namun walaupun beliau memiliki karakter yang ramah, tak terlupakan bahwa dalam diri Walikota Padang Panjang juga ada ketidakpedulian terhadap tugas dalam Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Kemudian beliau juga orangnya rendah hati. Dalam menghadapi persoalan atau masalah, beliau diskusikan mengenai tindakan yang mau diambil. Mengenai kecerdasan yang dimiliki beliau, dalam hal mengambil sebuah keputusan didasarkan pada data-data juga dan jika terjadi masalah sangat cepat meredam konflik yang ada. Serta sikap hubungan kemanusiaan beliau dapat memahami kejiwaan dan kemampuan bawahannya dikarenakan beliau seorang dokter.

Dari keseluruhan karakteristik umum Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang tersebut, sesuai yang disampaikan oleh Keith Davis bahwa ada empat macam kelebihan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin, yakni kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan dan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang memiliki keempat kelebihan sifat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang Panjang.

B. Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karakteristik memiliki makna mempunyai sifat khas sesuai dengan watak tertentu, Beberapa karakteristik pribadi yang dianggap determinan yaitu, kecerdasan,

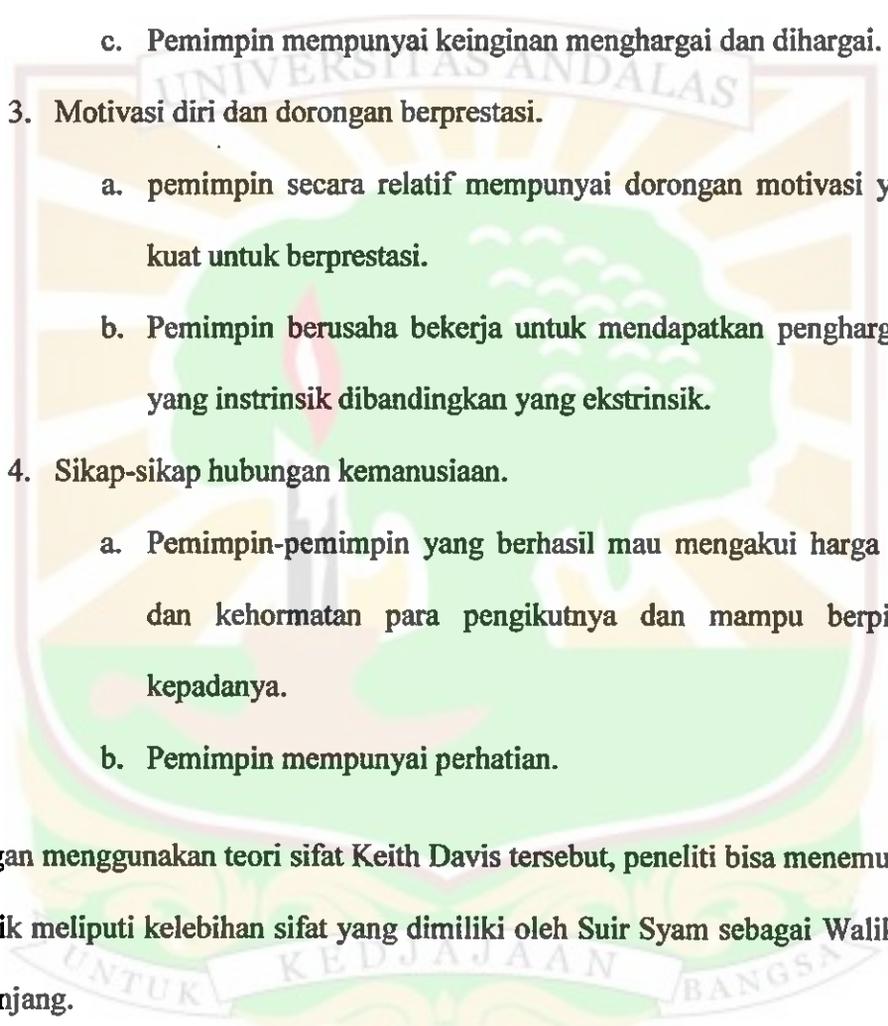
kemantapan pribadi, kepercayaan diri, kemandirian, penuh pertimbangan, sifat dominan.⁸⁶ Untuk melihat karakteristik kepemimpinan peneliti menggunakan teori sifat dari Keith Davis, karena berusaha mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan.

Dalam hal ini peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana karakteristik Suir Syam yang menjadi Walikota pertama, memimpin kota Padang Panjang selama dua kali periode. Penelitian ini juga ingin melihat dan memperoleh hasil yang berhubungan, dengan karakteristik yang paling berdampak terhadap keberhasilan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya untuk memperoleh salah satu karakteristik kepemimpinan, yang menjadi ciri khas, dari kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, maka peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik kepemimpinan tersebut dari indikator yang peneliti simpulkan dan peroleh dari teori sifat yang dikemukakan oleh Keith Davis, yaitu :

1. Kecerdasan.
 - a. pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin.
 - b. pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya.
2. Kedewasaan dan keluasaan hubungan sosial.

⁸⁶ Simon Devung, *Pengantar ilmu administrasi dan manajemen*, Jakarta , 1998, hlm 23.

- 
- a. Pemimpin cenderung menjadi matang.
 - b. Pemimpin mempunyai emosi yang stabil, karena mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas sosial.
 - c. Pemimpin mempunyai keinginan menghargai dan dihargai.
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi.
- a. pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.
 - b. Pemimpin berusaha bekerja untuk mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan yang ekstrinsik.
4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan.
- a. Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya.
 - b. Pemimpin mempunyai perhatian.

Dengan menggunakan teori sifat Keith Davis tersebut, peneliti bisa menemukan karakteristik meliputi kelebihan sifat yang dimiliki oleh Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang.

1. **Kecerdasan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan.**
 - a. **Pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin.**

Dalam memimpin sebuah pemerintahan diperlukan sebuah kecerdasan dari pemimpin tersebut, dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh Suir Syam sebagai walikota Padang Panjang. Untuk mengetahui hal tersebut dapat di lihat dari pernyataan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

Saya ingin padang panjang ini menjadi tujuan masyarakat untuk datang kesini awalnya itu kerangka berfikir saya” kerangka berfikir nya ekonomi tidak ada yang lain, untuk bisa ini terjual, orang harus ramai ke Padang Panjang, harus ada yang menjadi daya tarik, nah kita Padang Panjang kota Serambi mekkah, pariwisata apa yang cocok ? pertama dulu pariwisata pendidikan contohnya Yogyakarta, daerah tandus tapi karena banyak sekolah dan universitas, tanah 2x2 meter saja berharga disana, buat kos disana, pariwisata pendidikan sangat bagus karena mereka tetap disini, sedangkan orangtuanya juga mengunjungi, kalau tidak ada sekolah diyogya, miskin daerahnya, “maka kita pariwisata pendidikan, maka kita benahi sekolah SD, dan semua, kita tambah bangunannya, SMA 3, SMA super unggul, SMK 2, jadi wisata pendidikan, kedua wisata kesehatan, itu kita dapat lihat contohnya Bukittinggi, “ di Ahmad Mochtar, saya pernah jadi direktur disana, jadi rata-rata pasiennya disana 1000 perhari, baik rawat jalan dan rawat inap, orang Bukittinggi benar paling-paling hanya 200 orang dan 800 orang dari luar, dan 800 orang yang sakit tidak mungkin dia yang pergi minimal dibawa keluarganya, berdua orang yang menemani berarti bertiga dan 2400 orang yang datang ke Bukittinggi, kalau dia belanja rata-rata Rp 100.000 saja, untuk makannya, untuk ojeknya “ (bapak mengambil kalkulator untuk mengkalikan) sudah 240 juta, kemudian mereka juga nginap bawa oleh-oleh pulang, trus kita lihat di Malaka, hidup kotanya karena ada rumah sakit” jadi wisata kesehatan, maka kita benahi kesehatan.⁸⁷

Dari apa yang dikemukakan oleh Walikota Padang Panjang Suir Syam, ia menjelaskan upaya agar masyarakat di luar kota Padang Panjang datang ke Padang Panjang. Dalam mewujudkan hal tersebut, beliau mempunyai

⁸⁷Wawancara dengan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

kerangka berfikir bahwa ekonomi yang menjadi tujuan, dan misi di bidang pendidikan dan kesehatan. Tidak lain tujuannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Padang Panjang, dengan adanya wisata pendidikan, di Kota Padang Panjang, maka untuk pendidikan harus dibenahi dari penambahan sekolah, fasilitas serta begitu juga dengan kesehatan, menjadikan wisata kesehatan maka dibenahi kesehatan.

Dalam hal ini Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, mempunyai keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Padang Panjang. Dengan sejumlah misi yang diwujudkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, seperti yang dikemukakan dalam pernyataan wawancara, bahwa Suir Syam bertekad menjadikan Padang Panjang sebagai Kota tujuan Pendidikan, dengan program WAJAR 12 Tahun, dan bagaimana program ini bisa terwujud, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan, Jon Kenedi dan hasil pernyataannya sebagai berikut :

Setelah Bapak Suir Syam bertekad untuk memajukan pendidikan, saya pribadi mengatakan sangat berhasil, keberhasilannya yang pertama menambah fasilitas sekolah dan ini merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa, bahkan mengajak sekolah super unggul di Padang Panjang, menyediakan tanah 10 hektar, dan untuk yang sangat menonjol sekali, dengan dicetuskan nya Padang Panjang WAJAR 12 tahun, ini suatu kebijakan yang sangat luar biasa, dimana di daerah lain tidak berani, tetapi karena komitmen yang bagus, untuk selama ini dana operasional sekolah, orangtua di kop dari dana APBD, ini sebuah kebijakan yang sangat luar biasa sehingga tidak ada orangtua yang mengatakan tidak mampu, tidak bisa membayar uang komite.⁸⁸

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Jon Kenedi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Pada tanggal 16 Mei 2012, Pukul 11.00 WIB.

Menurut hasil pernyataan Kepala Dinas Pendidikan, Jon Kenedi, beliau menyatakan bahwa Suir Syam bertekad untuk memajukan pendidikan, dan menurut beliau sudah berhasil dengan adanya penambahan fasilitas sekolah dan merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa, mendirikan sekolah super unggul di Padang Panjang, menyediakan tanah 10 hektar, dan Padang Panjang mempunyai kebijakan WAJAR 12 tahun, dimana daerah lain tidak berani, untuk dana operasional diambil dari dana APBD, dengan begitu tidak ada orangtua yang mengatakan tidak mampu membayar uang komite.

Selain itu peneliti juga menanyakan terobosan WAJAR 12 tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan, Jon Kenedi, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bapak Suir Syam kalau membuat sebuah terobosan, sudah dipelajari dulu, disuruhnya tim khususnya untuk mempelajari minta data-data, kalau perlu sebelum mengambil sebuah kebijakan di kirim tim nya kedaerah lain, khususnya untuk kebijakan Wajar 12 tahun ini dia melakukan studi banding dulu, ke BALI Jembrana, ini adalah daerah yang pertama mencetuskan WAJAR 12 Tahun, belajar kesitu, apa kelebihan dan kelemahannya, nah apa kelemahan tidak diterapkan di Padang Panjang, contohnya WAJAR 12 tahun di Jembrana itu, walaupun dulu gagal di Jembrana, dengan belajar keluar daerah, melihat potensi yang ada kita sangat mendukung sekali.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Jon Kenedi, diketahui bahwa dalam mewujudkan WAJAR 12 Tahun, Walikota Padang Panjang Suir Syam sudah mengkaji terlebih dahulu, dibentuk tim khusus untuk mempelajari dan meminta sejumlah data, sebelum membuat

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Jon Kenedi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Pada tanggal 16 Mei 2012, Pukul 11.00 WIB.

sebuah kebijakan, dikirim tim tersebut ke daerah lain, dan untuk kebijakan WAJAR 12 tahun Suir Syam melakukan studi banding ke Jembrana Bali, karena daerah ini pertama kali mencetuskan hal tersebut, dan dicari tahu apa kelemahan dan kelebihan, walaupun gagal, tapi dengan mempelajari dahulu, dan hal ini sangat mendapat dukungan dari SKPD terkait.

Hal ini membuktikan bahwa dalam hal Pendidikan, WAJAR 12 Tahun menjadi sebuah kebijakan yang luar biasa, karena untuk mewujudkan hal itu Walikota Padang Panjang Suir Syam sangat komit, dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu, dan mencari data-data terkait dengan WAJAR 12 tahun. Juga melakukan studi banding guna mempelajari, apa yang bisa diperbaiki dari WAJAR 12 Tahun tersebut, sehingga bisa diterapkan di Kota Padang Panjang. Dalam hal ini, Suir Syam mempunyai kecerdasan yang tinggi dibandingkan bawahannya, dengan terobosan beliau di bidang Pendidikan.

Terkait dengan WAJAR 12 tahun, peneliti juga mewawancarai Wakil Walikota Padang Panjang, Edwin yang pernyataannya sebagai berikut :

Di bidang pendidikan target utama wajar 12 tahun, adalah semua masyarakat kota Padang Panjang bersekolah sampai SMA, wajib sekolah itu konsekuensinya biaya, nah kita gratiskan biaya sekolah, termasuk biaya pendidikan yang lainnya, trus swasta kita berikan dana subsidi Rp 50/ siswa.⁹⁰

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Edwin, Wakil Walikota Padang Panjang, Rumah Dinas Wakil Walikota Padang Panjang, Pada tanggal 3 Juni 2012, Pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh Wakil Walikota Padang Panjang, Edwin, diketahui bahwa WAJAR 12 Tahun merupakan target utama, dimana untuk mewujudkan hal tersebut biaya sekolah digratiskan, dan untuk sekolah swasta juga diberi subsidi sebesar Rp. 50.000 per siswa.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala BAPPEDA, Rusdianto berhubungan dengan misi Walikota Padang Panjang dibidang Pendidikan, hasil pernyataannya berikut ini :

Bayangkan di Pendidikan, Indonesia saja, Sumatera barat saja baru Wajar 9 tahun, kami sudah 12 tahun, sampai SLTA, Biasanya sampai SLTP itu, alokasi anggaran kami tidak pernah dibawah 20 %, sesuai dengan undang-undang pendidikan diatas 20 %, kemudian, lihatlah kami berhasil menerbitkan Perda Pendidikan, lihatlah di Sumatera Barat siapa yang Punya Perda Pendidikan.⁹¹

Kepala BAPPEDA, Rusdianto mengemukakan bahwa WAJAR 12 Tahun sudah diterapkan di Kota Padang Panjang, dan alokasi anggaran tidak pernah dibawah 20 %, dan selain itu juga berhasil mewujudkan Perda Pendidikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri terkait dengan kebijakan WAJAR 12 tahun selama kepemimpinan Bapak Suir Syam, sebagai berikut :

Kalau soal pendidikan beliau melihat, kota Padang Panjang ini sebagai pendidikan, sudah jauh-jauh hari memiliki daya tarik khusus untuk masyarakat, artinya kita menyediakan magnetnya, Bagaimana kota Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan, magnet itulah beliau jadikan sebagai strategi itu beliau buat, sehingga alhamdulillah dua kali

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Rusdianto, Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Kantor BAPPEDA Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012, Pukul 09.00 WIB.

periode beliau ini pendidikan luar biasa sekali, yang datang ke Padang Panjang, dengan WAJAR 12 tahun.⁹²

Dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD, Novi Hendri, beliau menjelaskan bahwa di bidang pendidikan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang menyediakan daya tarik atau magnet untuk masyarakat. Dalam rangka Kota Padang Panjang sebagai kota tujuan Pendidikan, dan magnet itulah yang merupakan strategi Walikota Padang Panjang Suir Syam. Hal ini sangat luar biasa, karena banyak yang datang ke Padang Panjang dengan WAJAR 12 tahun. Maksud dari pernyataan di atas bahwa, WAJAR 12 tahun merupakan sebuah ide yang mengantarkan kota Padang Panjang sebagai kota tujuan Pendidikan, dengan program yang menjadi percontohan bagi daerah lain, di Sumatera Barat. Untuk lebih lengkapnya mengenai penyelenggaraan pendidikan di kota Padang Panjang, dapat dilihat pada lampiran 7.

Selanjutnya di bidang Kesehatan, terkait dengan misi Walikota Padang Panjang Suir Syam, dimana kota Padang Panjang sebagai tujuan kesehatan. Sejumlah gebrakan beliau diantaranya Perda Rokok dan pengobatan gratis, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah bertaraf Internasional.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Budi Hariyanto yang pernyataannya sebagai berikut :

Contohnya saja Perda rokok ya, dengan latar belakang beliau seorang dokter, beliau akan lebih tahu apa penyebab rokok, pengaruh rokok terhadap kesehatan, ide dasar dari beliau, dengan ide dasar ini lah

⁹² Wawancara dengan Bapak Novi Hendri, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Kantor DPRD Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012, pukul 12.00 WIB.

dilemparkan kepada seluruh staff, sebagai staff mendukung, dan kita coba tuangkan perda tersebut, dan dikaji dari seluruh aspek, dan beliau menginginkan masyarakat kota Padang Panjang ini sehat.⁹³

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Budi Hariyanto di atas, ternyata Perda Rokok itu ada karena dengan latar belakang Bapak Suir Syam sebagai Dokter dan akan lebih mengerti penyebab rokok, pengaruh rokok terhadap kesehatan. Hal ini merupakan ide dasar dari beliau, yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh staff, dan mendapat dukungan. Kemudian perda tersebut dikaji dari seluruh aspek, dan tujuan dari perda rokok itu untuk kesehatan masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh, Kepala Dinas Koperasi UMKM Dan PERINDAG, Reflis, pernyataan beliau sebagai berikut :

Perda rokok itu kan sudah melalui banyak pertimbangan, dimana masalah rokok kata orang-orang kan berhak, cuman di satu sisi beliau memberikan pandangan merokok itu dapat merusak kesehatan, dan banyak kajian-kajiannya, apalagi di DPRD, pada saat sidang DPRD kan banyak yang merokok itu, kata beliau secara berseloroh “yang berbahaya itu adalah perokok Pasif”, dan beliau berikan penjelasan itu di berbagai kesempatan, beliau tanamkan pengertian kepada seluruh dinas, kemudian secara perlahan dan persuasif, dengan DPRD dan Muspida yang lain...⁹⁴

Menurut Pernyataan dari Kepala Dinas Koperasi UMUM dan PERINDAG, Reflis di atas, beliau mengatakan bahwa Perda Rokok ditetapkan sudah banyak pertimbangan, sama dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Budi Hariyanto. Perda Rokok ini

⁹³ Wawancara dengan Bapak Budi hariyanto, sekretaris daerah Kota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 10 Mei 2012, Pukul 09.15 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Reflis, Kepala Dinas Koperasi UMKM Dan PERINDAG Kota Padang Panjang , Kantor Dinas Koperasi UMKM Dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Pada tanggal 24 Mei 2012, Pukul 12.30 WIB.

banyak menemui tantangan, namun dari pernyataan Bapak Reflis dimana Bapak Suir Syam memberikan pandangan merokok dapat merusak kesehatan, dan banyak kajiannya.

Kemudian beliau juga mengatakan pada saat sidang DPRD, dimana banyak yang merokok, dan Walikota Padang Panjang Suir Syam mencoba menasehati dengan perkataan, yang berbahaya adalah perokok pasif, Beliau juga memberikan penjelasan dan menanamkan pengertian pada seluruh staff dinas, selain itu secara persuasif dengan DPRD dan Muspida yang lain.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Rusdianto, yang beliau jelaskan berikut ini :

Yang paling fenomenal itu adalah masalah rokok, perda rokok itu bukan tidak ada tantangan, kalau bapak tidak komit otomatis Gugur itu, Perda Rokok, kawasan tanpa asap rokok, kawasan tertib rokok, kawasan tanpa asap rokok adalah kawasan mesjid, kantor, tetapi perokok boleh merokok disana tapi diatur, itu yang fenomenal, kemudian masalah-masalah rokok ini, kemana-mana beliau sudah banyak jadi nara sumber, bahkan terakhir ke Myanmar.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BAPPEDA, Rusdianto, diketahui bahwa Perda Rokok merupakan dalam proses penetapan Perda Rokok, kalau Walikota Padang Panjang Suir Syam tidak komit, bisa saja Perda Rokok itu gugur. Perda Rokok itu terdiri dari kawasan tanpa asap rokok, kawasan tertib rokok, kawasan tanpa asap rokok, tetapi perokok boleh merokok tapi tempatnya ditentukan, Semenjak diterapkannya Perda Rokok, Walikota

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Rusdianto, Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Kantor BAPPEDA Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012, Pukul 09.00 WIB.

Padang Panjang Suir Syam diundang untuk menjadi nara sumber, ke Myanmar pun diundang. Dengan diundangnya Suir Syam menjadi penyaji di Myanmar dalam bahasa Inggris itu, karena Kementerian Kesehatan RI sangat terkesan dengan program kesehatan Kota Padang Panjang yang telah banyak mengukir prestasi.⁹⁶

Berikut peneliti mempunyai sebuah kliping-kliping berita mengenai Walikota Padang Panjang Suir Syam menjadi pembicara di Myanmar sebagai berikut :

Gambar 5.2



Kemudian untuk mengetahui bagaimana pandangan DPRD Kota Padang Panjang, yang pada tugasnya di bidang legislasi, mengenai Perda Rokok tersebut, peneliti mewawancarai, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri yang penjelasannya sebagai berikut :

Memang salah satu yang terobosan tadi Perda kawasan bebas asap rokok dan kawasan tanpa asap rokok, nah ini yang kita saahkan, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan banyak muncul perda ini diajukan kekita, artinya ada bahasa dari masyarakat kita ini Perda dilarang merokok, sebenarnya

⁹⁶[http://infosumbar.com/berita/Padang Panjang/](http://infosumbar.com/berita/Padang_Panjang/) berhasil dalam program kesehatan, Padang Panjang jadi percontohan WHO/ditulis oleh redaksi infosumbar, dengan judul, berhasil dalam program kesehatan, Padang Panjang jadi percontohan WHO, diakses pada tanggal 28 Juni 2012.

bukan begitu, sekarang kita membuat semacam ada ruang-ruang, yang privat bagi masyarakat kita yang perokok, jadi terlindungi perokok pasif, kemudian untuk itu perlu juga terobosan baru, kan itu sudah ada yang bikin, “kita tidak menerima lagi retribusi dalam bentuk iklan rokok” , artinya apa tidak boleh lagi ada iklan rokok di Padang Panjang...⁹⁷

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Padang Panjang, Novi Hendri, di ketahui bahwa Perda kawasan bebas asap rokok dan kawasan tanpa asap rokok merupakan salah satu terobosan, dan yang disahkan oleh DPRD. Beliau menyatakan bahwa awalnya masyarakat mengira Perda Rokok ini adalah perda dilarang merokok, tapi pada maksudnya bukan begitu. Selanjutnya untuk realisasi dari Perda ini dibuat tempat khusus bagi masyarakat yang perokok, agar perokok pasif terlindungi. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa ada sebuah terobosan baru dari Walikota Padang Panjang Suir Syam yaitu tidak adanya iklan rokok di Kota Padang Panjang. Itu artinya Kota Padang Panjang tidak menerima lagi retribusi dalam bentuk iklan rokok.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai seorang wartawan Padang Ekspres, yang merupakan kontributor untuk kota Padang Panjang, Fadly yang pertanyaannya sebagai berikut :

Tapi khusus untuk bidang kesehatan semacam pak Suir Syam diundang kemaren ke Myanmar, untuk memberi ceramah di Myanmar, gerakan anti rokok, dan sebagainya ambo pikir itu murni karena kecerdasan bapak Suir Syam, untuk diundang ke Meksiko, sangat jarang sekali kepala daerah dalam skala internasional seperti itu, dan inyo karena gigih memperjuangkan kesehatan, kanada duo yang bisa dicatat dari inyo, kesehatan ko inyo gigih menentang rokok di Padang Panjang, biarlah Padang Panjang kehilangan PAD di iklan rokok ndak ba a dek inyo doh,

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Novi Hendri, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Kantor DPRD Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012, Pukul 12.00 WIB.

yang kedua, inyo telah mengansurasikan seluruh warga Padang Panjang, asuransi kesehatan, jadi RSUD Bisa di akses dengan gratis.⁹⁸

Dalam Bahasa Indonesia :

Tapi khusus untuk bidang kesehatan semacam pak Suir Syam diundang kemaren ke Myanmar, untuk memberi ceramah di Myanmar, gerakan anti rokok, dan sebagainya saya pikir itu murni karena kecerdasan bapak Suir Syam, untuk diundang ke Meksiko, sangat jarang sekali kepala daerah dalam skala internasional seperti itu, dan dia karena gigih memperjuangkan kesehatan, ada dua yang bisa dicatat dari beliau, kesehatan ini beliau gigih menentang rokok di Padang Panjang, biarlah Padang Panjang kehilangan PAD di iklan rokok tidak masalah baginya, yang kedua, dia telah mengansurasikan seluruh warga Padang Panjang, asuransi kesehatan, jadi RSUD Bisa di akses dengan gratis.

Wartawan Padang Ekspres, Fadly menyatakan bahwa dalam hal bidang kesehatan Walikota Padang Panjang Suir Syam diundang ke Myanmar, dalam hal memberi seminar gerakan anti rokok. Fadly menyatakan hal ini murni kecerdasan dari Walikota Padang Panjang Suir Syam, untuk diundang ke Meksiko, sangat jarang sekali seorang Kepala Daerah di ikut sertakan dalam acara internasional. Walikota Padang Panjang Suir Syam juga sangat gigih, dalam memperjuangkan kesehatan, dan juga terkait dalam hal menentang iklan rokok di Padang Panjang dengan harus kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Walikota Padang Panjang Suir Syam juga mengansurasikan warga Padang Panjang, dengan pengobatan gratis, jadi RSUD Bisa di akses dengan gratis.

⁹⁸ Wawancara dengan Fadly, Wartawan Padang Ekspres kontributor Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 7 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Berikut peneliti mempunyai potret Perda Rokok di Kota Padang Panjang sebagai berikut :

Gambar 5.3



Dokumentasi Perda Rokok di Kota Padang Panjang

Untuk lebih jelasnya mengenai Perda Rokok, dapat dilihat pada lampiran 6. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang juga mempunyai misi di bidang ekonomi kerakyatan, dimana ide, dan gebrakan beliau mengenai kota tujuan pendidikan, kota tujuan kesehatan itu hal itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota Padang Panjang. Dalam bidang ekonomi gebrakan yang diwujudkan adalah Padang Panjang sebagai Kota Sentral Industri Kulit Nomor 2 setelah pulau jawa, dan satu-satu nya di Sumatera.

Untuk mengetahui hal ini peneliti mewawancarai, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Reflis, mengenai ide Walikota

UMKM dan BERKINYOLO Kota Padang Panjang. Kajian mengenai role Hukit

Untuk mengidentifikasi hal ini peneliti menggunakan: Kepala Dinas Kota Padang Panjang dan Komor. 5 orang bertaqab dan gata-gata nla di Sumatera Barat dan juga diwilayahnya adalaa Padang Panjang sebagai Kota Selatan berkekonominan masarakat kota Padang Panjang. Dalam bidang ekonomi berdiyakini kota ini akan keseratan ini hal ini untuk mengidentifikasi ketangkasan, qimmas idc, dan beratkan peran mengkonasi kota ini akan Hukit Padang Panjang ini akan membunai nial di bidang ekonomi ini akan o. Untuk halnya qimmas bidang keseratan, gata gata sebagai Untuk peran jelaunya mengkonasi berda kokok, qabag qimmas berda Dokumentasi berda kokok di Kota Padang Panjang



Gambar 2.3

Padang Panjang sebagai berikut :

Berikut peneliti menggunakan hasil berda kokok di Kota Padang

Padang Panjang Suir Syam menjadikan Kota Padang Panjang sebagai sentral industri kulit, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

Munculah pemikiran dari Pak Walikota, Bagaimana kita kerja sama dengan tiga lembaga, Kementrian, Provinsi trus kita, bikin MOU dengan itu, Pemko Padang Panjang, Provinsi dan Kementrian, kita hanya menyiapkan tanah, dan seluruh soal peralatan, ditanggung oleh Kementrian, kemudian sebagian dari pondok design di situ membangun, jadi kalau kita juga membiayai peralatan, luar biasa mahalnya, ada 1,2 milyar, 2,8 milyar, jadi awalnya dulu pertama daerah kita kan dilalui jalan lintas, kiri kanan kita penghasil kulit, seperti selama ini kulit yang dihasilkan oleh Payakumbuh, Bukittinggi segala macam dijual secara mentah, dari sisi biaya produksi dan transportasi kan tinggi tuh, jadi peluang itu kita tangkap, jadi kita dirikan disini pabrik kulit, seluruh daerah Sumbar dan sekitarnya membawa kulit dari daerah kita, mereka tidak lagi harus ke Garut.⁹⁹

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Reflis, beliau menjelaskan mengenai awalnya ditetapkan Kota Padang Panjang sebagai Pusat Industri Kulit, bahwa ada pemikiran dari Walikota Padang Panjang Suir Syam terkait dengan kerjasama dengan Kementrian, Provinsi, dan Pemerintah Kota Padang Panjang terkait dengan Pusat Industri Kulit. Beliau juga menjelaskan bahwa Padang Panjang hanya menyiapkan tanah saja. Terkait dengan peralatan ditanggung oleh Kementrian terkait, kalau Pemko Padang Panjang yang menanggung peralatan, biayanya akan mahal. Maka didirikan Pabrik Kulit di Kota Padang Panjang, sehingga seluruh daerah Sumatera Barat membawa kulit dari Kota Padang Panjang.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Reflis, Kepala Dinas Koperasi UMKM Dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Kantor Dinas Koperasi UMKM Dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Pada tanggal 24 Mei 2012, Pukul 12.30 WIB.

Peneliti juga menanyakan hal ini pada, Kepala BAPEDDA Kota Padang Panjang, Rusdianto, pernyataan beliau sebagai berikut :

Artinya bagaimanapun visi misi beliau itu kan tahapan, seperti misalnya ekonomi kerakyatan, itu kita membangun sebuah industri, katakanlah sebuah industri kulit, memang masih ada tantangan dan itu berproses terus...¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan Kepala BAPEDDA Kota Padang Panjang, Rusdianto, di atas, di ketahui bahwa mengenai visi dan misi Bapak Suir Syam melalui tahapan, diantaranya ekonomi kerakyatan, membangun industri kulit. Hal ini berproses dan masih ada tantangan. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa industri kulit merupakan misi dari ekonomi kerakyatan, dimana tahapan untuk perwujudan industri kulit ini, mendapatkan tantangan dan hal ini berproses, sampai pada akhirnya Kota Padang Panjang Pusat Industri Kulit nomor 2 setelah pulau Jawa.

Selain Industri Kulit, Pembangunan Mifan juga merupakan ide dari Walikota Padang Panjang Suir Syam, guna memajukan perekonomian masyarakat Kota Padang Panjang.

Untuk hal ini Peneliti mewawancarai Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri, beliau memaparkan sebagai berikut :

PT Mifan, itu dulu minang Philip dibawah pengawasan pariwisata, kita mengeluarkan pembiayaan itu satu tahun 1 milyar sekaligus pegawai, itu biaya kita keluarkan terus, dan ini nomor 2 terbesar pendapatan kita,

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Rusianto Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Kantor BAPPEDA Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012. Pukul 09.00 WIB.

setelah rumah sakit 2 sampai 3 setengah , milyar satu tahun, dan ekonomi masyarakat berkembang, nah ini atas usulan bapak Suir Syam.¹⁰¹

Ketua DPRD Padang Panjang, Novi hendri menyatakan bahwa, Mifan itu dahulunya minang philip, yang merupakan pengawasan di Dinas Pariwisata, dan Pemerintah Kota mengeluarkan anggaran pembiayaan untuk satu tahun sebesar 1 milyar. Beliau juga menekankan bahwa setelah menjadi Mifan, pendanaannya bisa menambah pendapatan, pendapatan dari Mifan ini merupakan nomor 2 terbesar setelah rumah sakit. Beliau juga menyatakan, hal ini membuat ekonomi masyarakat berkembang, dan semua hal ini atas usulan Walikota Padang Panjang Suir Syam.

Dari temuan umum tentang kecerdasan Walikota Padang Panjang Suir Syam, dalam hal mengeluarkan sebuah ide dan gebrakan, ternyata sangat luar biasa, karena semua hal yang digagas oleh Walikota Padang Panjang Suir Syam, menjadikan beliau mendapat berbagai pujian dari bawahannya. Ini terkait dengan beberapa ide beliau yang sangat khas, berbeda dari daerah lain, dan menjadi percontohan bagi daerah lain. Hal ini berhubungan dengan yang dikemukakan oleh Keith Davis, dimana pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, dibandingkan dengan yang dipimpin. Tetapi walaupun Walikota Padang Panjang Suir Syam mempunyai ide dan pemikiran yang sangat khas, para bawahannya tetap diberi kepercayaan untuk menjalankan hal tersebut, tidak lepas dari ketentuan yang berlaku.

¹⁰¹ Wawancara Dengan Bapak Novi Hendri Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 mei 2012.

b. Pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya.

Selanjutnya untuk mengetahui pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikut, apakah hal ini ada dalam diri Walikota Padang Panjang Suir Syam, bisa kita lihat dari pernyataan beliau sebagai berikut :

Kalau ada persoalan yang sangat genting, krusial, kita minta pendapat mereka dulu, saran mereka apa, nanti dari banyak saran itu, kita juga punya pemikiran, nah kita gabungkan mana yang paling pas, yang cocok, kalau menurut kita ini, kalau sudah cocok semua, atau ada tidak masukkan lain, kalau tidak setuju apa yang lain, kita pikirkan, jadi tidak otoriter, karena yang bekerja mereka bukan kita.¹⁰²

Maksud dari Pernyataan Walikota Padang Panjang Suir Syam, bahwa jika ada persoalan yang sangat perlu dicari jalan keluarnya, maka beliau tidak menyelesaikannya sendiri, tetapi meminta pendapat saran dari aparaturnya. Walikota Padang Panjang Suir Syam juga memiliki pemikiran, dan itu digabungkan dengan saran dari aparaturnya, kalau sudah sesuai, maka dipilih yang itu. Tapi kalau masih ada yang belum setuju maka dicari solusi apa yang tepat, jadi tidak otoriter, karena yang bekerja itu para aparaturnya, jadi tergantung dari solusi dari aparaturnya.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Rusdianto sebagai berikut :

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Suir Syam Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Banyak persoalan, membangun pasar itu tidak mudah, di Padang Panjang ini salah satu etalase kota itu memang pasar, sekarang beliau sangat komitmen membangun pasar, cuma beliau tidak ingin bertabrakan dengan masyarakatnya, artinya membangun pasar itu masih ada pertentangan, yang satu melalui investor dan yang satu melalui APBD, kalau orang berfikir positif memakai investor, Pak Wali tidak mau otoriter, tetap berproses sekarang, beberapa saat lagi penampungan akan dibangun, dan beliau sangat komit.¹⁰³

Terkait dengan bagaimana Walikota Padang Panjang Suir Syam dalam menghadapi persoalan dan mencari solusinya, Pernyataan dari Kepala BAPPEDA, Rusdianto tersebut menjelaskan bahwa dalam banyak persoalan diantaranya, proses pembangunan pasar. Pada intinya Walikota Padang Panjang Suir Syam sangat komitmen, tetapi ada masyarakat yang tidak setuju, dan beliau tidak mau otoriter, dan tetap menunggu solusi terbaik dari persoalan tersebut, tanpa mengorbankan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sangat terlihat bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian. Menemukan hal-hal yang krusial dengan cepat dan menemukan penyelesaiannya. Beliau juga mampu menyelesaikan dengan baik persoalan, tanpa adanya pemaksaan. Baginya, beliau bukan pemimpin yang otoriter.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri berikut ini :

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Rusianto Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Kantor BAPPEDA Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012, Pukul 09.00 WIB.

Beliau juga orangnya rendah hati, dia kalau ada persoalan masalah, tindakan yang mau diambil beliau diskusikan, terutama secara kelembagaan dan dewan, artinya tidak serta merta keinginan seperti ini beliau paksakan, pasti dia komunikasikan dulu dengan aparaturnya, sehingga ada tanggapan dari kita.¹⁰⁴

Ketua DPRD Padang Panjang, Novi Hendri memberikan penjelasan bahwa, Walikota Padang Panjang Suir Syam dalam menghadapi persoalan, beliau mendiskusikan terlebih dahulu, artinya tidak ada paksaan dan pasti beliau mengkomunikasikan persoalan tersebut. Terlihat bahwa hasil wawancara dengan beliau, sama dengan hasil wawancara sebelumnya, bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam menyikapi persoalan, berusaha untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan kepada aparaturnya, dan tidak ada pemaksaan untuk menerima solusi dari beliau.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil sebuah pemaknaan bahwa dalam penyelesaian persoalan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan meminta saran dan masukkan dari bawahannya, agar persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik, dan adanya komunikasi yang baik dengan aparaturnya.

Selain itu ada satu pernyataan lagi yang menguatkan, bahwa dalam menghadapi persoalan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang tidak otoriter, dipertegas dengan pernyataan dari Fadly, Wartawan Padang Ekspres sebagai berikut :

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Bapak Novi Hendri Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Kantor DPRD Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012, Pukul 12.00 WIB.

Tidak ada pemimpin daerah yang perfect do, inyo masih banyak menyisakan persoalan, kemudian membuat dia bahan perbincangan tetapi tidak menjatuhkan inyo, ada beberapa hal yang cukup bagus dari Padang Panjang dari daerah lain, pertama” ketika ada potensi konflik, Padang Panjang lebih cepat untuk bisa meredam, misalnya” kejadian kebakaran pasar, yang jarak antara satu kebakaran dengan kebakaran lain dekat, kebakarannya cukup besar, dan potensi konflik besar juga, kebetulan berdekatan dengan rencana revitalisasi Pasar, jadi waktu itu memang sempat ada isu-isu dan gonjang ganjing adalah bagian dari planing pemko untuk memuluskan pembangunan pasar tu, tapi sekali lagi faktor karismatik Suir Syam.¹⁰⁵

Dalam Bahasa Indonesia :

Tidak ada pemimpin daerah yang *perfect*, dia masih banyak menyisakan persoalan, kemudian membuat dia bahan perbincangan tetapi tidak menjatuhkan dia, ada beberapa hal yang cukup bagus dari Padang Panjang dari daerah lain, pertama” ketika ada potensi konflik, Padang Panjang lebih cepat untuk bisa meredam, misalnya” kejadian kebakaran pasar, yang jarak antara satu kebakaran dengan kebakaran lain dekat, kebakarannya cukup besar, dan potensi konflik besar juga, kebetulan berdekatan dengan rencana revitalisasi Pasar, jadi waktu itu memang sempat ada isu-isu dan gonjang ganjing adalah bagian dari planing pemko untuk memuluskan pembangunan pasar itu, tapi sekali lagi faktor karismatik Suir Syam.

Dalam hal ini Fadly menegaskan, Padang Panjang yang cepat meredam potensi konflik, dan menjadikan beliau bahan perbincangan. Tapi itu tidak menjatuhkan beliau. Pada saat permasalahan kebakaran pasar, yang mempunyai potensi konflik yang besar, hal itu dijadikan sebagai sebuah isu, bagian dari rencana pemerintah kota untuk melancarkan pembangunan pasar, tapi itu tidak dipercaya oleh masyarakat, karena faktor kewibawaan beliau.

¹⁰⁵Wawancara dengan Fadly, Wartawan Padang Ekspres kontributor Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 7 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan dari teori sifat yang dikemukakan oleh Keith Davis mengenai kecerdasan, dan Keith Davis memberikan dua buah indikator yang pertama pemimpin mampu untuk melihat dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang krusial dengan cepat dan menemukan penyelesaiannya. Pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya.

Fakta dilapangan bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh Suir Syam sebagai Walikota Padang panjang, ketika menghadapi sebuah persoalan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang bisa mengontrol diri, dan ketika ada persoalan yang sangat darurat, beliau bisa menemukan penyelesaiannya dengan meminta saran dari bawahan, serta mengkomunikasikan persoalan tersebut. tidak bersikap memaksa. Hal ini kecerdasan yang dimiliki Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Keith Davis, dalam hal ini Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang juga meminta saran dari aparaturnya, beliau tidak bisa melampaui terlalu banyak kecerdasan pengikutnya, berarti pemikiran, masukan dan saran dari pengikutnya juga dipertimbangkan.

2. Kedewasaan dan keeluasaan hubungan sosial Suir Syam sebagai

Walikota Padang Panjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

- a. Pemimpin mempunyai emosi yang stabil, karena mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas sosial.**

Untuk melihat Kedewasaan dan keeluasaan hubungan sosial, Dalam hal melakukan kerja sama, ketegasan dalam pengambilan keputusan dan memiliki keterampilan sosial, serta dapat mengontrol emosi, maka peneliti dapat melihat tersebut dari wawancara dengan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, sebagai berikut :

Saya tidak pernah memarahi pejabat, pegawai pun ndak pernah saya marahi didepan umum, walaupun berapapun salahnya saya senyum saja, itu lebih mampan ketimbang kita memarahi dia, sebab kan mereka itu sudah punya anak, bapak orang, ibuk orang, masak kita marahi, saya tidak pernah marah-marah, ngapain dimarahi dia sudah bekerja untuk kita, jadi yang penting kepala daerah ini dia harus menguasai program.¹⁰⁶

Menurut apa yang disampaikan oleh Walikota Padang Panjang Suir Syam, menyatakan bahwa beliau tidak pernah memarahi pejabat, ataupun bawahannya. Walaupun beliau marah, hanya memberikan senyuman karena menurut beliau itu lebih bermanfaat dari pada marah. Beliau sangat menghargai aparaturnya, karena orang yang sudah mempunyai anak, ayahnya seseorang atau ibunya seseorang, kenapa harus memarahi mereka, dan mereka juga sudah bekerja untuk pemerintahan kota Padang Panjang.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aparatur lainnya, peneliti juga menemukan pernyataan yang sama dengan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, terkait dengan beliau tidak pernah memarahi bawahannya, berikut pernyataan dari Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Rusdianto :

¹⁰⁶Wawancara dengan Bapak Suir Syam, Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Bapak tidak pernah marah didepan orang lain, walaupun bapak emosi, tapi bapak akan diam, atau nanti akan cerita pada keluarga, bapak sangat bisa mengontrol emosi, dan bapak memiliki sifat tegas, dalam hal ini apapun program yang bersifat inovatif dan menyentuh masyarakat bapak tetap lanjut, seperti perda rokok, Askes, WAJAR.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Rusdianto di atas, beliau menjelaskan bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang tidak pernah marah, walaupun emosi beliau akan diam, Beliau sangat bisa mengontrol emosi, karena itu beliau memiliki sifat yang tegas.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Reflis, berikut ini :

Belum pernah rasanya Pak walikota itu menempatkan diri beliau sebagai, antara BOS dan anak buah, jadi apa yang beliau perintahkan kita dengan senang hati mengerjakan, itu bukan perintah, mungkin semacam himbuan, Cuma terkesan, kita menjadi dibebani, karena itu hanya semacam, “tolonglah ini dikerjakan, kapan waktunya selesai, kita dengan bahasa yang lembut seperti itu terkena dihati kita, tapi kalau kepala daerah itu main perintah, kita akan bisa melawan, karena pak Suir Syam tidak pernah memerintah, beliau hanya mengajak semua.¹⁰⁸

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Reflis menerangkan bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang tidak menganggap dirinya atasan, jadi apa yang diperintahkan pada aparaturnya,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Rusdianto, Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, Kantor BAPPEDA Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012. Pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Reflis, Kepala Dinas Koperasi UMKM Dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Kantor Dinas Koperasi UMKM Dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Pada tanggal 24 Mei 2012, Pukul 12.30 WIB.

dilakukan dengan perasaan senang tanpa beban, dan penyampaian tugas itu dengan bahasa yang lembut, dan beliau tidak pernah memerintah.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan PERINDAG Kota Padang Panjang, Reflis hampir sama dengan pernyataan dari Staf ahli bagian hukum, Saharuddin, sebagai berikut :

Dalam hal mengendalikan emosi, Bapak Suir Syam sangat kebabakan, dan sangat bisa mengendalikan emosi, bawahannya merasa nyaman dengan apa yang dikerjakan, dan tidak terpaksa.¹⁰⁹

Dari pernyataan Staf ahli bagian hukum, Saharuddin, beliau menjelaskan bahwa terkait dengan pengendalian emosi, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang memosisikan dirinya sebagai Bapak, mengayomi, dan bisa mengendalikan emosi. Hal ini membuat bawahan sangat nyaman dalam melaksanakan tugas, karena dilakukan dengan tidak terpaksa.

Pernyataan ini juga diperkuat oleh salah seorang wartawan Padang Ekspres, Fadly, berikut hasil wawancaranya :

Kalau pun dia marah pasti dia melucu, ba a caronyo tuh, “ misalkan giko” waktu tu ada guru yang mutasi, kemudian guru-guru ko mengeluh, jam mengajarnya ndak sesuai sertifikasi do, tu mangadu guru-guru ke bapak Suir Syam, kemudian waktu itu, pas pengangkatan kepala sekolah disampaikan “ Ambo ko kan Walikota, guru mangadu lo ka ambo, sudah tu petugas kebersihan mangadu ka ambo, sudah tu petani mangadu ka ambo, sudahtu mahasiswa mangadu ka ambo, tu sado urang mangadu ka mabo lai” nah dia sampaikan dengan nada bercanda, dan setelah orang itu pergi baru berfikir, ada caranya, dia tu bukan orang yang sok hebat, dia tidak menyombong.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Saharuddin , staf ahli bagian hukum dan politik, Kota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 12 Mei 2012, Pukul 10.00 WIB.

¹¹⁰Wawancara dengan Fadly, Wartawan Padang Ekspres Kontributor Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 7 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Dalam Bahasa Indonesia :

Kalau pun dia marah pasti dia melucu, bagaimana caranya yah, “ umpamanya begini ” waktu itu ada guru yang mutasi, kemudian guru-guru tersebut, jam mengajarnya tidak sesuai sertifikasi, selanjutnya guru-guru memberitahu ke Bapak Suir Syam, kemudian waktu itu, pas pengangkatan kepala sekolah disampaikan “ saya ini kan Walikota, guru melapor ke saya, sudah itu petugas kebersihan melapor ke saya, sudah itu petani melapor ke saya, sudah itu mahasiswa melapor ke saya, setelah itu semua orang melapor ke saya” nah dia sampaikan dengan nada bercanda, dan setelah orang itu pergi baru berfikir, ada caranya, dia itu bukan orang yang sok hebat, dia tidak menyombong...”

Dari pernyataan Fadly tersebut, beliau menceritakan bahwa kalau Walikota Padang Panjang Suir Syam marah, pasti dengan pembawaan bercanda. Pada suatu kesempatan ada guru yang dimutasi, karena jam mengajar guru tersebut, tidak sesuai dengan sertifikasi. Selanjutnya guru-guru tersebut melapor kepada Walikota Padang Panjang Suir Syam, ketika ada pengangkatan kepala sekolah Walikota Padang Panjang Suir Syam menyampaikan sesuatu, dia seorang Walikota dan semua orang melapor kepada dia, jadi setelah mendengar perkataan dari Bapak Suir Syam tersebut, guru-guru yang melapor sadar, bahwa maksud dari perkataan Bapak Suir Syam, tidak semua persoalan ataupun masalah dilaporkan kepada beliau, ada tata caranya dan aturannya.

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara informan sebelumnya, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mampu mengendalikan emosi dalam setiap tindakan, karena pemimpin bekerja bukan sendiri, melainkan bersama aparaturnya. Terlihat bahwa Walikota Padang Panjang Suir Syam mampu mengontrol emosinya, beliau bukan tipe pemimpin

yang memarahi atau berlaku kasar terhadap aparaturinya. Kalaupun beliau marah, pembawaannya tidak emosional melainkan di ajak bergurau. Dalam hal ini pemimpin yang baik itu, memiliki emosi yang stabil, tidak mudah marah, dan tidak membuat aparaturinya tersinggung ataupun mengalami kekerasan. Jadi terciptalah kondisi kerja yang nyaman, dan aparaturinya tidak mengalami tekanan mental, dikarenakan Walikota Padang Panjang Suir Syam mengendalikan emosi dengan baik.

b. Pemimpin mampu dalam penyampaian sebuah gagasan, terkait dengan pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan.

Tidak hanya menjaga kestabilan emosi, dalam menyelenggarakan pemerintahan, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang mampu dalam penyampaian sebuah gagasan, terkait dengan pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan, dan ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan Suir Syam, Walikota Padang Panjang sebagai berikut:

Contoh umpunya mengenai perda rokok, perda rokok itu kan kita tau pertama dulu sosialisasi, bagaimana bahayanya rokok terhadap kesehatan dan kemudian terhadap perekonomian masyarakat, jelaskan bahaya-bahayanya, contoh-contohnya dan sehingga mereka mulai dapat mengerti, nah setelah masyarakat kita lihat, baru kita ajukan perda, dan ini berproses, sebab bagaimanapun bagus nya peraturan tanpa didukung masyarakat, tidak akan berjalan dengan lancar, Tapi kalau masyarakat sebagian besar sudah mendukung, tinggal kita lagi menjalankan, dan kita tentunya melibatkan semua unsur masyarakat...¹¹¹

¹¹¹Wawancara dengan Bapak Suir Syam Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Walikota Padang Panjang Suir Syam menjelaskan bahwa, dalam hal penerapan perda rokok, yang merupakan salah satu program di bidang kesehatan, pada awalnya sebelum menjadi perda rokok, diadakan sejumlah sosialisasi pada masyarakat, dan setelah masyarakat mengerti dan paham, baru perda ini diajukan. Beliau juga menekankan bahwa sebuah peraturan yang tidak mendapat dukungan dari masyarakat, tidak akan berjalan lancar, dan pembahasan kebijakan tersebut, melibatkan semua unsur masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Staf ahli bagian hukum dan politik Kota Padang Panjang, Saharuddin, sebagai berikut :

Proses penyampaian sebuah ide, Bapak Suir Syam selalu mengkomunikasikan pada kepala Dinas yang ada, dan proses penyampaian ide ini secara bertahap, contoh pada Perda rokok, itu disampaikan dan diadakan pertemuan pada SKPD, gebrakan bapak Suir Syam dikoordinasikan dan disosialisasikan...¹¹²

Berdasarkan pernyataan di atas didapat penjelasan bahwa dalam penyampaian ide, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang selalu berkomunikasi dengan SKPD, ide tersebut disampaikan secara bertahap, contohnya pada Perda Rokok, dan apapun ide atau gebrakan, beliau juga mengkoordinasikan dan juga mensosialisasikannya.

Dari hasil wawancara tersebut di dapat temuan, bahwa memang benar Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang melakukan komunikasi, sosialisasi

¹¹² Wawancara dengan Bapak Saharuddin , staf ahli bagian hukum dan politik, Kota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 12 Mei 2012, Pukul 10.00 WIB.

dan koordinasi kepada SKPD, dan juga masyarakat terkait dengan ide, program ataupun gebrakan yang akan di lakukan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Mawardi, melalui pernyataan berikut :

Kalau terkait dengan penyampaian ide, prosesnya begini, kalau bapak ada ide itu akan di sampaikan kepada kepala SKPD terkait, dan kalau di Dinas Kesehatan kita punya tim pengendalian untuk mengkaji ide tersebut apakah sesuai dan cocok atau tidak, dan bapak sendiri akan memberikan pilihan yang akan kami pilih, jika tim setuju, maka akan disampaikan dalam rapat, dan apabila tidak maka akan dipertimbangkan, bapak sangat terbuka untuk ide, dan dia mengharapkan aparaturnya sangat inovatif.¹¹³

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Mawardi menyatakan bahwa dalam menyampaikan ide, Bapak Suir Syam menyampaikannya kepada SKPD, dan khusus di dinas kesehatan memiliki tim pengendalian untuk mengkaji ide tersebut, apakah cocok atau tidak. Dalam hal ini Bapak Suir Syam memberikan pilihan, jika setuju maka ide tersebut akan disampaikan dalam rapat, dan jika tidak setuju akan dipertimbangkan, serta beliau juga terbuka dalam penyampaian ide, dan bagusny lagi aparaturnya inovatif.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Mawardi, ditemukan hal yang sama dari wawancara sebelumnya, yaitu Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang selalu menyampaikan ide ataupun program kepada SKPD dan masyarakat, selalu meminta saran apabila ide tersebut masih ada kekurangan, dan beliau sangat terbuka orangnya.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Mawardi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Pada tanggal 23 Mei 2012, Pukul 14.30 WIB.

Bisa kita lihat dari beberapa hasil wawancara, akan terlihat bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, membangun azas musyawarah dan mufakat dalam penyampaian ide, program atau sebuah gebrakan untuk Kota Padang Panjang. Beliau Menyampaikan, mengkomunikasikan serta mensosialisasikan kepada SKPD, dan beliau juga menerima saran serta masukan dari stafnya. Jadi ada komunikasi dua arah yang beliau bangun, kalau masalah kebijakan, keputusan yang beliau ambil itu, sesuai masukan dan saran, terakhir pertimbangan dari beliau, realisasinya, tetap musyawarah dan mufakat.

Ada satu pernyataan lagi yang menguatkan bahwa dalam proses penyampaian ide, program ataupun gebrakan dalam mewujudkan misi pemerintahan, hasil wawancara dengan Ketua Kan Nagari Gunung, Kota Padang Panjang, Doni Rahman, DT. Simarajo sebagai berikut :

Dalam memimpin, Suir Syam membawa perubahan untuk Padang Panjang, dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kita lihat bagaimana beliau mempertahankan adat dan budaya masyarakat Padang Panjang, itu dibuktikan dengan dalam pemerintahannya musyawarah dengan kita nagar...¹¹⁴

Dalam Bahasa Indonesia :

Dalam memimpin, Suir Syam membawa perubahan untuk Padang Panjang, dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kita lihat bagaimana beliau mempertahankan adat dan budaya masyarakat Padang Panjang, itu dibuktikan dengan dalam pemerintahannya musyawarah dengan kita nagari.

¹¹⁴Wawancara dengan Bapak Doni Rahman, DT .Simarajo, Ketua KAN Nagari Gunung, Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Pada tanggal 4 Juni 2012, Pukul 11.00 WIB.

Dari pernyataan di atas, menguatkan bahwa dalam proses penyampaian ide, Walikota Padang Panjang Suir Syam, melakukan sosialisasi dan mengajak serta masyarakat nagari dalam musyawarah, serta meminta saran dari masyarakat terkait dengan ide yang disampaikan.

Menurut hasil wawancara di atas berkaitan dengan karakteristik Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, peneliti melihat dan menganalisa hal tersebut berdasarkan salah satu indikator dari teori sifat yang dikemukakan Keith Davis yaitu Kedewasaan dan keeluasaan hubungan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pemimpin cenderung menjadi matang. Pemimpin mempunyai emosi yang stabil, karena mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas sosial.
- b. Pemimpin mempunyai keinginan menghargai dan dihargai, Pemimpin dapat melakukan kerjasama, mempunyai keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri.

Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh, dari hasil wawancara di atas bahwa karakteristik Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, dalam hal kedewasaan dan keeluasaan hubungan sosial mengarahkan peneliti pada dua indikator yaitu, pemimpin mempunyai emosi yang stabil, dan pemimpin dapat melakukan kerjasama.

Hal ini dikarenakan beliau memiliki emosi yang stabil, dengan tidak pernah memarahi aparaturnya ataupun bawahannya. Beliau sangat menghargai hasil kerja dari

aparaturnya terbukti dengan sejumlah program yang berhasil di jalankan oleh aparaturnya. Pada saat penyampaian sebuah ide, gagasan atau program, Beliau bisa mengkomunikasikan dengan baik, dan juga meminta saran dari aparaturnya. Selain itu beliau juga mampu membuat aparaturnya, mempunyai keberanian untuk menyampaikan ide, gagasan, dan tidak perlu merasa takut.

3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

a. Pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.

Dalam menjalankan tugasnya Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang mempunyai dorongan untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat, serta dalam pemerintahannya beliau selalu ingin mendapat penghargaan, oleh sebab itu peneliti memberikan pertanyaan pada Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

Yang harus dituntaskan pasar, karena kita sudah berhasil mendatangkan orang ke kota Padang Panjang, tapi orang tidak bisa belanja di pasar, dan pasar sudah tidak layak lagi, sudah 12 kali terbakar, dan itu sudah 30 tahun. Setiap mau dibangun, ada juga ulahnya, sampai sekarang sudah kita musyawarahkan, dari 1600 pedagang pasar yang tidak setuju hanya 7 orang, jadi lebih baik kita perjuangkan yang banyak. Dan saya rasa ini bukan pedagang, ini politik, yang mau maju ke pilkada, yang mencari nama, kasihan banyak yang teraniaya.¹¹⁵

¹¹⁵Wawancara dengan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Walikota Padang Panjang Suir Syam memberi penjelasan bahwa, beliau sangat ingin menyelesaikan persoalan pasar, karena beliau sudah berhasil mendatangkan orang ke Padang Panjang, tapi kondisi Pasar Padang Panjang membuat pengunjung tidak nyaman. Jadi beliau berkeinginan untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Padang Panjang, walaupun pembangunan tersebut menghadapi banyak rintangan. Beliau selalu melakukan komunikasi dengan para pedagang, diantara banyak yang setuju, hanya beberapa orang yang tidak setuju. Jadi beliau memperjuangkan yang setuju, dan beliau menganggap yang tidak setuju bukan dari pedagang, melainkan dari politik, yang mencari nama. Beliau merasa kasihan pada Pedagang yang setuju, karena pasar belum juga dibangun, karena masih ada selisih paham.

Selain itu untuk mendapatkan penghargaan dan prestasi tentunya para aparaturnya harus bekerja lebih baik lagi, dalam hal ini Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang mempunyai cara untuk menimbulkan semangat, kerja bagi aparaturnya, dan bisa di lihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

Kita evaluasi kita tiap bulan, sudah sampai dimana, jadi kita terbuka aja, tiap bulan itu ada indikator penilaian, dinilai dinas itu dari yang paling tinggi hingga rendah dan kita umumkan, mereka tahu semua, dan mereka silahkan protes kalau tidak cocok, dan mereka memang tidak bisa protes karena penilaiannya objektif, tiap bulan, sehingga mereka terpacu, umpamanya ada 20 dinas, jadi dia diurutan 20, nanti ada yang ngomel” yang urutan 20, 19 hati-hati” pemain cadangan sudah ada tuh, penilaian, diumumkan, mereka lihat sendiri, silahkan protes pada tim penilai(juri)...¹¹⁶

¹¹⁶Wawancara dengan Bapak Suir Syam Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Pernyataan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Walikota Padang Panjang Suir Syam mengadakan evaluasi setiap bulan, terkait dengan kinerja SKPD, dan diberi penilaian dari yang rendah sampai tertinggi. Penilaian ini diumumkan agar SKPD tahu dan silahkan protes pada tim penilaian, dan kenyataannya mereka tidak bisa protes karena penilaiannya objektif, sehingga hal ini memacu semangat mereka.

Dari hasil wawancara dengan Walikota Padang Panjang Suir Syam terlihat gambaran bahwa, keinginan beliau untuk memperbaiki kondisi pasar, karena merupakan salah satu jantung perekonomian masyarakat Kota Padang panjang. Beliau bertekad akan membangun pasar, di lihat dari kondisi beliau sudah berhasil mendatangkan orang ke Kota Padang Panjang, tetapi masih ada hal yang kurang. Jika ingin mendapatkan sebuah prestasi dan penghargaan maka aparturnya harus bisa bekerja dengan baik. Maka beliau mengadakan sistem evaluasi setiap bulan. Hal ini diumumkan agar seluruh aparturnya mengetahui dan menambah semangat mereka bekerja.

Untuk menguatkan apa yang dikemukakan oleh Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, mengenai sistem evaluasi kerja aparatur, hal ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Mawardi berikut ini :

Semua tugas yang diberikan dilakukan evaluasi, sejauh mana dinas-dinas atau bawahannya ini bisa bekerja sesuai dengan perencanaan dan apa yang diharapkan oleh walikota itu sendiri, semua SKPD nanti akan diberikan Raport, ada raport yang merah, ada yang kuning dan ada yang hijau, dengan dibuat begitu, kemudian nanti dikasih hadiah, misalkan

hadiahnya terakhir tujuh belas juta (17 Juta), ada laptop yang dikasihnya, macam-macam lah ganti-gantian dikasihnya, dan sekarang hampir sudah tidak ada yang nilainya merah, dengan adanya motivasi itu semua rata-rata 75 keatas, tapi walaupun dia tidak juara, tetap 75 keatas dia kan segan, dapat rapor merah, yang juara dikasih hadiah tapi yang tidak juara tidak pernah nilainya merah, dan yang kedua gunanya evaluasi agar setiap kegiatan yang bermasalah itu cepat ditanggulangi.¹¹⁷

Kepala Dinas Kesehatan, Mawardi mengemukakan bahwa, tugas yang di berikan di evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana Dinas atau bawahannya bekerja sesuai dengan yang direncanakan, dan hasil evaluasi itu di berikan penilaian dalam bentuk rapor, dan yang bagus nilainya diberi hadiah, dan tidak ada yang mendapat nilai tidak bagus. Dengan adanya evaluasi, maka setiap kegiatan yang bermasalah cepat dicari solusinya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas kesehatan, Mawardi, diketahui bahwa untuk meningkatkan kinerja aparaturnya, Kota Padang Panjang bisa meraih penghargaan dan prestasi, salah satunya dengan mengadakan sistem evaluasi, pada aparatur, ataupun bawahan. Jadi dengan adanya evaluasi ini, memotivasi bawahan untuk memperbaiki kinerja dan bisa mendapatkan sebuah prestasi, karena keseriusan dan semangat dari aparatur dan bawahannya.

Adanya penilaian evaluasi Kinerja SKPD Di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 710/07/WAKO-PP/2010. Bagi SKPD yang mendapat rangking maka akan diberikan uang pembinaan sebagai reward dengan rincian sebagai berikut :

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mawardi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Pada tanggal 23 Mei 2012, Pukul 14.30 WIB.

A. SKPD Pengumpul Pendapatan Daerah

1. Nomor Urut/ Rangkaing I : Rp. 3.500.000,-
2. Nomor Urut/ Rangkaing II : Rp. 3.000.000,-
3. Nomor Urut/ Rangkaing III : Rp. 2.500.000,-

B. SKPD Non Pengumpul Pendapatan Daerah

1. Nomor Urut/ Rangkaing I : Rp. 3.000.000,-
2. Nomor Urut/ Rangkaing II : Rp. 2.500.000,-
3. Nomor Urut/ Rangkaing III : Rp. 2.000.000,-

Untuk lebih lengkapnya, mengenai penetapan SKPD pemenang evaluasi kinerja SKPD di lingkungan pemerintah kota Padang Panjang dapat dilihat pada lampiran 8.

- b. Pemimpin diharapkan harus selalu mempunyai dorongan yang besar untuk dapat menyelesaikan sesuatu.**

Kemudian untuk memperjelas motivasi Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang untuk berprestasi dan mendapatkan dorongan dari siapa, hal ini dijelaskan oleh Wakil Walikota Padang Panjang, Edwin, sebagai berikut :

Faktor eksternal pasti ada, faktor internal dorongan dari pegawai, dari saya, itu motivasi bagi pemimpin untuk berbuat baik bagi daerahnya, kita tidak bisa bergerak, ada motivasi dari bapak wali, sebagai putra daerah untuk mensukseskan kotanya, dan membuat perubahan bagi daerahnya, dimana beliau ingin orang menuju tempat ke sekolah pasti Padang Panjang, kemudian masalah kesehatan, kiblatnya ke Padang Panjang.¹¹⁸

¹¹⁸Wawancara dengan Bapak Edwin, Wakil Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 3 Juni 2012, Pukul 12.30 WIB.

Dalam hal ini Wakil Walikota Padang Panjang, Edwin menjelaskan bahwa motivasi dan dorongan untuk berprestasi itu berasal dari faktor eksternal dan itu pasti ada. Sedangkan faktor internal adalah dorongan dari pegawai dan juga motivasi dari pemimpin untuk berbuat baik bagi daerahnya, dan ada motivasi dari Walikota Padang Panjang Suir Syam, karena beliau merupakan putra daerah, dan orang menuju tempat pendidikan pasti Padang Panjang, dan kesehatan menjadi kiblatnya.

Hal ini juga dipertegas oleh Ketua KAN Nagari Gunung, Doni Rahman, DT Simarajo, beliau menyampaikan sebagai berikut :

Beliau punya visi dan misi ketika terpilih, dan visi misi itu cocok, yang diusungnya itu, cocok dengan kota Padang Panjang, Serambi Mekkah, dalam hal apalagi menyangkut masalah adat, budaya, agama, mungkin beliau sangat menjunjung tinggi, apalagi beliau putra daerah disini, artinya memahami karakteristik masyarakatnya.¹¹⁹

Dari pernyataan diatas memberikan penjelasan, bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, ketika dipilih oleh masyarakat Kota Padang Panjang, mempunyai visi dan misi yang cocok untuk kota Padang Panjang, Serambi Mekkah dalam menyangkut masalah adat, budaya, agama, sangat menjunjung tinggi hal tersebut, dan sosok beliau yang sebagai putra daerah, yang sangat memahami karakteristik masyarakatnya.

Berdasarkan penjelasan dari sejumlah informan mengenai motivasi dan dorongan berprestasi Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang di atas,

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Doni Rahman, Ketua KAN Nagari Gunung, Pada tanggal 29 mei 2012.

kemudian peneliti melihat serta menganalisa dengan indikator selanjutnya, yaitu:

- a. Mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.
- b. Pemimpin berusaha bekerja untuk mendapatkan penghargaan yang instrinsik dibandingkan yang ekstrinsik.
- c. Pemimpin diharapkan harus selalu mempunyai dorongan yang besar untuk dapat menyelesaikan sesuatu.

Dari hasil temuan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa indikator yang dari motivasi dan dorongan berprestasi point a dan c yang menjadi karakteristik motivasi dan dorongan berprestasi, karena Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang mempunyai keinginan untuk membangun Kota Padang Panjang, dan ingin adanya suatu perubahan untuk masyarakat Kota Padang Panjang, peningkatan ekonomi menjadi salah satu motivasi utamanya. Dari sejumlah misinya, beliau mengarahkan untuk peningkatan bidang ekonomi, untuk mendatangkan masyarakat dari luar kota Padang Panjang, datang ke kota Padang Panjang.

Untuk meningkatkan kinerja para aparatur dan bawahannya agar mendapatkan hasil yang bagus, serta mendapatkan sejumlah penghargaan dan

prestasi Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang mengevaluasi satu kali dalam sebulan. Hal ini diumumkan dan diberi penilaian, dari yang tertinggi sampai yang terendah, oleh karena itu, ini memicu semangat kerja dari aparatur dan bawahannya, agar bekerja lebih baik, dan bisa menciptakan inovasi baru serta program yang berbeda, bernilai khas dari daerah lain.

Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, yang juga merupakan putra daerah asli kota Padang Panjang, mengerti akan karakteristik masyarakat yang di pimpinnya, temuan ini membuktikan bahwa seorang pemimpin harus mengerti karakteristik kejiwaan masyarakatnya, apa yang dibutuhkan masyarakatnya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, serta bisa mengendalikan masyarakatnya, karena pemimpin yang baik, dekat dengan masyarakat baik secara emosional maupun pemikiran, jadi mampu membawa daerah yang dipimpinnya lebih baik lagi.

4. Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

- a. Pemimpin mempunyai perhatian selalu mengetahui bawahan serta berorientasi pada bawahan.**

Berikutnya Peneliti akan menerangkan mengenai sikap- sikap hubungan kemanusiaan, dalam hal ini Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan

mampu berpihak kepadanya, mempunyai perhatian, harus selalu lebih mengetahui terhadap bawahannya dan dekat dengan para bawahannya.

Dalam hal ini peneliti akan membahasnya dari hasil wawancara dengan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

Dengan seluruh aparatur kita bilang, kita punya visi misi, kita punya rencana strategis, punya RPJMD, kemudian makanya untuk dinas-dinas ini kita cari orang yang mampu melaksanakan, nah biasanya kita melihat, kalau ini dengan dasar pendidikannya, keahliannya, pengalamannya, jadi dasar kita disana, kemudian kita arahkan.¹²⁰

Dari hasil wawancara dengan Walikota Padang Panjang Suir Syam, beliau menjelaskan bahwa untuk aparatur beliau katakan, dalam pemerintahan sudah ada visi dan misi, dan rencana strategis kemudian RPJMD, untuk Dinas-Dinas beliau mencari orang-orang yang mampu, yang bisa melaksanakan dan di lihat dari dasar pendidikan, keahlian serta pengalaman. 'Jadi itu dasar penerimaan aparatur, bagi yang ingin menduduki jabatan pemerintahan dan kemudian aparatur tersebut diarahkan oleh Walikota Padang Panjang Suir Syam.

Berkaitan dengan hal di atas, juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Budi hariyanto, berikut ini :

Beliau memang melakukan pendekatan dan memahami karakter bawahannya, tetapi tidak lepas dari pada aturan dan ketentuan yang berlaku, dan yang kedua karena beliau mempunyai visi misi tadi, tentunya seluruhnya akan mengacu pada visi misi, dan beliau sangat disiplin, dari segi disiplin keaktifan, kehadiran, disiplin masalah penyelesaian

¹²⁰Wawancara dengan Bapak Suir Syam, Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

pekerjaan, disiplin waktunya juga dan masalah berpakaian dan lain-lain.¹²¹

Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Budi hariyanto menjelaskan bahwa Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, melakukan pendekatan dan memahami karakter bawahan serta aparaturnya dan tetap pada aturan dan ketentuan yang ada, dan semua hal tersebut mengacu pada visi dan misi beliau, dan beliau sangat disiplin, hadir dan masalah penyelesaian, waktu dan berpakaian.

Selanjutnya Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang juga menjelaskan adanya pemberian *reward* tapi jarang juga memberikan *punishment* kepada aparaturnya, dari hasil wawancara berikut ini :

Jadi kepala dinas takut kalau mengajukan anggaran, harus mengerti, takut ditanya, jawabnya tidak tahu, jadi kepala dinas harus mengerti dengan programnya, dijalankan dengan anak buahnya, kepala dinas angguk-angguk saja, jadi kacau, nah kalau ada kepala dinas yang melenceng, kita panggil dan kita arahkan, dan saya memberikan *reward* untuk yang bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh, kalau yang tidak bersungguh-sungguh saya hanya melakukan pendekatan secara personal dan menanyakan dimana persoalannya dan tersendatnya, dan kita akan carikan solusi penyelesaiannya, jadi tidak ada bagi yang tidak bagus langsung diberhentikan, saya masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki...¹²²

Dari pernyataan Walikota Padang Panjang Suir Syam menjelaskan, bahwa bagi kepala dinas yang mengusulkan anggaran, harus mengerti dan juga para aparaturnya ada yang takut ditanya, karena apabila tidak mengerti, maka

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Budi hariyanto, Sekretaris daerah Kota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 10 Mei 2012, Pukul 09.15 WIB.

¹²² Wawancara dengan Bapak Suir Syam, Walikota Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 6 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

anggaran tersebut tidak diloloskan, dan harus mengerti dengan programnya. Kalau ada aparturnya yang melenceng diarahkan dan dilakukan pemanggilan.

Kemudian beliau juga memberikan *reward*, bagi aparturnya yang bekerja dengan baik dan serius, walaupun ada yang tidak bekerja dengan baik, beliau tidak begitu saja memberikan *punishment*, tetapi melakukan pendekatan secara personal. Dengan cara memanggil bawahan tersebut, serta memberikan sejumlah pertanyaan, dimana permasalahannya dan dicarikan solusinya.

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pasar Kota Padang Panjang, Iriansyah Tanjung, berikut ini :

Ada yang seperti itu, kalau *reward* kayaknya bapak itu biasa-biasa saja nggak terlalu berlebihan, misalnya bapak itu jarang memuji dia, tapi dia akan melakukan sesuatu, dan tidak saat itu, nah jadi orang itu bagus menurut dia, waktu itu dia tak kan memuji dia, tetapi beberapa lama setelah itu, mungkin kaget aja kan, sehingga pada saat ini saya berhasil membangun penampungan, saya nggak diberi sekarang ini, tapi dalam pikiran dia sudah ada nanti, mana yang lebih baik menurut dia, disitu kebijaksanaan dia, sedangkan sangsi rata-rata nggak ada, paling-paling saya kalau melihat lagi, tidak ada yang non job, paling dipindahkan, kalau daerah lain itu dia langsung copot jabatan kan, nggak ada mencopot-copot, jarang lah.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, beliau memberikan penjelasan bahwa, kalau dalam pemberian *reward* Walikota Padang Panjang Suir Syam, tidak berlebihan. Beliau melakukan sesuatu tidak pada saat itu, dan kalau ada aparturnya yang bekerja hasilnya bagus, pada waktu itu dia tidak akan memberikan pujian, tetapi lama setelah itu. Hal itu sudah ada dalam pikiran

¹²³ Wawancara dengan Bapak Iriansyah Tanjung, Kepala Kantor Pasar Kota Padang Panjang, Kantor Dinas Pasar Kota Padang Panjang, Pada tanggal 29 Mei 2012, Pukul 09.00 WIB.

beliau, disitu beliau terlihat bijaksana, untuk pemberian sangsi tidak ada, dan tidak ada yang dicopot, sangat jarang.

Berikut Di dalam PP No. 53 Tahun 2010 terdapat beberapa tingkat pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin menurut PP No. 53 Tahun 2010

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin		
Tingkat Ringan	Tingkat Sedang	Tingkat Berat
<ul style="list-style-type: none"> • Teguran lisan • Teguran tertulis • Pernyataan tidak puas secara tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunda Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun • Tunda Kenaikan Pangkat selama 1 tahun • Turun pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Turun Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah • Pelepasan dari jabatan • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS • Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

Sumber : Peraturan Pemerintah NO. 53 Tahun 2010 dari Badan Kepegawaian daerah Kota Padang Panjang.

Untuk lebih jelasnya mengenai hukuman disiplin menurut PP No.53 Tahun 2010, dapat dilihat pada lampiran 9.

Selanjutnya juga dijelaskan mengenai pembagian tingkat hukuman disiplin tersebut berdasarkan ketentuan kehadiran dan jam kerja, yang dijelaskan di dalam tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4
Ketentuan hukuman disiplin berdasarkan tidak masuk kerja dan
menaati jam kerja

Tidak masuk kerja	Hukuman Disiplin	Kategori
5 hari	Teguran lisan	
6 -10 hari	Teguran tertulis	Ringan
11 – 15 hari	Pernyataan tidak puas secara tertulis	
16 – 20 hari	Tunda Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun	
21 – 25 hari	Tunda Kenaikan Pangkat selama 1 tahun	Sedang
26 – 30 hari	Turun pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	
31 – 35 hari	Turun Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	
36 – 40 hari	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat
41 – 45 hari	Pelepasan dari jabatan	
46 hari / lebih	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS / PTDH	

Sumber : PP No. 53 Tahun 2010 dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang

Berikut Peneliti mempunyai data mengenai hukuman disiplin selama tahun 2011 sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin PNS dan PP Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS adalah sebanyak 35 orang dengan rincian, dapat di lihat pada tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Data mengenai hukuman disiplin selama tahun 2011

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah
1	Teguran Lisan	13 Orang
2	Teguran Tertulis	15 Orang
3	Pernyataan tidak puas secara tertulis	6 Orang
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	1 Orang
TOTAL		35 Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang.

Kemudian peneliti juga mewawancarai jurnalis kontributor Padang Panjang, Koran Padang Ekspres, mengenai kedekatan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dengan bawahannya sebagai berikut :

Inyo pandailo memposisikan bawahannya, pada posisi yang tepat, kepala SKPD betul-betul diseleksi ditempatkan, itu kelebihannyo dan bahkan kalau lun ado pengganti kepala SKPD Yang layak dengan posisi itu, mau tiga kali mutasi tidak akan beranjak, misalnya pak Mawardi” sampai kini belum ada yang menggantikan sosok pak Mawardi, nyo yang tagok sorang, belum ada yang menggantikan, bahkan sampai kepala sekolah, kalau berprestasi ditempatkan diposisi yang tepat...¹²⁴

Dalam Bahasa Indonesia :

Dia pintar memposisikan bawahannya, pada posisi yang tepat, kepala SKPD betul-betul diseleksi ditempatkan, itu kelebihannyo dan bahkan kalau belum ada pengganti kepala SKPD Yang layak dengan posisi itu, mau tiga kali mutasi tidak akan beranjak, misalnya pak Mawardi” sampai kini belum ada yang menggantikan sosok pak Mawardi, dia yang mampu sendiri, belum ada yang menggantikan, bahkan sampai kepala sekolah, kalau berprestasi ditempatkan diposisi yang tepat...

Dari hasil pernyataan di atas, Fadly menjelaskan bahwa Walikota Padang Panjang Suir Syam tahu bagaimana cara memposisikan bawahannya dengan tepat, kepala SKPD betul-betul diseleksi dengan tepat, itu kelebihan beliau, dan kalau belum ada sosok kepala SKPD yang menggantikan, mau tiga kali mutasi maka tidak akan berpindah, contohnya saja Kepala Dinas Kesehatan, Mawardi, sampai saat ini belum ada yang menggantikan posisi beliau, kalau berprestasi ditempatkan pada posisi yang tepat.

¹²⁴Wawancara dengan Fadly, Wartawan Padang Ekspres Kontributor Padang Panjang, Kantor Balai Kota Padang Panjang, Pada tanggal 7 Juni 2012, Pukul 11.30 WIB.

Untuk menguatkan data, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri, mengenai pemberian sanksi terhadap bawahan, sebagai berikut :

Beliau jadi walikota untuk membangun Padang Panjang, masyarakat secara keseluruhan bukan membangun pribadi atau siapapun, itu konsep dari awal. Kalau tidak betul orang ini beliau tegas, tapi luar biasa pertimbangannya, tapi tidak serta merta dia tidak suka dengan orang ini, hari itu juga dia nanti, tapi dia lihat dulu perkembangannya. Kalau tidak mungkin dia memindahkan ke SKPD yang lain.¹²⁵

Dari hasil wawancara di atas, Ketua DPRD Padang Panjang, Novi Hendri, menjelaskan bahwa Walikota Padang Panjang Suir Syam, menjadi Walikota untuk membangun masyarakatnya, bukan untuk membangun diri beliau sendiri, itu merupakan konsep dari awal. Kalau ada aparatur yang tidak benar, beliau sangat tegas dan mempunyai pertimbangan yang sangat luar biasa, tapi kalau beliau tidak suka maka di lihat terlebih dahulu pertimbangannya, dan kalau tidak mungkin dipindahkan ke SKPD yang lain, hanya dalam bentuk mutasi.

Dari seluruh hasil wawancara pada sub topik ini, peneliti melihat serta menganalisa dengan indikator terkait dengan Sikap-Sikap hubungan kemanusiaan, yaitu :

- a. Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya.
- b. Pemimpin mempunyai perhatian.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Novi Hendri, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Kantor DPRD Kota Padang Panjang, Pada tanggal 28 Mei 2012, Pukul 12.00 WIB.

- c. Pemimpin harus selalu lebih mengetahui terhadap bawahannya.
- d. Pemimpin perlu berorientasi kepada bawahannya.

Dari hasil temuan diatas, mengarahkan peneliti pada poin b, c dan d. alasan peneliti memilih poin b, c dan d bahwa dalam berinteraksi dengan bawahannya Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang sangat dekat, dan menjalin kedekatan secara *personal*, dan untuk penempatan aparatur dan bawahannya, beliau melakukan seleksi berdasarkan kemampuan, apakah aparatur dan bawahannya memiliki kemampuan pada bidang yang beliau tempatkan, selain sesuai kemampuan juga didasarkan pada keahlian, dalam hal ini sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki oleh aparaturnya, dan terakhir berdasarkan pengalamannya, *trade record* aparaturnya selama ini.

Kemudian Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang juga memberikan *reward*, untuk aparatur dan bawahan yang mempunyai prestasi dan tidak memutuskan memberikan *punishment* kepada aparatur yang bekerja tidak baik, hanya dilakukan pendekatan secara personal, kenapa aparaturnya sampai bekerja tidak baik, dan kemudian beliau memberikan pengarahan serta mencari solusi dari masalah tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan dan analisis serta sejumlah triangulasi data dan peneliti melakukan pengamatan selama penelitian diperoleh kesimpulan berdasarkan dari indikator dari teori sifat Keith Davis Kecerdasan, Kedewasaan dan Keleluasaan hubungan sosial, motivasi dan dorongan berprestasi serta sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh Walikota Padang Panjang, Suir Syam adalah berani, tegas, mempunyai inisiatif, pengetahuan yang luas, mempunyai ide dan gebrakan yang berbeda dari daerah lain, dan ketika ada persoalan yang sangat darurat, beliau bisa menemukan penyelesaiannya dengan meminta saran dari bawahan, serta mengkomunikasikan persoalan tersebut, berani mengambil keputusan dan resiko, mau bermusyawarah dan mufakat, mampu menjalin komunikasi yang akrab, peka terhadap lingkungan serta bawahan.

Untuk meningkatkan kinerja Para aparatur dan bawahannya agar mendapatkan hasil yang bagus, dan mendapatkan sejumlah penghargaan dan prestasi Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang mengevaluasi satu kali dalam sebulan, dan hal ini diumumkan dan diberi penilaian, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan hal ini memicu semangat kerja dari aparatur dan bawahannya, agar bekerja lebih baik,

dan bisa menciptakan inovasi baru serta program yang berbeda bernilai khas dari daerah lain.

B. Saran

Saran yang ingin diberikan oleh peneliti terutama untuk Walikota Padang Panjang agar menjalankan visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar janji-janji politik yang diberikan pada saat kampanye, agar ditepati pada masyarakat, yang telah mempercayakan Kepemimpinan kepada Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mampu mendalami mengenai tema Karakteristik Kepemimpinan, terutama dalam hal pengaruh karakteristik kepemimpinan, apakah yang mempengaruhinya, faktor internal atau eksternal dari pemimpin, karena menurut peneliti karakteristik kepemimpinan tersebut dua-duanya mempengaruhi, tapi mana yang lebih dominan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal, 2005, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*, Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Bungin, Burhan (Ed). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah.(Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini, 2001. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Kartono, Kartini, 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan:Apakah kepemimpinan Abnormal itu?*Jakarta:Rajawali Pers
- Kencana Inu, 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bandung,: PT RefikanAditama.
- Koesoema Doni, 2007. *Pendidikan Karakter*, Jakarta : PT Gramedia
- Kousez and Posner, 2000. *The leadership the chalenge (Tantangan Kepemimpinan)*, Jakarta : Erlangga (Edisi Ketiga).
- Maman Ukas, 1999. *Manajemen Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*, Bandung : Ossa Promo
- Mardalis,2006, *Metode Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Proposal*, Bandung:Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mounier, Emmanuel, *The Character Of Man*, Translate into English by chyntia Rowland, New York, Harper dan Brother

- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Penerbit Transito.
- N.K. Singh dan Mr. A.R. 2000. Agwan, *Encyclopaedia of the Holy Qur'an*, New Delhi : balaji Offset, Edisi I.
- Pamungkas Gangsar , 2011, *Tips dan Trik Dahsyat Menjadi Pemimpin Dahsyat*, Yogyakarta : Araska
- Pasolong Harbani, 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung : CV alfabeta
- Prayitno dan Belferik, 2011. *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta : PT Grasindo.
- Ramlan Surbakti. 2010, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rhonda Byrne. 2007, *The Secret*, Jakarta : PT Gramedia.
- Rivai Veithzal, 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Robbins S., 1996 *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, San Diego State University, diterbitkan oleh PT Prenhalinddo, Jakarta.
- Robert K. Yin, 2005, *Studi Kasus Design & Metode*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif : dasar-dasar dan aplikasi*, Malang: YA3.
- Saptono, 2011. *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter (wawasan strategi, dan langkah praktis)*, Jakarta : Erlangga.
- Simon Devung, 1998, *Pengantar ilmu administrasi dan manajemen*, Jakarta.
- Sugiono, 2005, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 1986. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali pers.
- Winardi, 2000, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wojowasito, Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris dengan ejaan yang disempurnakan*, Bandung : Penerbit Hasta.

Jurnal

Purwatiningtyas (1995), *Keberhasilan Kepemimpinan CEO di Indonesia*, Gema Stikubank vol 14 No.5 ISSN 332.105 .

Wahyuddin, Muhammad and A, Djumino (2002) Analisis Kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan. *Daya Saing*, 3 (1). pp. 13-24. ISSN 1411-3422.

SKRIPSI

Ase Kusuma Dewi. *Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Studi Pada Kenagarian Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok) .* Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND Padang. 2011.

Panca Putri, Ria. 2009. Skripsi *Tipe Kepemimpinan Wali Kota Padang periode 2004 - 2009 dalam mewujudkan Good Governance di Kota Padang - Sumatera Barat.* Padang: Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.

SUMBER LAIN

Buku Agenda Pemerintah Kota Padang Panjang
LKPD Akhir tahun Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2010
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

SITUS INTERNET

<http://antara-sumbar.com/eng/index.php?mod=berita&d=5&id=1007>, Redaksi Antara, 7 juli 2008. KPUD Padang Panjang tetapkan Suir Syam dan Edwin sebagai pemenang Pilkada.

<http://metropublika. /2008/12/01/peringatan-218-tahun-kota-padang-panjang/>, redaksi metropublika, 12 januari 2008, memperingati 218 tahun kota Padang Panjang.

<http://sumbaronline.com/pariwara/padang-panjang/>, Paul, 3 April 2008, Refleksi Kepemimpinan Wako Suir Syam.

<http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=1014>, Ryan Syair, 10 september 2008, Besok Suir Syam-Edwin dilantik Gubernur.

http://www.padangpanjangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=889:pemkot-padangpanjang-hujan-prestasi-dikotaserambimekkah=8&Itemid=474, Bagian humas Pemerintah Kota

Padang Panjang, Hujan Prestasi di kota Serambi Mekkah, situs resmi pemerintah Kota Padang Panjang.

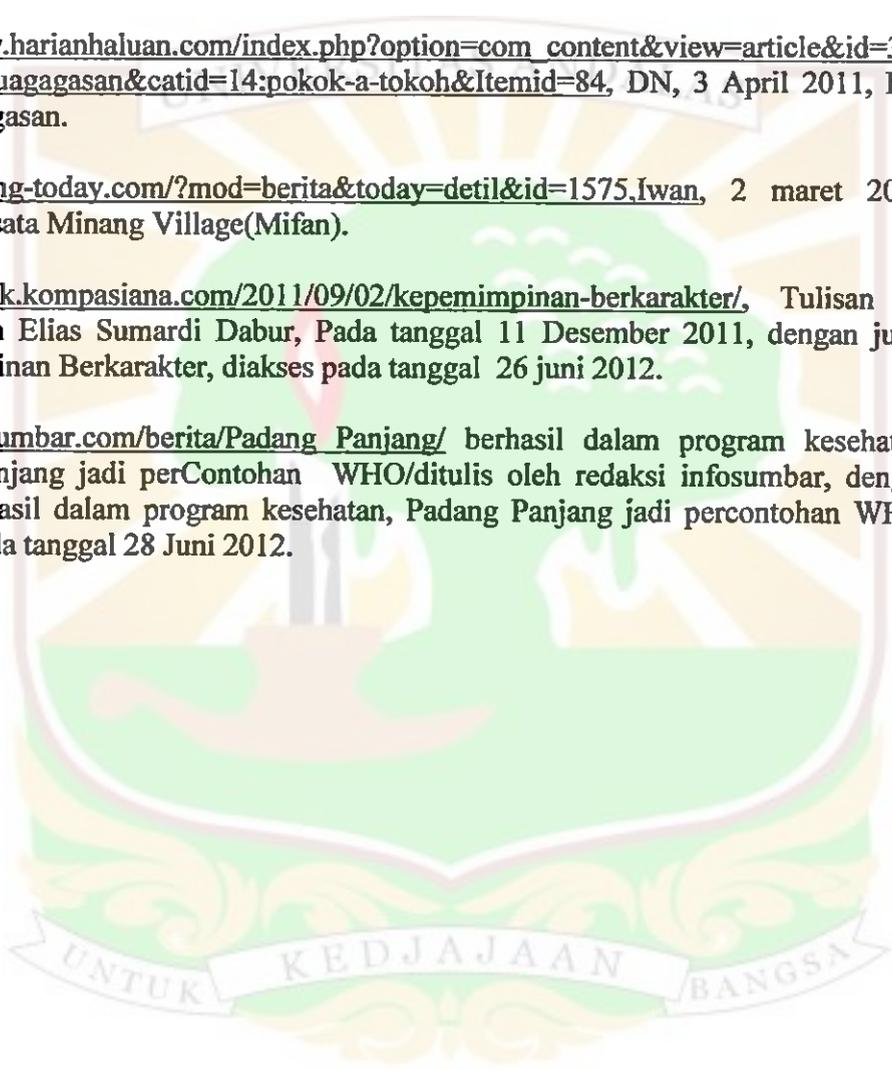
<http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=1014>, Iwan, 1 April 2011 Rumah Sakit Umum Daerah Bertaraf Internasional.

http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3110:duagagasan&catid=14:pokok-a-tokoh&Itemid=84, DN, 3 April 2011, Dua Gagasan.

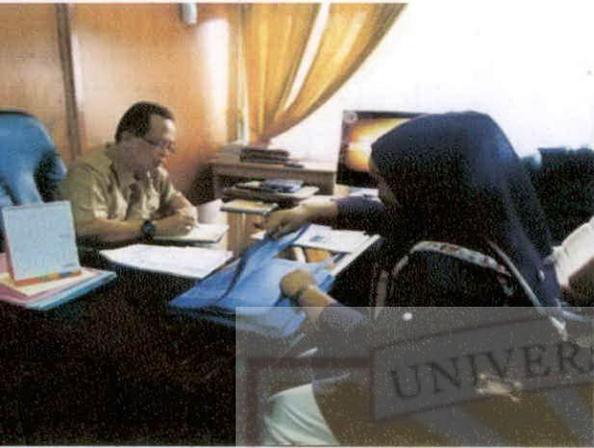
<http://padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=1575>, Iwan, 2 maret 2008, Wisata Minang Village(Mifan).

<http://politik.kompasiana.com/2011/09/02/kepemimpinan-berkarakter/>, Tulisan ini ditulis oleh Elias Sumardi Dabur, Pada tanggal 11 Desember 2011, dengan judul Kepemimpinan Berkarakter, diakses pada tanggal 26 juni 2012.

http://infosumbar.com/berita/Padang_Panjang/ berhasil dalam program kesehatan, Padang Panjang jadi perContohan WHO/ditulis oleh redaksi infosumbar, dengan judul, berhasil dalam program kesehatan, Padang Panjang jadi percontohan WHO, diakses pada tanggal 28 Juni 2012.



DOKUMENTASI



Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Budiarto, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Saharuddin, Staf ahli bagian hukum dan politik Padang Panjang



Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Kenedi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang

Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Mawardi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang



Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Reflis, Kepala Dinas Koperasi Kota Padang Panjang

Peneliti melakukan Wawancara bersama Bapak Rusdianto, Kepala BAPEDDA Kota Padang Panjang

DOKUMENTASI



Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Novi Hendri, Ketua DPRD Kota Padang Panjang



Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Iriansyah Tanjung, Kepala Dinas Pasar Kota Padang Panjang



Peneliti melakukan wawancara Bersama Bapak Doni Rahman Ketua KAN Nagari Gunung Kota Padang Panjang

DOKUMENTASI



Peneliti mengikuti kegiatan Bapak Suir Syam, yakni Silaturahmi dengan beberapa SKPD Kota Padang Panjang, Pada tanggal 4 Juli 2012



Peneliti Mengikuti Acara Serah terima Piala Adipura Untuk Kota Padang Panjang, bersama Tim Kebersihan Kota Padang Panjang

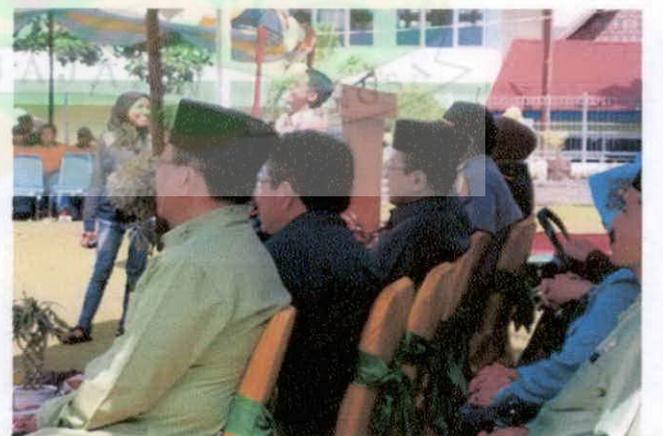
DOKUMENTASI



Wakil Wali Kota mengikuti Makan Bersama, dalam rangka penyambutan Piala Adipura bersama Bapak Suir Syam, Walikota Padang Panjang dan staf PEMKO, Tim Kebersihan Kota Padang Panjang



Wakil Wali Kota mengikuti kegiatan Bapak Suir Syam, Walikota Padang Panjang Memperingati Hari Lingkungan Hidup, Hari Keanekaragaman Hayati dan Hari Tembakau terlihat Bapak Suir Syam memberikan Pidato, dan memberikan hadiah bagi tim Kebersihan teladan dan SKPD yang mendukung program kegiatan tersebut.

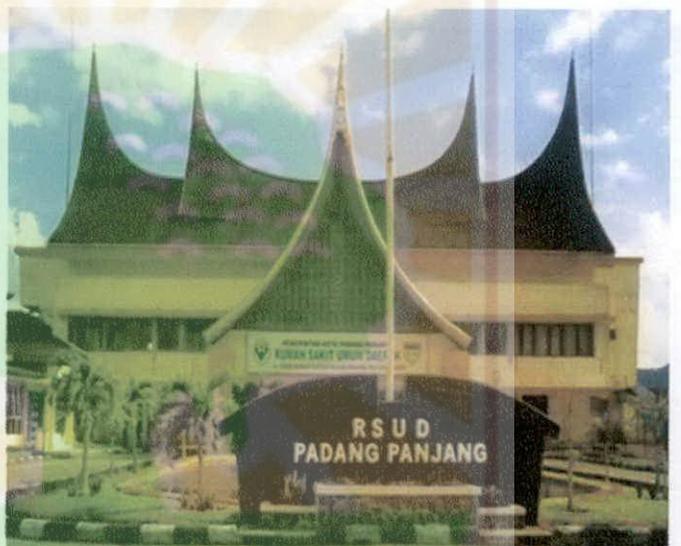


Walaupun cuaca terik dan angin berhembus kencang, namun acara tetap berjalan lancar, dan sangat hikmat

DOKUMENTASI



aman Kota Padang Panjang, Peneliti sangat senang berada disini, lokasinya yang bersih, sejuk dan tenang, bisa tempat untuk beristirahat



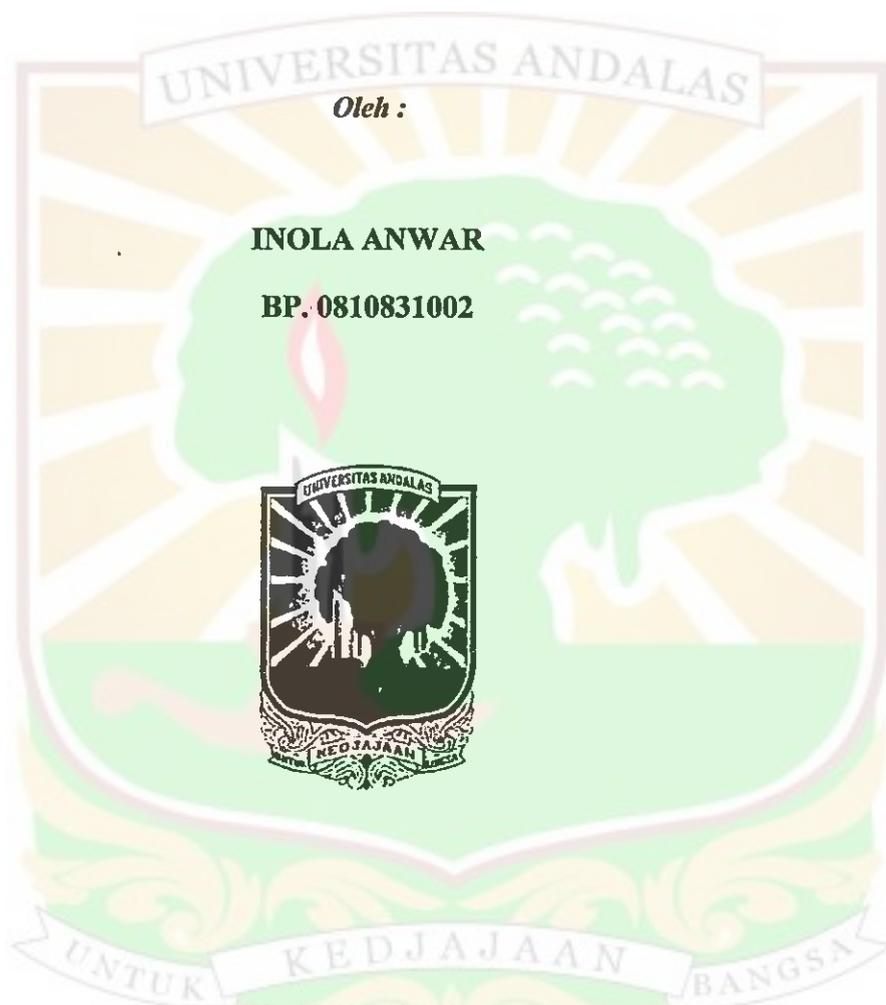
Kawasan Tanpa asap rokok, dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang panjang yang sangat representatif



Bagian Dalam Ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang

PEDOMAN WAWANCARA

KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN SUIR SYAM SEBAGAI WALIKOTA PADANG PANJANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



INOLA ANWAR

BP. 0810831002

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

1. Pertanyaan untuk Informan Biasa.

A. Karakteristik dan tingkah laku pemimpin.

- Se jauh mana Bapak/Ibu mengenal dan mengetahui tentang sifat mental serta kepribadian Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang, dan bagaimana perilaku keseharian Karakteristik (sifat, mental, kepribadian) beliau ketika menghadapi dan memimpin aparatur pemerintahan beliau?
- Apakah menurut bapak, Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang berhasil dalam menyelenggarakan pemerintahan (sebutkan keberhasilan dan apa yang menyebabkan keberhasilan itu terwujud) ?

B. Pengambilan Keputusan.

- Dalam hal pengambilan keputusan Bagaimana cara yang dilakukan oleh bapak Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam proses pengambilan keputusan?
- Bagaimana cara yang dilakukan oleh Bapak Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam Pembuatan sebuah kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi yang Bapak/Ibu duduki ?

C. Standar dan metode pelaksanaan tugas dan fungsi.

- Bagaimanakah aturan yang diberikan oleh Bapak Suir Syam dalam melaksanakan fungsi dan tugas, dari Instansi yang Bapak/Ibu duduki ?

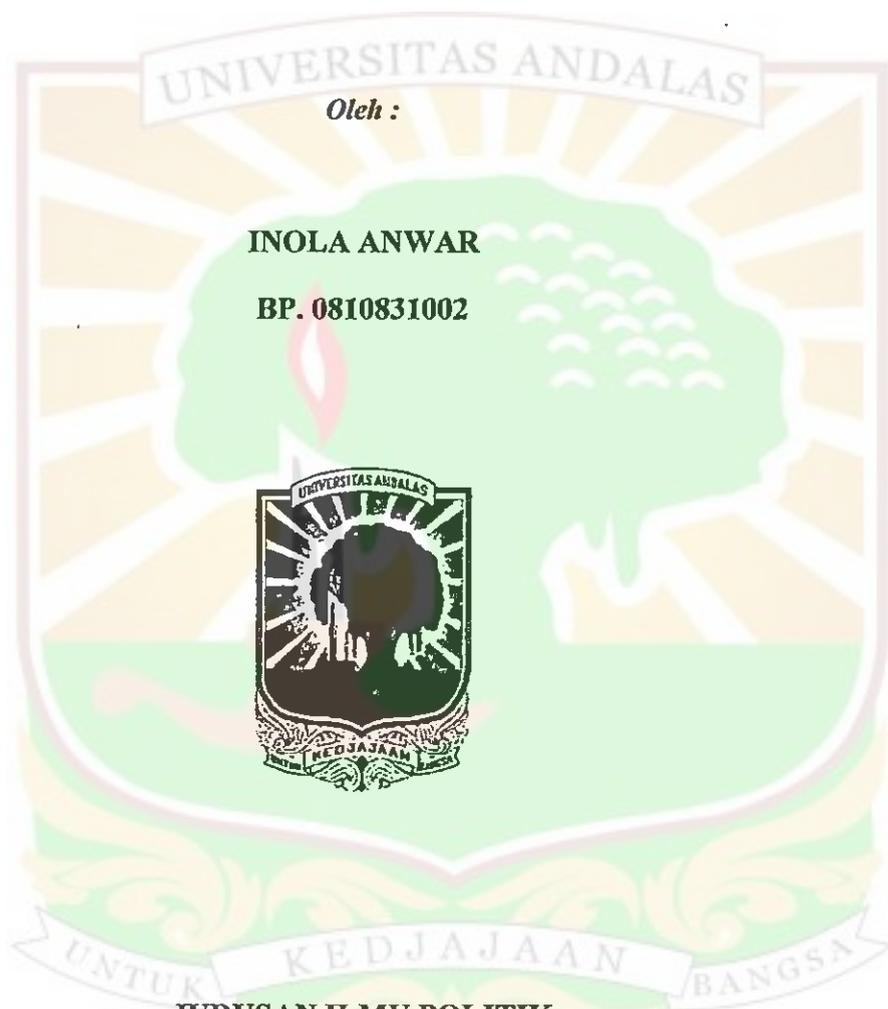
- Bagaimanakah cara Bapak Suir Syam dalam memberikan motivasi kepada aparatur pemerintahannya untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas sehingga mencapai sebuah keberhasilan ?
- Bagaimana tindakan Bapak Suir Syam dalam menyikapi pelanggaran dan kesalahan aparaturnya dalam melaksanakan tugas?
- Bagaimana Bapak Suir Syam memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan kinerja aparaturnya yang dinilai sangat baik (Reward) ?
- Bagaimana Bapak Suir Syam menanggapi kritikan dan saran serta masukan yang diberikan oleh aparatur beliau terhadap suatu hal yang akan dilakukan di dalam pemerintahannya sebagai Walikota Padang Panjang ?
- Dalam kepemimpinan Walikota Padang Panjang, bagaimana kordinasi dengan bawahan , apakah berjalan dengan baik ?

D. Penilaian aparatur terhadap Kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang.

- Dengan cara kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Suir Syam selama ini, menurut Bapak apakah hal itu telah Berhasil dan menghasilkan kinerja yang baik dari para aparatur pemerintahannya, terutama dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat Kota Padang Panjang ?

PEDOMAN WAWANCARA

**KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN SUIR SYAM SEBAGAI WALIKOTA PADANG
PANJANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**



INOLA ANWAR

BP. 0810831002

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

PEDOMAN WAWANCARA

1. Draft Pertanyaan

A. Karakteristik Kepemimpinan Walikota Padang Panjang

a. Kecerdasan.

- Selama kepemimpinan bapak dalam pemerintahan, pasti ada menemukan permasalahan dan halangan, Bagaimana tindakan bapak dalam menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan ?
- Ide bapak mengeluarkan kebijakan rokok pastinya akan menimbulkan pro dan kontra, dan setelah kebijakan tersebut sah ”berupa sebuah peraturan” bagaimana bapak bisa meyakinkan pihak legislatif, dan masyarakat perokok pasif khususnya agar menerima kebijakan tersebut ?
- Apa dasar pemikiran bapak dalam mengkonsep “mifan” menjadi wisata keluarga dan tidak melepaskan kebudayaan minangkabau?
- Bagaimana cara bapak memelihara hubungan baik dengan bawahan , sehingga terciptanya kondisi kerja yang kondusif dan nyaman, serta para bawahan bersemangat untuk menjadikan pemerintahan kota Padang Panjang berhasil mewujudkan visi dan misi dalam pembangunan ?
- Apakah bapak memberikan reward and punishment terhadap Kepala dinas yang berprestasi atau mampu melaksanakan program dengan sukses dan memberikan punishment terhadap kepala dinas yang gagal menjalankan program?

b. Kedewasaan dan kelulasaan hubungan sosial.

- Bagaimana cara bapak mengendalikan emosi, jika ada pihak yang berusaha merusak citra kepemimpinan bapak ?
- Selama bapak memimpin apakah pernah terjadi demonstrasi mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Dan apa tindakan yang bapak lakukan dalam meredam demonstrasi tersebut ?
- Dalam hal memimpin, ketika bapak memberi tugas pada bawahan, jika bawahan tersebut salah dalam bertindak, apakah bapak marah atau memberhentikan bawahan tersebut ?
- Apakah bapak mengetahui tentang sifat, watak dan perilaku bawahan bapak dalam bertugas ?
- Apakah bapak dapat mengenali kelemahan dan kekuatan setiap bawahan, tujuannya agar bisa menempatkan bawahan pada bidang yang sesuai dengan kemampuan bawahan, (penempatan pegawai sesuai bidangnya)
- Dalam hal mengambil keputusan, bagaimana cara bapak meyakinkan bawahan akan kebenaran dari keputusan tersebut, dan masyarakat mendukung keputusan tersebut ?

c. Motivasi diri dan dorongan berprestasi.

- Apakah bapak mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi selama kepemimpinan bapak, terlihat dari banyak memperoleh penghargaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan ?
- Dalam memimpin, bagaimana cara bapak membangkitkan optimisme, semangat bawahan dalam menyelenggarakan pemerintahan ?

d. Sikap hubungan kemanusiaan.

- Apakah dalam memimpin, para bawahan selalu menyerahkan apapun keputusan yang bapak ambil dan menyerahkan sepenuhnya kepada bapak?
- Apakah bapak memberikan apresiasi terhadap kepala dinas yang berhasil menjalankan program dengan berhasil ?
- Dalam menjalin hubungan dengan bawahan, apakah bapak bersikap seperti atasan dan bawahan atau seperti keluarga, berjalan dengan baik ?
- Apakah bapak menepati janji politik pada masyarakat selama kepemimpinan bapak ?

B. Cara pengambilan keputusan.

- Bagaimana cara yang Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan sebuah kebijakan?

C. Standar dan metode pelaksanaan tugas.

- Bagaimana cara Bapak memberikan penilaian terhadap hasil kerja aparatur pemerintahan Bapak dan bagaimana aturan yang Bapak terapkan terhadap mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing?

D. Pola komunikasi antara pemimpin dengan bawahan

- Bagaimana Bapak menyikapi saran dan masukan yang diberikan oleh aparatur Bapak terhadap suatu hal yang akan dilakukan di dalam pemerintahan Bapak sebagai Walikota Padang Panjang ?

BIODATA**ETERANGAN PERORANGAN**

Nama lengkap	: SUIR SYAM
Alamat	: Walikota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat
Keputusan Pengangkatan	: 131.13-615
Pejabat yang Mengangkat	: Menteri Dalam Negeri
Tanggal di Lantik	: 15 Agustus 2008
Tanggal lahir	: 03 Desember 1949
Tempat lahir	: Padang Panjang
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Alamat Rumah	: Jl. H. Agus Salim RT VI Kel Guguk Malintang Kota Padang Panjang Telp (0752) 82501
Alamat Kantor	: Jl. ST Syahrir No 178 Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang Telp (0752) 82002
Nomor Hand Phone	: 0811665252
Keterangan Fisik	
a. Tinggi	: 162 cm
b. Berat	: 66 kg
c. Rambut	: lkal
d. Bentuk Muka	: Bulat
e. Kulit	: Sawo Matang

PENDIDIKAN UMUM

1 SD

a. Nama Pendidikan : SR NO 7

b. Tahun Kelulusan : 1962/1963

c. Tempat Pendidikan : Padang Panjang

2 SLTP

a. Nama Pendidikan : SMP 2

b. Tahun Kelulusan : 1966

c. Tempat Pendidikan : PADANG PANJANG

3 SLTA

a. Nama Pendidikan : SMA NEGERI 1

b. Tahun Kelulusan : 1969

c. Tempat Pendidikan : BUKITTINGGI

4 SI

a. Nama Pendidikan : FAK KEDOKTERAN UNAND

b. Tahun Kelulusan : 1979

c. Tempat Pendidikan : PADANG

5 S2

a. Nama Pendidikan : MAGISTER MANAJEMEN RS

b. Tahun Kelulusan : 2001

c. Tempat Pendidikan : JOGJAKARTA

1 DIKLAT SPAMA

a. Lamanya : 3 (tiga) bulan

b. Tahun Kelulusan : 1997

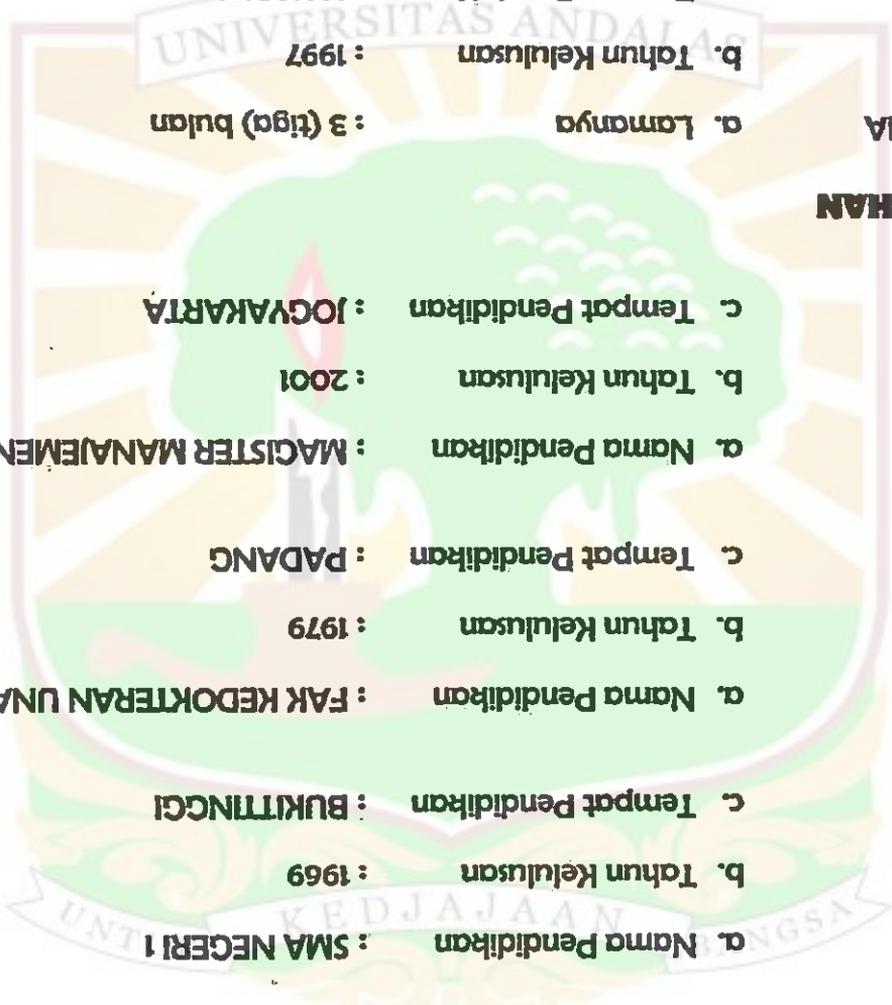
c. Tempat Pendidikan : JAKARTA

2 DIKLAT SPAMEN

a. Lamanya : 3 (tiga) bulan

b. Tahun Kelulusan : 2000

c. Tempat Pendidikan : JAKARTA



- 3 DIKLAT PIMPINAN a. Lamanya : 6 (Enam) hari
PEMERINTAH DAERAH b. Tahun Kelulusan : 2003
c. Tempat Pendidikan : JAKARTA

RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN

- 1 KEPALA PUSKES a. Waktu : 1980 s/d 1987
MAS SITIUNG I b. Tempat : Sitiung
KAB SWL/SJJ c. SK Pengangkatan : 825/SEKR.KEPEG/80
Tanggal 12 Desember 1980
- 2 KEPALA PUSKES a. Waktu : 1987 s/d 1990
MAS SEI DAREH b. Tempat : Sungai Dareh
KAB SWL/SJJ c. SK Pengangkatan : UP.1783/5/KES-1987
Tanggal 10 September 1987
- 3 KEPALA PUSKES a. Waktu : 1990 s/d 1991
MAS KOTO BARU b. Tempat : Koto Baru
KAB SWL/SJJ c. SK Pengangkatan : UP.1743/5/KES-1990
Tanggal 4 Agustus 1990
- 4 DIREKTUR RSUD a. Waktu : 1991 s/d 1996
SUNGAI DAREH b. Tempat : Sungai Dareh
KAB SWL/SJJ c. SK Pengangkatan : UP.1008/5/KES-1991
Tanggal 29 Juli 1991
- 5 DIREKTUR RSUD a. Waktu : 1996 s/d 2000
ADNAN W.D b. Tempat : Payakumbuh
PAYAKUMBUH c. SK Pengangkatan : UP.623/5/KES-1996
Tanggal 3 Juni 1996

- 6 **DIREKTUR RS** a. Waktu : 2000 s/d 2003
AHMAD MUCHTAR b. Tempat : Bukittinggi
BUKITTINGGI c. SK Pengangkatan : 823.212.2-4384
Tanggal 16 Oktober 2000
- 7 **WALIKOTA** a. Waktu : 2003 s/d 2008
PADANG PANJANG b. Tempat : Padang Panjang
c. SK Pengangkatan : 131.23-481
Tanggal 8 September 2003

- 8 **WALIKOTA** a. Waktu : 2008 s/d 2013
PADANG PANJANG b. Tempat : Padang Panjang
c. SK Pengangkatan : 131.13-615
Tanggal 15 Agustus 2008

TANDA JASA/PENGHARGAAN

- 1 Penghargaan atas a. Tahun Perolehan : 1982
Prestasi yg dicapai b. Negara/Instansi : Gubernur Sumbar
dalam mengikuti Pemberi
Pemilihan. Dokter
Teladan TK I Sumbar
- 2 Penghargaan Sebagai a. Tahun Perolehan : 1982
Dokter Puskesmas b. Negara/Instansi : Menteri Kesehatan RI
Teladan Pemberi
- 3 Penghargaan Piagam a. Tahun Perolehan : 1994
III Unit Kerja b. Negara/Instansi : Gubernur Sumbar
Percontohan Pemberi
Pelayanan Umum
- 4 Piagam III Rumah a. Tahun Perolehan : 1995
Sakit Sayang Bayi b. Negara/Instansi : Presiden RI
Tingkat Nasional Pemberi

- 5 Piagam I Penampihan a. Tahun Perolehan : 1997
 Kerja Rumah Sakit b. Negara/Instansi : Gubernur Sumbar
 Type C Pemberi
- 6 Piagam I Manajemen a. Tahun Perolehan : 1998
 Rumah Sakit Kelas C b. Negara/Instansi : Gubernur Sumbar
 Pemberi
- 7 Piagam Pelayanan a. Tahun Perolehan : 2001
 Umum Percontohan b. Negara/Instansi : Menteri PAN
 Pemberi
- 8 Piada Pelayanan a. Tahun Perolehan : 2002
 Umum Percontohan b. Instansi Pemberi : Presiden RI
- 9 Memperoleh Grant a. Tahun Perolehan : 2003
 atas b. Negara/Instansi : Mendiknas RI
 keberhasilan penuntasan W/A/R 9
 Tahun
- 10 Piada WTN a. Tahun Perolehan : 2005, 2006, 2007 dan 2009
 b. Negara/Instansi : Presiden RI
 Pemberi
- 11 Piada Adipura a. Tahun Perolehan : 2003 s/d 2010
 sebanyak 7 kali b. Negara/Instansi : Presiden RI
 Pemberi
- 12 Penghargaan Bhakti a. Tahun Perolehan : 2006
 Koperasi dan UKM b. Negara/Instansi : Presiden RI
 Pemberi
- 13 Peringkat Pertama a. Tahun Perolehan : 2006
 Pelayanan Kesehatan b. Negara/Instansi : Menteri PAN dan GTZ
 melalui Penilaian Pemberi
 Kementerian PAN dan
 GTZ

- 14 Satyaencana bidang Koperasi a. Tahun Perolehan : 2007
b. Instansi Pemberi : Presiden RI
- 15 Penghargaan Swasti Shaba Wiwerda a. Tahun Perolehan : 2007 dan 2009
b. Instansi Pemberi : Menteri Kesehatan RI
- 17 Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Arutala a. Tahun Perolehan : Tahun 2009
b. Negara/Instansi Pemberi : Menteri Kesehatan RI
- 18 Penghargaan Perlindungan Anak Nasional terhadap Bahaya Rokok a. Tahun Perolehan : Tahun 2010
b. Negara/Instansi Pemberi : Menteri Kesehatan RI
- 19 Penghargaan Award Askes a. Tahun Perolehan : Tahun 2010
b. Instansi Pemberi : Menteri Kesehatan RI
- 17 Sebagai Pembicara pd Seminar Nasional 8 Tahun Desentralisasi Bidang Kesehatan di Indonesia Tahun 2009 a.. Tahun Pelaksanaan : 2009
- 18 Sebagai Pembicara pd acara LUNG HEALTH WORKSHOP di Kota Bogor a.. Tahun Pelaksanaan : 2009
- 18 Sebagai Pembicara pd Seminar Nasional tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Jakarta a. Tahun Pelaksanaan : 2009

PENGALAMAN KE LUAR NEGERI

- 1 Studi Banding Tentang a. Negara : Jerman
Tata Cara Pilkada b. Lamanya : 9 (Sembilan) hari
Langsung

KETERANGAN KELUARGA

- 1 Isteri
- a. Nama lengkap : Ellya Warni Suir Syam
 - b. Tempat lahir : Padang Panjang
 - c. Tanggal lahir : 4 Juni 1956
 - d. Tanggal Nikah : 12 Agustus 1974
 - e. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 2 Anak Kandung 1
- a. Nama lengkap : Alvi Sena, ST
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Tempat lahir : Padang Panjang
 - d. Tanggal lahir : 25 Agustus 1975
 - e. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 3 Anak Kandung 2
- a. Nama lengkap : Ahmad Fadly
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Tempat lahir : Padang Panjang
 - d. Tanggal lahir : 28 September 1977
 - e. Pekerjaan : Wiraswasta
- 4 Anak Kandung 3
- a. Nama lengkap : Rahmi, STP
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Tempat lahir : Padang Panjang
 - d. Tanggal lahir : 13 Desember 1979
 - e. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

5 Anak Kandung 4

- a. Nama lengkap : Novita Witri, SH
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat lahir : Bukittinggi
- d. Tanggal lahir : 5 November 1982
- e. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

6 Anak Kandung 5

- a. Nama lengkap : dr. Estelita
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat lahir : Bukittinggi
- d. Tanggal lahir : 3 Maret 1985
- e. Pekerjaan : Dokter

7 Anak Kandung 6

- a. Nama lengkap : Ahmad Hadi, S.Ip
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Tempat lahir : Bukittinggi
- d. Tanggal lahir : 24 November 1988
- e. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

8 Anak Kandung 7

- a. Nama lengkap : Miftahul Jannah
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat lahir : Bukittinggi
- d. Tanggal lahir : 30 Juli 1990
- e. Pekerjaan : Mahasiswa

9 Bapak Kandung

- a. Nama lengkap : Syamsuddin
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Tempat lahir : Padang Panjang
- d. Tanggal lahir : 1920
- e. Pekerjaan : Almarhum

10 Ibu Kandung

- a. Nama lengkap : Dahniar
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat lahir : Padang Panjang
- d. Tanggal lahir : 1924
- e. Pekerjaan : Almarhumah

11 Bapak Mertua

- a. Nama lengkap : Mustafa Gani
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Tempat lahir : Padang Panjang
- d. Tanggal lahir : 1923
- e. Pekerjaan : Almarhum

12 Ibu Mertua

- a. Nama lengkap : Syamsinar
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat lahir : Padang Panjang
- d. Tanggal lahir : 1926
- e. Pekerjaan : Almarhumah

KETERANGAN ORGANISASI

1 KUD SUNGAI DAREH

- a. Kedudukan : Ketua
- b. Lamanya : 1987 s/d 1990
- c. Tempat : Kab. Sawahlunto/Sijunjung

2 KPN KESEHATAN
KAB. SAWAH LUNTO/
SIJUNJUNG

- a. Kedudukan : Ketua
- b. Lamanya : 1990 s/d 1996
- c. Tempat : Kab. Sawahlunto/Sijunjung

- 3 PONDOK PESANTREN a. Kedudukan : Wakil Ketua
BUSTANUL ULUM b. Lamanya : 1991 s/d 1992
c. Tempat : Kab. Sawahlunto/Sijunjung
- 4 ORARI SAWAHLUNTO a. Kedudukan : Ketua
SIJUNJUNG b. Lamanya : 1992 s/d 1997
c. Tempat : Kab. Sawahlunto/Sijunjung
- 5 PONDOK PESANTREN a. Kedudukan : Pembina
DARUL SALAM b. Lamanya : 1992 s/d 1993
c. Tempat : Kab. Sawahlunto/Sijunjung
- 6 IDI CABANG a. Kedudukan : Ketua
SAWAH LUNTO b. Lamanya : 1993 s/d 1997
c. Tempat : Sawahlunto
- 7 IDI CABANG a. Kedudukan : Wakil Ketua
PAYAKUMBUH b. Lamanya : 1997 s/d 2001
c. Tempat : Payakumbuh
- 8 PONDOK PESANTREN a. Kedudukan : Ketua
THAWALIB GUNUNG b. Lamanya : 2001 s/d Sekarang
c. Tempat : Padang Panjang
- 9 ASOSIASI RUMAH a. Kedudukan : Ketua
SAKIT DAERAH b. Lamanya : 2001 s/d 2003
(ARSASDA) SUMBAR c. Tempat : Padang

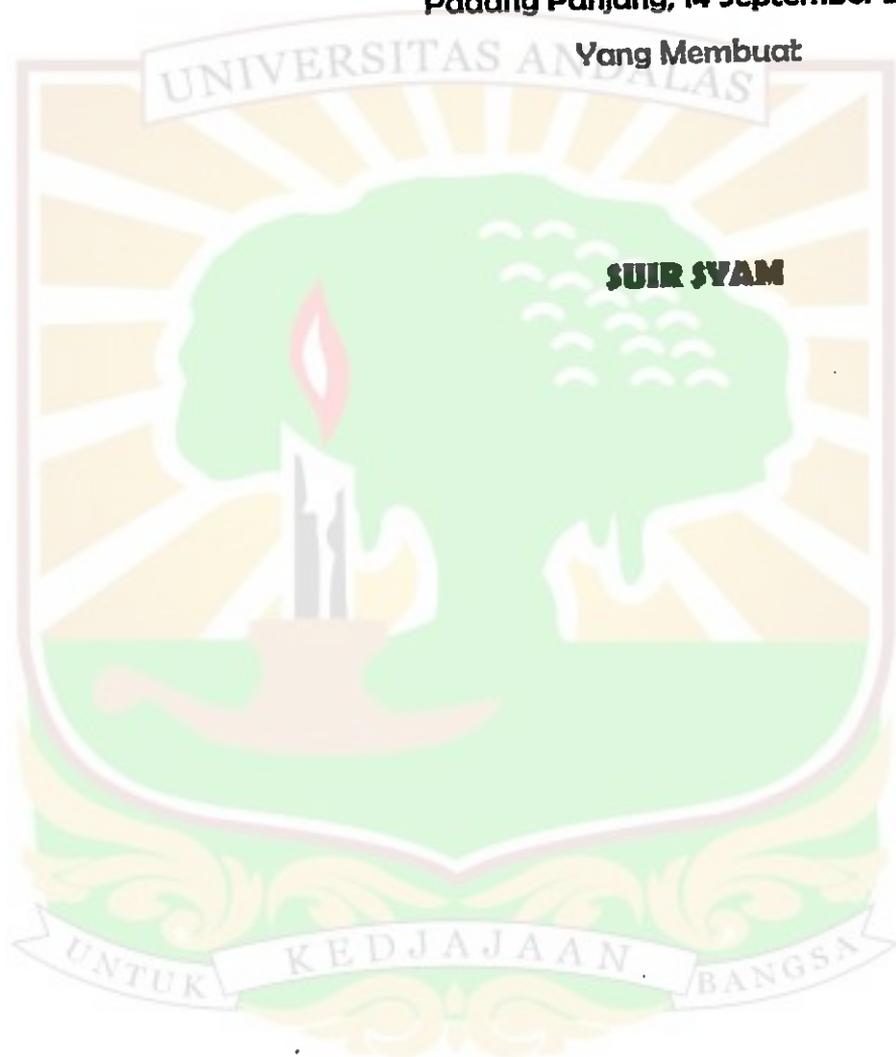
ALIANSI STRATEGIK
RUMAH SAKIT
SUMBAR

- a. Kedudukan : Ketua
b. Lamanya : 2002 s/d 2003
c. Tempat : Padang

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
mana perlunya.

Padang Panjang, 14 September 2010

Yang Membuat



Lampiran : PRESTASI PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010

I. Tingkat Nasional

1. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Penghargaan Juara Tertib Lalu Lintas Tingkat Nasional Tahun 2010.
2. Piala Adipura Bidang Kebersihan Kota Tahun 2010.
3. Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tingkat Nasional dipusatkan di Padang Panjang dan WHO memberikan 'No Tobacco Award'.
4. Penghargaan Karya Bhakti Husada sebagai Kepala Daerah yang menuju Padang Panjang Sehat dengan melarang iklan rokok.
5. Penghargaan Manggala Bhakti Husada melalui Ketua TP PKK atas dukungan kebijakan yang diambil Walikota dengan memberikan penghargaan kepada Kepala Keluarga (KK) yang berhenti merokok 2010.
6. Penghargaan Peringkat I Ketahanan Pangan untuk Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota Tingkat Nasional Tahun 2010.
7. Penghargaan Tingkat Nasional untuk Ketua PKK di Bidang Kesehatan Manggala Karya Bakti Usada.
8. Penghargaan dari Presiden RI atas Hasil UASBN Tingkat SD di Sumatera Barat An.Yogi Syaputra (Pelajar SDN 04 Guguk Malintang).
9. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyampaian LAKIP tepat waktu.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 memperoleh opini " **WAJAR DENGAN PENGECUALIAN** " dari BPK-RI.
11. Juara 1 Cerdas Cermat SLTA Tingkat Nasional di bidang UUD'45, bulan September 2010 (SMA Negeri 1 Padang Panjang).
12. Juara 1 Cerdas Cermat SLTA Tingkat Nasional di bidang UUD'45, bulan September 2010 (SMA Negeri 1 Padang Panjang).
13. Perolehan 3 Perunggu OSN (Orientasi Siswa Nasional) – (SMA 1 Padang Panjang).
14. Medali perak OSN (Orientasi Siswa Nasional) - (SMP 5 Padang Panjang).
15. Medali emas Festival Lomba Seni Sastra Nasional (FLS2N).

16. Juara I Lomba Olimpiade Bahasa Jerman An. Orintya Adi Yuska (Siswa SMAN 1).
17. Juara I Lomba Tanaman Hias Kategori Sansivera Tingkat Nasional.
18. Medali Emas PL2SN Bidang Tari An. M. Rizki Maesa dan Bayu Endri Pumama (Siswa SMAN 1).
19. Medali Emas Renang PORNAS SOINA An. Fatimah dan Lisa Arianti (Siswa PLB).
20. Juara II LCC Pertambangan dan Energi An. Fhani El Shara (Siswa SMAN 1).
21. Juara II Lomba Karya Tulis di ITB An. Rahmah Yulam Sari (Siswa SMAN 1).
22. Juara II Tk Nasional Kemitraan PAUD yang dikelola oleh PKK Tahun 2010.
23. Medali Perak OOSN Bidang Matematika An. M.AI Kahfi (SMPN 5).
24. Juara III Dokter Hewan berprestasi Tingkat Nasional an. drh. Indra.
25. Juara III Lomba Karya Tulis di ITB An. Fauziah Muchlis (Siswa SMAN 1).
26. Medali Perunggu OSN Bidang Matematika An. Fuad Ikhwanda (Siswa SMAN 1).
27. Medali Perunggu OSN Bidang Fisika An. Imam Suandi (Siswa SMAN 1)
28. Medali Perunggu OSN Bidang Komputer an. Kurniagusta Dwinto (Siswa SMAN 1).
29. Medali Perunggu OSN Bidang Matematika (Inklusi) An. Rahmadhona (Siswa SMPN 5).
30. Medali Perunggu Bolakaki PORNAS SOINA An. Sri Rizkiyanto (Siswa PLB).
31. Harapan I LSS Tingkat Nasional yang diraih oleh SMAN 2 Padang Panjang Tahun 2010.
32. Berprestasi Tingkat Nasional Kopontren Diniyah Puteri tahun 2010.
33. Pemutahiran data penduduk dan pemberian NIK tepat waktu dari dana APBN..
34. Terpilihnya utusan anak dari Kota Padang Panjang An. Sandy Elvindri Siswa SMK 1 Padang Panjang sebagai Ketua/Pimpinan Kongres pada

Kongres Anak Tingkat Nasional di Jakarta dalam Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2010.

II. Tingkat Propinsi Sumatera Barat

1. Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan untuk Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 sebagai peringkat I.
2. Juara Umum Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Jambore PKK/IMP Tahun 2010.
3. Peringkat II pada Pekan Olah Raga Provinsi ke XI Tahun 2010
4. Juara Umum Olah Raga, Seni dan SDM pada Acara Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Livestock Expo Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
5. Juara I Kelompok PIK KRR Tahap Tegak dalam rangka HARGANAS atas Kelompok PIK KRR SMAN 1 Padang Panjang.
6. Juara I Kader BKB dalam rangka Peringatan Hari Ibu An. Dewi Oktavia dari Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat.
7. Juara I Dokter Hewan berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat an. drh. Indra.
8. Juara I Lomba BBI Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
9. Juara I Lomba Matematika Tingkat Provinsi Sumatera Barat An. Fuad Ikhwanda (Siswa SMAN 1) dan Mewakili Sumatera Barat ke Tingkat Nasional.
10. Juara I Lomba Pidato Adat Minang Kabau An. Rahmad Hidayat (Siswa SMAN 1) dan Andika Pratama (Siswa SMKN 2).
11. Juara I Lomba OOSN Basket Putra Tingkat Propinsi An. Randi Satria Permana, Ramadhani Zulfa Rezki, Nahare Wulidaz Zacky (Siswa SMPN 1) dan Aviv Ansori (Siswa SMPN 3).
12. Juara I Guru Berprestasi An. Hartina Triyuni, S.Pd. (Guru SMPN 2)
13. Juara I Lomba Cipta Hymne PTK-PNF An. Nora Anggraini, S.Sn.
14. Juara I Lomba Instruktur Senam Aerobik An. Eis Hartati.
15. Juara I Lomba Solo Song PK-PLK An. Herman.

16. Juara I dan II Sansievera, Midnight Fountain pada perlombaan Tanaman Hias "SUMBAR FLORA 2010".
17. Juara I Philodendron pada perlombaan Tanaman Hias "SUMBAR FLORA 2010".
18. Juara I Kategori Senam Kreasi Chacha pada Acara Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Livestock Expo Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
19. Juara I Kategori Solosong Putri pada Acara Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Livestock Expo Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
20. Juara Harapan I Asah Terampil Kelompok Tani Ternak pada Acara Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Livestock Expo Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
21. Juara I Tk Provinsi Sumatera Barat untuk UP2K untuk tahun 2010.
22. Juara I Tk Provinsi Sumatera Barat untuk Hatinya PKK.
23. Juara I Kader BKB Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
24. Juara I Lomba UPPKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
25. Juara I Lomba SIP Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
26. Juara I Lomba UP2K Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
27. Juara I Lomba Hatinya PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
28. Juara I KKG PKK KB Kes Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
29. Juara I Lomba LSS Tingkat Provinsi Sumatera Barat .
30. Juara I sepak takraw antar Polisi Pamong Praja se - Sumbar dalam rangka HUT Polisi Pamong Praja di Kabupaten Solok Selatan.
31. Juara I bolla volly antar Polisi Pamong Praja se - Sumbar dalam rangka HUT Polisi Pamong Praja di Kabupaten Solok Selatan.
32. Juara II Debat bahasa Inggris An. Suci Amalia R, Lusi Yolanda dan Sri Wahyuningsih (Siswa SMAN 1).
33. Juara II Lomba Matematika Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Sawahlunto dan STAIN Batusangkar An. Fandy Falentino dan Afdhalul Haq (Siswa SMAN 1).
34. Juara II Lomba Fisika UNP an. Fandy Falentino (Siswa SMAN 1).
35. Juara II Kelompok Lomba Pidato Adat Minang Kabau An. Andika Pratama, Firman Ramadhan dn Muhammad Arif (Siswa SMKN 2).

36. Juara II Kepala Sekolah Berprestasi An. Amrizon, S.Pd. (Kepala Sekolah MAN 2).
37. Juara II Pengawas Berprestasi An. Dra. ASNA (Pengawas TK Dinas Pendidikan).
38. Juara II Lomba Instruktur IT An. Dipa Adi Martius, S.Pd. (Guru SMKN 2)
39. Juara II Lomba Karya Tulis Penilik PLS An. Sofyeni, S.Pd. (Dinas Pendidikan).
40. Juara II Lomba Pengelola Kursus An. Mulyati, S.Pd. (Guru SMKN 2).
41. Juara II Kader BKB dalam rangka HARGANAS An. Dewi Oktavia dari Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
42. Juara II PLKB Terbaik dalam rangka HARGANS An. Zuraida, S. Sos.
43. Juara II Pengurus Kelompok UPPKS dalam rangka HARGANAS An. Yuldeswira dari Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
44. Juara II Ibu Teladan dalam rangka Peringatan Hari Ibu An. Yuslaini Roza dari Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
45. Juara II Perusahaan Pengelola Tenaga Kerja Wanita dalam rangka Peringatan Hari Ibu Atas nama RS Yarsi Kota Padang Panjang.
46. Juara II Anthurium Non Jermanii pada perlombaan Tanaman Hias "SUMBAR FLORA 2010"
47. Juara II Anggrek Spesies pada perlombaan Tanaman Hias "SUMBAR FLORA 2010"
48. Juara II Tk Provinsi Sumatera Barat untuk PMT-AS SDN 13 Gantiang Tahun 2010.
49. Juara II Lomba PMT-AS Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
50. Juara II sepak bola antar Pol.PP se Sumbar dalam rangka HUT Pol.PP di Kabupaten Solok Selatan tahun 2009.
51. Juara II PLKB Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
52. Medali Perak POPDA Cabang Silat An. Aldika Saputra (Siswa SMA Sore), Muhammad Andra Yudha (Siswa SMP 4), Auliana Muhty Magrifah (Siswa SMAN 3) dan Viona Nurul Adha (PPLP).

53. Juara III Kelompok PIK KRR Tahap Tumbuh dalam rangka HARGANAS atas kelompok PIK KRR MAN 1 Koto Baru.
54. Juara III Kelompok PIK KRR Tahap Tegar dalam rangka HARGANAS atas kelompok PIK KRR SMA Uswatun Hasanah Pondok Pesantren Serambi Mekkah Kota Padang Panjang.
55. Juara III Lomba Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Tingkat Provinsi Sumatera Baratan. Pokdakan "Kami Saiyo" Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur.
56. Juara III Aglaonema Tunggal pada perlombaan Tanaman Hias "SUMBAR FLORA 2010".
57. Juara III Rangkaian Raphis Exelsa pada perlombaan Tanaman Hias "SUMBAR FLORA 2010".
58. Juara III Kelompok Lomba Pidato Minang Kabau An. Rahmat Hidayat, Rifwan Rafsanjani dan Ade Hidayat (Siswa SMAN 1.)
59. Juara III Lomba Tutor Kesetaraan Paket C An. Frederik Tirto Suryo, S.Pd.
60. Juara III Tk Provinsi Sumatera Barat untuk lomba Kelurahan Berprestasi Tahun 2010.
61. Juara III Tk Provinsi Sumatera Barat untuk Sistem Informasi Posyandu Tahun 2010.
62. Juara III Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
63. Juara III Lomba Ibu Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
64. Medali Perunggu POPDA Cabang Silat An. Anggre (Siswa SMAN 3).
65. Juara Harapan I Tingkat Sumatera Barat Lomba Lembaga Didikan Subuh (LDS) tergiat tahun 2010.
66. Juara Harapan I Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Kader Posyandu Berprestasi Tahun 2010.
67. Harapan III Lomba Kader Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Barat
68. Terpilihnya utusan anak dari Kota Padang Panjang An. Viona Sinda Arinda Siswa SMPN 1 Padang Panjang sebagai anggota Forum Anak Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
69. Lomba OSN Bidang Fisika An. Rahmat Akbar (Siswa SMAN 1), Mewakili Sumatera Barat ke Tingkat Nasional.

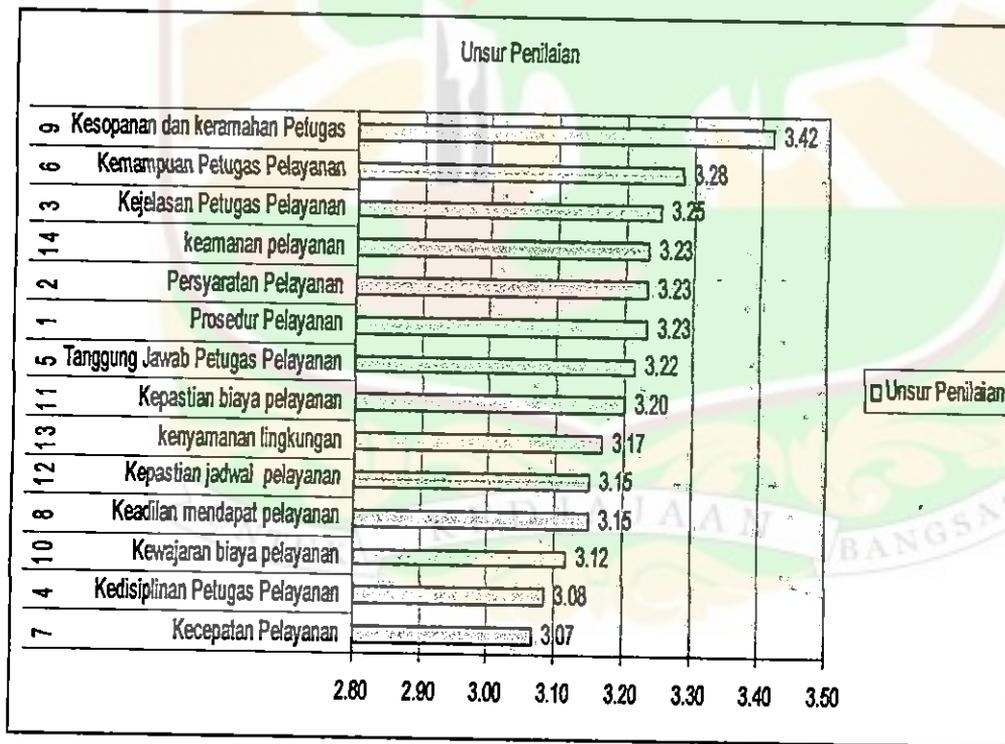
70. Lomba OSN Bidang Kimia An. Abdi Surya dan Robby Fajrino Nugraha (Siswa SMAN 1), Mewakili Sumatera Barat ke Tingkat Nasional.
71. Lomba OSN Bidang Ekonomi An. Nadya Rahmah dan Vinny Oksa Verlin (Siswa SMAN 1), Mewakili Sumatera Barat ke Tingkat Nasional.
72. Lomba OSN Bidang Geo Sains An. Fhani Elshara dan Wahyu Kurniawan M (Siswa SMAN 1), Mewakili Sumatera Barat ke Tingkat Nasional.
73. Perpustakaan Kota Padang Panjang telah mempunyai koleksi buku sekitar 10.600 buah buku yang dilengkapi dengan prasarana perpustakaan seperti Meja Baca dan rak buku yang representatif serta otomasi perpustakaan yang berbasis software dengan memenuhi standar Meta Data INDOMARCH.



Unit Pelayanan : KPPT

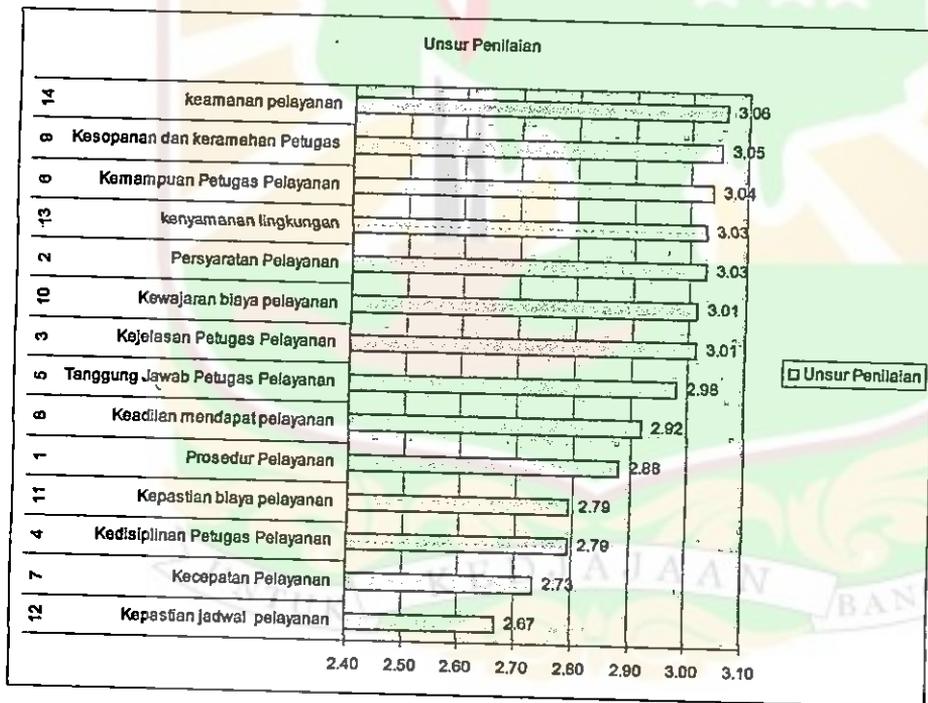
Tabel Nilai Per unsur Pelayanan setelah dikalikan 0,071

NO	Unsur Pelayanan	Unsur Penilaian	Nilai Indeks Per Unsur
1	Prosedur Pelayanan	3.23	0.23
2	Persyaratan Pelayanan	3.23	0.23
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3.25	0.23
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3.08	0.22
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3.22	0.23
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.28	0.23
7	Kecepatan Pelayanan	3.07	0.22
8	Keadilan mendapat pelayanan	3.15	0.22
9	Kesopanan dan keramahan Petugas	3.42	0.24
10	Kewajaran biaya pelayanan	3.12	0.22
11	Kepastian biaya pelayanan	3.20	0.23
12	Kepastian jadwal pelayanan	3.15	0.22
13	kenyamanan lingkungan	3.17	0.22
14	keamanan pelayanan	3.23	0.23
		Nilai Indeks	3.18
		Nilai IKM setelah di konversi	79.52
		Mutu Pelayanan	B
		Kinerja Unit Pelayanan	Balk



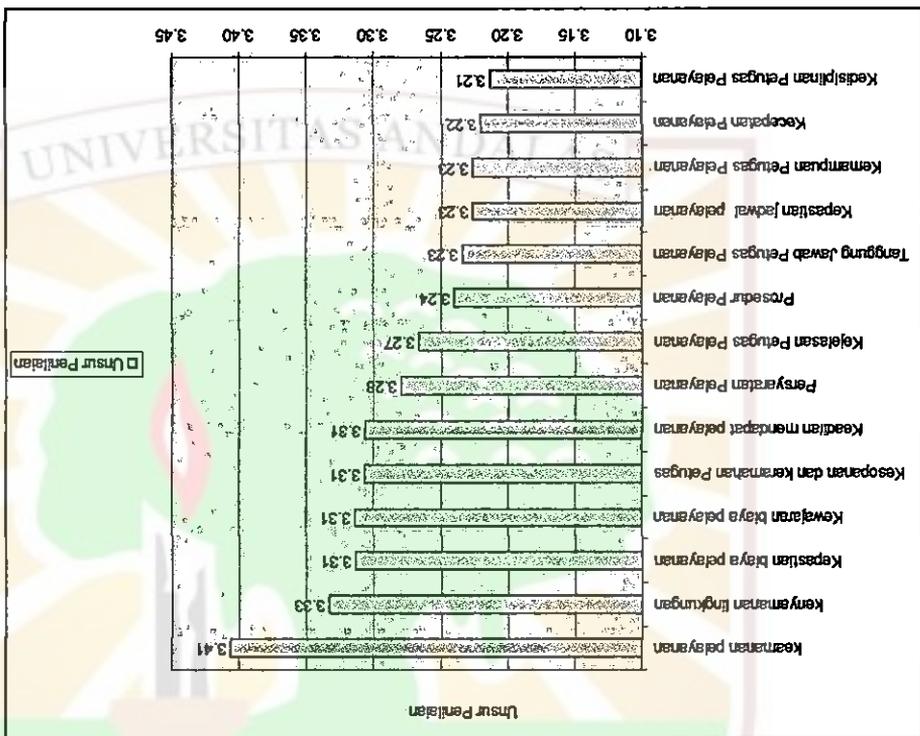
Unit Pelayanan : RSUD

NO	Unsur Pelayanan	Unsur Penilaian	Nilai Indeks Per Unsur
1	Prosedur Pelayanan		
2	Persyaratan Pelayanan	2.88	0.20
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3.03	0.21
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3.01	0.21
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	2.79	0.20
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	2.98	0.21
7	Kecepatan Pelayanan	3.04	0.22
8	Keadilan mendapat pelayanan	2.73	0.19
9	Kesopanan dan keramahan Petugas	2.92	0.21
10	Kewajaran biaya pelayanan	3.05	0.22
11	Kepastian biaya pelayanan	3.01	0.21
12	Kepastian jadwal pelayanan	2.79	0.20
13	Kenyamanan lingkungan	2.67	0.19
14	Keamanan pelayanan	3.03	0.21
		3.06	0.22
			2.91
			72.78
			B
			Baik



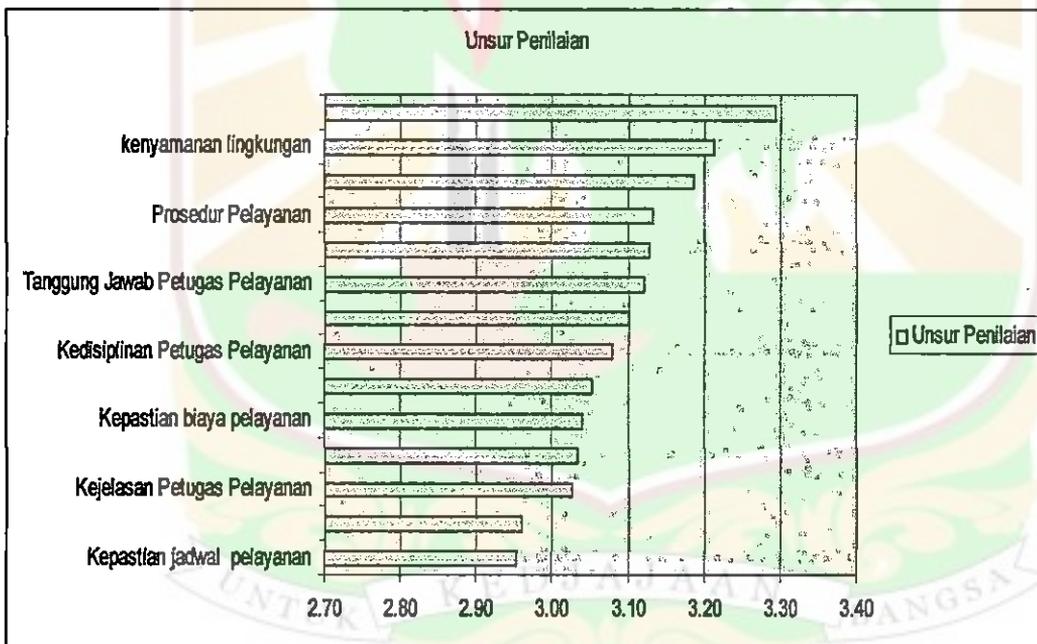
Unit Pelayanan : Kecamatan Padang Panjang Barat

NO	Unsur Pelayanan	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Per Unsur
1	Prosedur Pelayanan	3,24	0,23	
2	Persyaratan Pelayanan	3,28	0,23	
3	Kelas Pelayanan	3,27	0,23	
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,21	0,23	
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,23	0,23	
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,23	0,23	
7	Kecamatan Pelayanan	3,22	0,23	
8	Kedatangan mendapat pelayanan	3,31	0,23	
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,31	0,23	
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,31	0,24	
11	Kepastian biaya pelayanan	3,31	0,24	
12	Kepastian Jadwal pelayanan	3,23	0,23	
13	Kenyamanan lingkungan	3,33	0,24	
14	Kesamanan pelayanan	3,41	0,24	
	Nilai Indeks		3,26	
	Nilai IKN setelah di konversi		81,45	
	Nilai Pelayanan		SB	
	Kategori Unit Pelayanan		Sangat Baik	



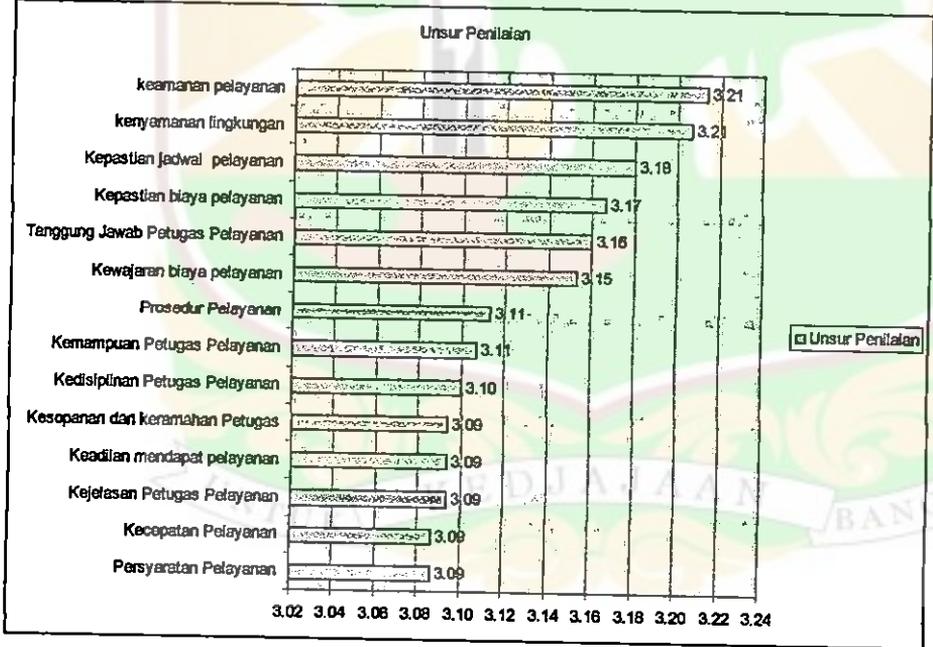
Unit Pelayanan : Kecamatan Padang Panjang Timur

NO	Unsur Pelayanan	Unsur Penilaian	Nilai Indeks Per Unsur
1	Prosedur Pelayanan	3.13	0.22
2	Persyaratan Pelayanan	3.13	0.22
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3.03	0.21
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3.08	0.22
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3.12	0.22
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.19	0.23
7	Kecapatan Pelayanan	2.96	0.21
8	Kedilain mendapat pelayanan	3.03	0.22
9	Kepantasan dan keramahan Petugas	3.10	0.22
10	Kewajaran biaya pelayanan	3.05	0.22
11	Kepastian biaya pelayanan	3.04	0.22
12	Kepastian jadwal pelayanan	2.95	0.21
13	Kenyamanan lingkungan	3.21	0.23
14	Kesamanan pelayanan	3.29	0.23
		Nilai Indeks	3.08
		Nilai IKM setelah di konversi	76.89
		Mutu Pelayanan	B
		Kinerja Unit Pelayanan	Baik



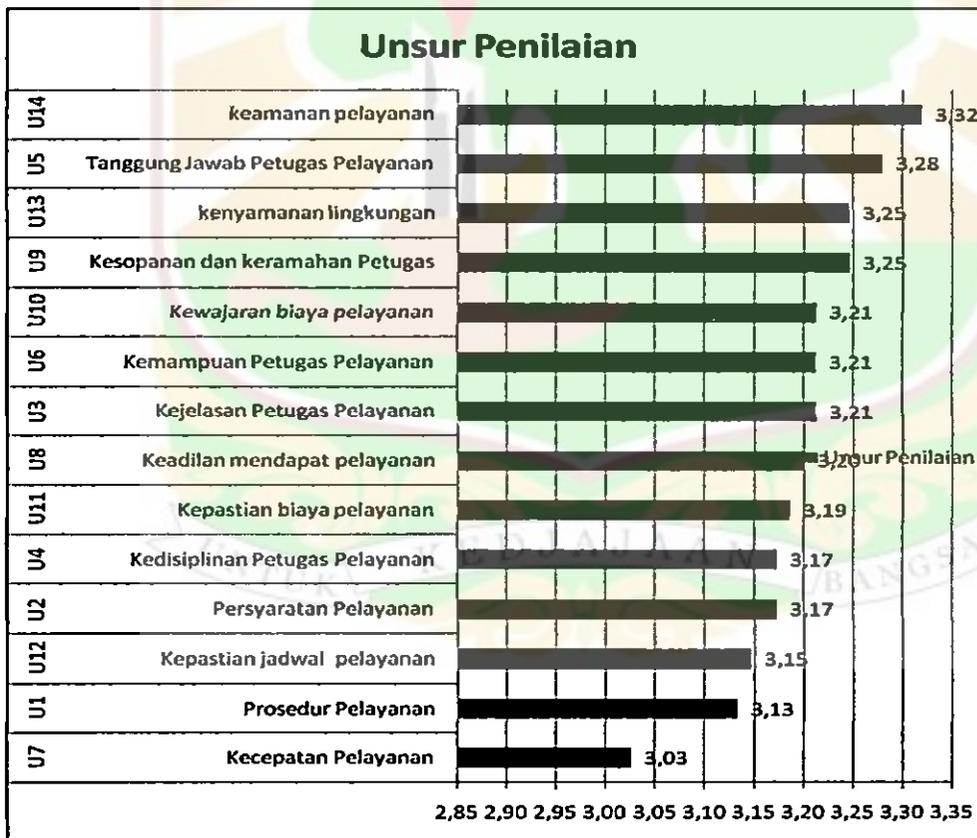
Unit Pelayanan : UPTD Puskesmas Gunung

NO	Unsur Pelayanan	Unsur Penilaian	Nilai Indeks Per Unsur
1	Prosedur Pelayanan	3.11	0.22
2	Persyaratan Pelayanan	3.09	0.22
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3.09	0.22
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3.10	0.22
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3.16	0.22
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.11	0.22
7	Kecapatan Pelayanan	3.09	0.22
8	Keadilan mendapat pelayanan	3.09	0.22
9	Kesopanan dan keramahan Petugas	3.09	0.22
10	Kewajaran biaya pelayanan	3.15	0.22
11	Kepastian biaya pelayanan	3.17	0.22
12	Kepastian jadwal pelayanan	3.18	0.23
13	Kenyamanan lingkungan	3.21	0.23
14	Keamanan pelayanan	3.41	0.23
	Nilai Indeks		3.11
	Nilai IKM setelah di konversi		77.84
	Mutu Pelayanan		B
	Kinerja Unit Pelayanan		Baik



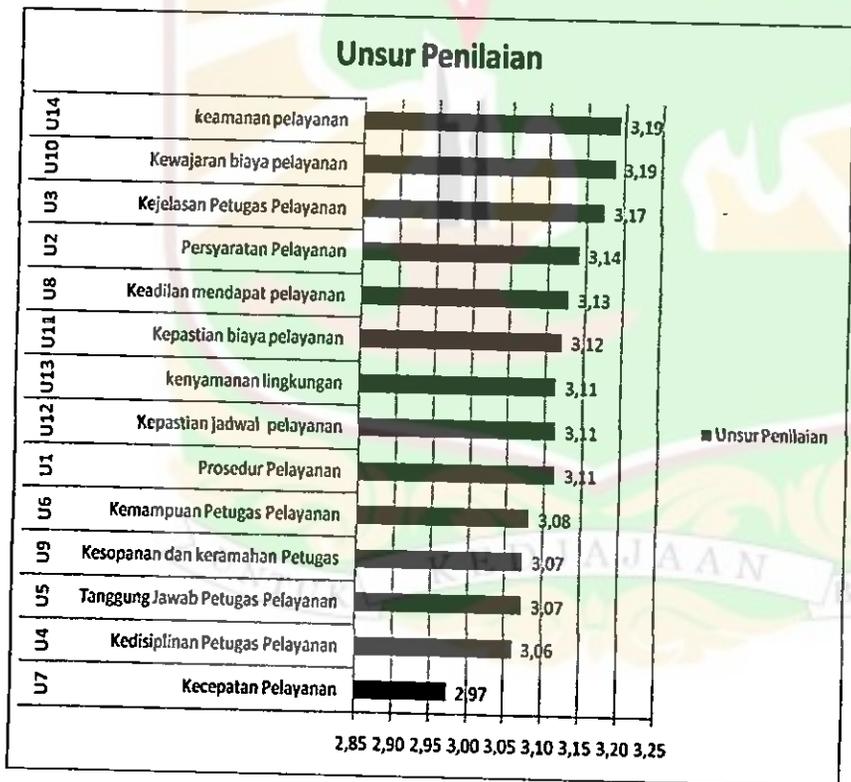
Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Unsur Pelayanan	Unsur Penilaian	Nilai Indeks Per Unsur
1	Prosedur Pelayanan	3,13	0,22
2	Persyaratan Pelayanan	3,15	0,22
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,21	0,22
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,17	0,23
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,26	0,23
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,21	0,23
7	Kecepatan Pelayanan	3,03	0,21
8	Keadilan mendapat pelayanan	3,17	0,23
9	Kesopanan dan keramahan Petugas	3,25	0,23
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,21	0,21
11	Kepastian biaya pelayanan	3,19	0,21
12	Kepastian jadwal pelayanan	3,15	0,22
13	Kenyamanan lingkungan	3,25	0,23
14	Kemamanan pelayanan	3,32	0,24
		Nilai Indeks	3,13
		Nilai B2M setelah di konversi	78,25
		Mutu Pelayanan	B
		Kinerja Unit Pelayanan	Baik



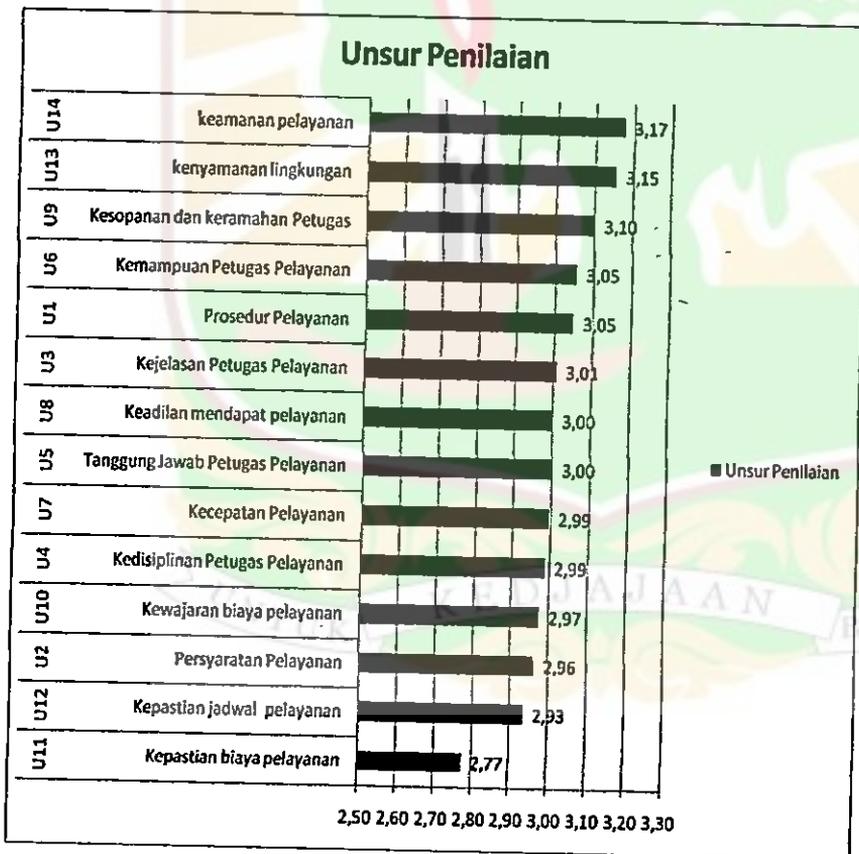
Unit Pelayanan : UPTD Puskesmas Kebun Sikolos

NO	Unsur Pelayanan	Unsur Penilaian	Nilai Indeks Per Unsur
1	Prosedur Pelayanan	3,11	0,22
2	Persyaratan Pelayanan	3,14	0,22
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,17	0,23
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,06	0,22
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,07	0,22
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,08	0,22
7	Kecepatan Pelayanan	2,97	0,21
8	Keadilan mendapat pelayanan	3,13	0,22
9	Kesopanan dan keramahan Petugas	3,07	0,22
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,19	0,23
11	Kepastian biaya pelayanan	3,12	0,22
12	Kepastian jadwal pelayanan	3,11	0,22
13	Kenyamanan lingkungan	3,11	0,22
14	Keamanan pelayanan	3,19	0,23
	Nilai Indeks		3,09
	Nilai IKM setelah di konversi		77,26
	Mutu Pelayanan		B
	Kinerja Unit Pelayanan		Baik



Unit Pelayanan : PDAM

NO	Unsur Pelayanan	Unsur Penilaian	Nilai Indeks Per Unsur
1	Prosedur Pelayanan	3,05	0,22
2	Persyaratan Pelayanan	2,96	0,21
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,01	0,21
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	2,99	0,21
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,00	0,21
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,05	0,22
7	Kecepatan Pelayanan	2,99	0,21
8	Keadilan mendapat pelayanan	3,00	0,21
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,10	0,22
10	Kewajaran biaya pelayanan	2,97	0,21
11	Kepastian biaya pelayanan	2,77	0,20
12	Kepastian jadwal pelayanan	2,93	0,21
13	Kenyamanan lingkungan	3,15	0,22
14	Kemampuan pelayanan	3,17	0,23
		Nilai Indeks	2,99
		Nilai IKM setelah di konversi	74,82
		Nilai Pelayanan	F
		Kinerja Unit Pelayanan	Baik





LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2009 **NOMOR 8** **SERI E.4**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa rokok merupakan zat psikoaktif yang apabila dipergunakan akan dapat menimbulkan adiksi serta membahayakan dan menurunkan derajat kesehatan manusia;
 - b. bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh rokok tidak hanya akan membahayakan kesehatan diri pemakai rokok atau perokok aktif saja tetapi juga akan menimbulkan pencemaran udara yang akan membahayakan kesehatan orang lain;
 - c. bahwa salah satu misi Kota Padang Panjang adalah mewujudkan Kota Sehat dan telah memperoleh predikat sebagai Kota Sehat kategori Wiwerdha pada Tahun 2007;
 - d. bahwa Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853*);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276*);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593*);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738*);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*);

24. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005, No.1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor
2 Seri D.2);

35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor
8 Seri E.2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang tertutup yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
8. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
9. Satuan Pendidikan adalah suatu tempat dimana dilakukan proses belajar mengajar seperti sekolah, Lembaga Keterampilan/kursus, sanggar, TPA/TPSA dan tempat belajar lainnya.
10. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, taman bermain anak dan lainnya.
11. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk musholla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPQ/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, pos yandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan sama sekali untuk merokok di kawasan tersebut.
17. Kawasan Tertib Rokok adalah wilayah dimana perokok diperbolehkan merokok pada suatu tempat khusus yang telah disediakan sehingga tidak membahayakan orang lain.

7. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang tertentu yang bertujuan sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
8. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
9. Sarana Pendidikan adalah suatu tempat dimana dilakukan proses belajar mengajar seperti sekolah, Lembaga Kejuruan/Jalan/Kursus, sanggar, TPVTPV dan tempat belajar lainnya.
10. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang dipromosikan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat bermain, tempat pengasuhan anak, taman bermain anak dan lainnya.
11. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk musholla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kabel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPQ/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, pos yandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana glauca dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Kawasan Tanpa Rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan sama sekali untuk merokok di kawasan tersebut.
17. Kawasan Tanpa Rokok adalah wilayah dimana perokok diperbolehkan merokok pada suatu tempat khusus yang telah disediakan sehingga tidak membahayakan orang lain.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam hal ini adalah pengendalian terhadap bahaya asap rokok yang dapat menurunkan derajat kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah:

1. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
2. membudayakan hidup sehat;
3. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan merokok pada kawasan tersebut.
- (2) Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat ibadah;
 - d. Tempat kegiatan anak-anak; dan
 - e. Angkutan umum.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tertib Rokok adalah wilayah dimana hanya

diperbolehkan merokok pada tempat khusus yang telah disediakan.

- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat umum yaitu kawasan wisata, hotel, restoran, rumah makan, pasar, dan terminal; dan
 - b. tempat kerja yaitu kantor pemerintah, kantor swasta, pabrik dan industri lainnya.
- (3) Kawasan tertib rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memasang pengumuman larangan merokok pada tempat yang dipimpinnya.
- (2) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Asap Rokok wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan guna menghentikan orang yang kedapatan sedang merokok ditempat yang dipimpinnya.
- (3) Setiap orang dapat memberikan teguran atau laporan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Asap Rokok apabila ada yang merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Asap Rokok wajib mengambil tindakan atas setiap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penghentian kegiatan orang yang sedang merokok.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat yang dipimpinnya dan memasang pengumuman larangan merokok pada tempat selain dari tempat khusus yang telah disediakan tersebut.
- (2) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tertib Rokok wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan guna menghentikan orang yang kedapatan sedang merokok di tempat selain dari tempat khusus yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dapat memberikan teguran atau laporan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tertib Rokok apabila ada yang merokok di tempat selain dari tempat khusus yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tertib Rokok wajib mengambil tindakan atas setiap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka :

- a. menyelenggarakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok;
- b. mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok adalah berupa:

- a. bimbingan dan atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi, membantu pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 apabila terbukti *membiarkan orang merokok di kawasan tanpa asap rokok atau tidak tertib merokok di kawasan tertib rokok* dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap :
- a. Lembaga Pemerintah
Sanksi administrasi berupa pemberian hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Lembaga Swasta
Sanksi administrasi berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 3. pencabutan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 17 Maret 2009 M
20 Rabiul Awal 1430 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 17 Maret 2009 M
20 Rabiul Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI E.4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK**

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.

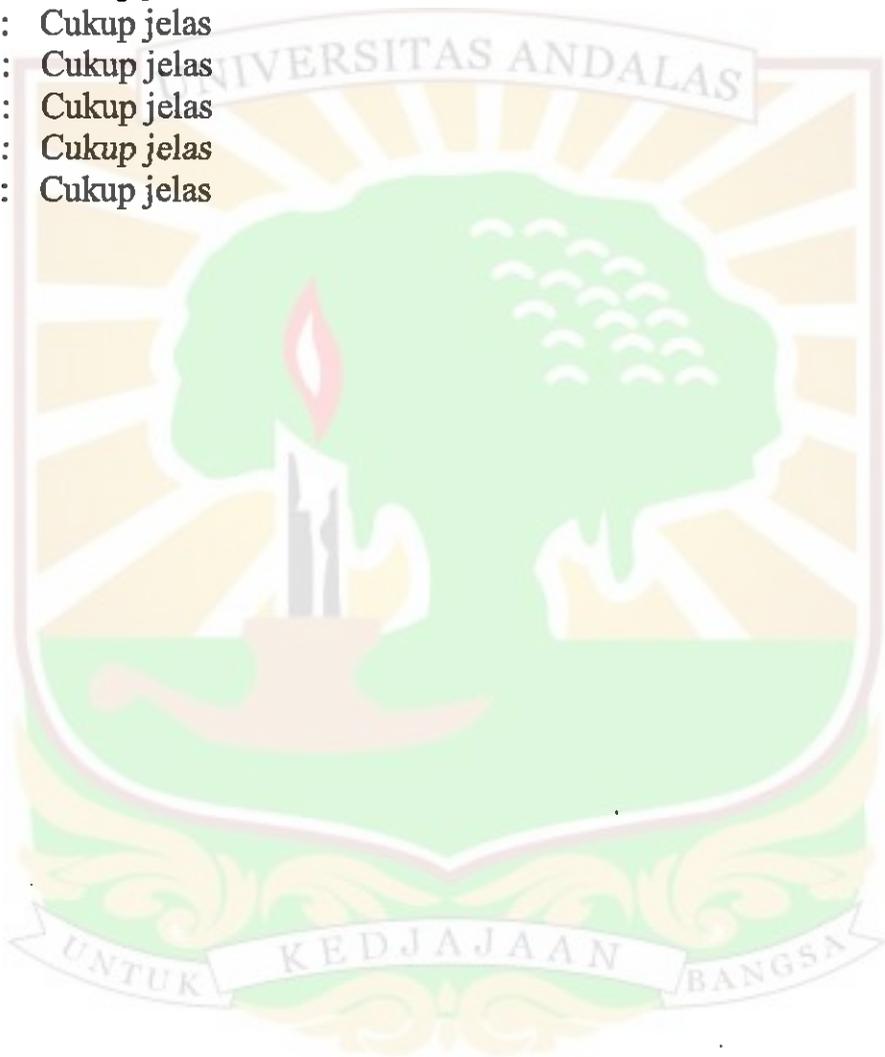
Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok khususnya bagi perokok pasif dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, dengan tujuan :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan perokok pemula;
- d. melindungi kesehatan perokok pasif.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas





LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2009 **NOMOR 6** **SERI E.2**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban untuk mengurus dan mengatur kepentingan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan tuntutan kebutuhan era globalisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/U/2001 tentang Pedoman Pengangkatan Guru;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

10. *Badan* adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Kualifikasi Pendidik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik (guru) sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

20. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terwujudnya perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang *berbudaya, agamis, demokratis serta bertanggung jawab.*

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim atau kondisi daerah yang kondusif sehingga *mendukung terselenggaranya pendidikan berkualitas dan seimbang antara iman dan taqwa dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pada akhirnya akan menjadikan daerah sebagai salah satu kota tujuan utama penyelenggaraan pendidikan.*

Pasal 5

Lingkup penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini adalah jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pasal 6

- (1) Setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Orang tua/wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada anaknya.
- (3) Setiap orang tua/wali yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mencabut kekuasaan orang tua/wali yang mampu secara ekonomi namun tidak bersedia

melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menunjuk Pemerintah Daerah untuk menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak tersebut termasuk memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah.

- (5) Kekuasaan Pemerintah Daerah terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hapus dengan sendirinya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun dan wajib mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kondisi fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggung sebagian atau seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang tua/wali yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat baik secara perorangan, kelompok atau badan.
- (4) Sistem dan tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

LAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik di daerah tanpa diskriminasi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong percepatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi pada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pendidik yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap jenjang pendidikan wajib memenuhi persyaratan tersebut.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut secara bertahap dengan skala prioritas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggung biaya peningkatan kualifikasi pendidik dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan biaya pendidikan yang dibutuhkan.
- (4) Kriteria pendidik yang diprioritaskan untuk dibantu dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. belum berusia 45 tahun;
 - b. masa kerja terlama;
 - c. memiliki kinerja baik.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut dari peningkatan kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima penghasilan dari satuan pendidikan tersebut kurang dari Upah Minimum Propinsi (UMP).
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap didasarkan kepada prestasi kerja (kualifikasi dan sertifikasi) dan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan diusulkan oleh satuan pendidikan kepada
- (3) Dinas Pendidikan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diteruskan kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan dengan tetap memperhatikan pembinaan karier bagi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada jenjang satuan pendidikan yang sama.
- (3) Mutasi pendidik hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun pada suatu satuan pendidikan atau atas pertimbangan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima mutasi pendidik dari daerah lain dengan persyaratan :
 - a. mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah;
 - b. tersedia formasi pada jenjang pendidikan yang sama; dan
 - c. memenuhi persyaratan kualifikasi pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi pendidik ke luar daerah hanya dapat dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) *Pemerintah Daerah dapat melakukan pertukaran pendidik ke satuan pendidikan lain baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lain maupun masyarakat.*

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 16

- (1) *Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan calon peserta didik dari dalam daerah.*
- (2) *Penerimaan peserta didik dari luar daerah pada satuan pendidikan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Pasal 17

- (1) *Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum, rasa aman, dan jaminan kesehatan bagi setiap peserta didik.*
- (2) *Pelaksanaan lebih lanjut dari pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Pasal 18

- (1) *Setiap peserta didik dilarang membawa/menggunakan telepon genggam yang memiliki fitur kamera, alat penyimpan data eksternal (memory), dan fitur-fitur multimedia lainnya pada lingkungan satuan pendidikan.*

- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengambil kebijakan guna mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu Pendidikan Bernuansa Islami

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban mengembangkan konsep dan pelaksanaan pendidikan bernuansa Islami kecuali bagi penyelenggara satuan pendidikan yang berasaskan agama selain Islam.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan bernuansa Islami.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Budaya dan Adat Minangkabau

Pasal 20

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memberikan pendidikan tentang Budaya dan Adat Minangkabau.
- (2) Pendidikan Budaya dan Adat Minangkabau didasarkan pada nilai adat dan budaya luhur yang Islami yang hidup dan berkembang di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kurikulum Budaya dan Adat Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaksanaan pendidikan tentang Budaya dan Adat

Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga adat yang terdapat di daerah.

Bagian Ketiga Sejarah Pendidikan Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan mendokumentasikan Sejarah Pendidikan di Daerah.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban memiliki dan mendokumentasikan sejarah perkembangan satuan pendidikannya.
- (3) Setiap satuan pendidikan berkewajiban mengenalkan sejarah pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh peserta didik

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermutu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis asrama wajib menyediakan sarana pemondokan yang memenuhi standar minimum.
- (3) Standar minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan asrama/pemondokan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi masyarakat yang ingin menyelenggarakan pemondokan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan pemondokan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian izin akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membantu biaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan asas kepatutan, keadilan, proporsional dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan wajib dialokasikan minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam melakukan pungutan kepada peserta didik harus memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pungutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, keterbukaan dan pengecualian kepada keluarga kurang mampu.
- (4) Setiap penggunaan dana yang diperoleh dari pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan

dipertanggungjawabkan kepada orang tua peserta didik.

- (5) *Prosedur dan syarat-syarat melakukan pungutan kepada peserta didik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.*

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) *Setiap warga dan kelompok masyarakat berkewajiban menciptakan suasana kota dan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan bernuansa Islami.*
- (2) *Setiap warga dan kelompok masyarakat wajib berperan serta membantu satuan pendidikan dalam menerapkan peraturan dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.*
- (3) *Bentuk peran serta masyarakat dalam membantu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Pasal 29

- (1) *Setiap warga masyarakat dapat berperan serta dalam mendorong tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.*
- (2) *Setiap warga masyarakat dapat mengusulkan program yang akan memberikan percepatan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.*
- (3) *Prosedur dan tata cara pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.*

BAB XI

PERAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI

Pasal 30

- (1) Peran Dunia Usaha dan Industri dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. *memberikan informasi terkini tentang perkembangan Dunia Usaha dan Industri kepada penyelenggara pendidikan untuk penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;*
 - b. *memfasilitasi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan kegiatan magang atau praktek industri; dan*
 - c. *memberikan bantuan termasuk pembiayaan pada satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.*
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kerjasama antara dunia usaha dan industri dengan satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri untuk berinvestasi di bidang pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Tata cara pemilihan anggota dan kepengurusan Dewan

Pendidikan berpedoman kepada AD/ART Dewan Pendidikan.

- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan dana operasional Dewan Pendidikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun berdasarkan AD/ART Dewan Pendidikan.
- (6) Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan bersifat koordinatif.
- (7) Setiap dana yang dihimpun oleh Dewan Pendidikan baik untuk kepentingan operasional maupun untuk pengembangan pendidikan wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan tentang hubungan yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 32

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah dipilih secara terbuka dalam rapat sekolah bersama orang tua murid dengan mempertimbangkan kualifikasi tertentu.
- (2) Kepengurusan Komite Sekolah dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Peran dan fungsi Komite Sekolah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) *Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan dana operasional Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (5) *Setiap dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah baik untuk kepentingan operasional maupun untuk pengembangan pendidikan wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.*

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pola Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Hubungan masyarakat penyelenggara pendidikan dengan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat daerah dan masyarakat luas harus

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap permasalahan yang timbul dan mengganggu proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus segera diselesaikan secara internal.
- (6) Apabila penyelesaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan.
- (7) Tata cara penyelesaian permasalahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan, hibah atau yang sejenisnya yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, luar negeri, organisasi/lembaga non pemerintah harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan uji kompetensi/unjuk

kerja bagi tenaga pendidik non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (2) Uji kompetensi/unjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah

BAB XIV

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Bagian Kesatu Hubungan antar Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sebuah Perjanjian Kerjasama yang disepakati bersama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hubungan Satuan Pendidikan dengan Lembaga Lain

Pasal 38

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat menjalin hubungan/kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Hubungan/kerjasama yang dijalin oleh satuan pendidikan dengan lembaga lain yang lebih dari 1 (satu) tahun harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Hubungan Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi

Pasal 39

- (1) Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi bersifat koordinatif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi pendirian dan pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat daerah dan masyarakat luas harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pengabdian pada masyarakat di daerah oleh Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan uji kompetensi/unjuk kerja untuk menentukan peringkat pendidik di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan dan siswa berprestasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi masyarakat baik perorangan maupun badan yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan pendidikan di daerah.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi anak-anak berpakaian seragam sekolah.
- (2) Setiap orang dilarang memberi, menawarkan, menjual minuman keras dan rokok kepada anak-anak peserta didik berusia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang

berlaku.

(2) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
- f. lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
- h. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan; dan
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jalur pendidikan informal dan nonformal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 17 Maret 2009 M
20 Rabiul Awal 1430 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 17 Maret 2009 M
20 Rabiul Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI E.2

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun atas pendekatan pemikiran tentang pentingnya dilakukan perubahan dalam proses dan pola manajemen sistem pendidikan. Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberi tuntutan dalam segala aspek kehidupan yang mau tidak mau harus disikapi oleh sistem pendidikan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilatarbelakangi juga oleh beberapa hal mendasar yang diharapkan berubah dalam sistem pendidikan diantaranya pembaharuan kurikulum, diversifikasi jenis pendidikan, penyusunan standar kompetensi lulusan, standar kualifikasi pendidik, standar pembiayaan pendidikan dengan prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan pendidikan berbasis sekolah, serta penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat serta pembedaan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Untuk itu ditetapkan misi pendidikan yang mencakup (1) perluasan dan pemerataan akses, (2) pengembangan potensi anak didik sejak usia dini, (3) peningkatan kesiapan masukan dan proses pendidikan, (4) peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan serta (5) pemberdayaan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di Padang Panjang Kota Serambi Mekah secara umum telah mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak. Dengan visi pendidikan bernuansa Islami dan dibarengi dengan mutu lulusan yang mampu bersaing, Kota Padang Panjang telah menjadi kota tujuan pendidikan, dimana disamping melayani segenap calon siswa asal daerah sendiri, Kota Padang Panjang juga didatangi oleh calon siswa tidak saja dalam lingkup propinsi, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia.

Untuk lebih menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing serta senantiasa memperhatikan pengembangan semua lembaga satuan penyelenggara pendidikan baik umum maupun agama serta negeri dan swasta agar mampu maju secara bersama, pemberian layanan kepada peserta didik tanpa diskriminasi dengan prinsip keadilan, melibatkan segenap stakeholder pendidikan, serta menjamin penciptaan lingkungan yang kondusif sehingga mampu memberi jaminan keamanan, kesehatan, kepastian hukum bagi segenap masyarakat pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 :
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : yang dimaksud dengan wajib menyerahkan adalah termasuk menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pemberian pendidikan bagi anak.
ayat (3) : yang dimaksud dengan wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah adalah pemberitahuan atas ketidakmampuan orang tua/wali sehingga perlu dilakukan investigasi yang mendalam atas ketidakmampuan tersebut untuk selanjutnya akan diikutsertakan dalam program wajib belajar 12 tahun.
ayat (4) : Pengajuan tersebut dilakukan setelah seluruh upaya persuasif yang dilakukan tidak mampu memberikan penyadaran kepada yang bersangkutan akan kewajibannya dalam memenuhi hak pendidikan anak.
ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 7 :
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Kerjasama yang dijalin tetap berpegang pada asas saling menguntungkan dan tidak membebani pemerintah dengan kewajiban-kewajiban yang dapat mengganggu independensi penyelenggaraan pendidikan
ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 :
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Tambahan penghasilan yang diberikan adalah untuk mencukupi penghasilan yang bersangkutan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP).

Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas





WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 710/ 07 /Wako-PP/2010

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMENANG EVALUASI KINERJA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kinerjanya, perlu ditetapkan SKPD pemenang Evaluasi Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemenang Evaluasi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2009.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 710/07/Wako-PP/2010

Tanggal : 14 Januari 2010

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010;
20. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 242 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dari Walikota Padang Panjang kepada Wakil Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia, Penunjukan Narasumber serta Penunjukan Peserta dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
: Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemenang Evaluasi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2009 dengan urutan dan total nilai skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Kepada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Uang Pembinaan sebagai Reward dengan rincian sebagai berikut ;
- A. SKPD Pengumpul Pendapatan Daerah
 1. Nomor Urut/Rangking I Rp. 3.500.000,-
 2. Nomor Urut/Rangking II Rp. 3.000.000,-
 3. Nomor Urut/Rangking III Rp. 2.500.000,-
 - B. SKPD Non Pengumpul Pendapatan Daerah
 1. Nomor Urut/Rangking I Rp. 3.000.000,-
 2. Nomor Urut/Rangking II Rp. 2.500.000,-
 3. Nomor Urut/Rangking III Rp. 2.000.000,-

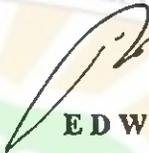
Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 710/07/Wako-PP/2010
Tanggal : 14 Januari 2010

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 14 Januari 2010 M
28 Muharram 1431 H

WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG,



EDWIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
3. Muspida Kota Padang Panjang.
4. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
5. Kepala Dinas PPKAD Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
6. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

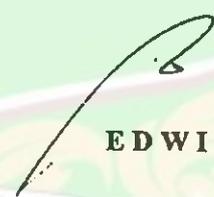


Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 710/07 /Wako-PP/2010
Tanggal : 14 Januari 2010
Tentang : Penetapan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pemenang
Evaluasi Kinerja SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun
2009

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMENANG EVALUASI KINERJA SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009**

NOMOR URUT/RANGKING	SKPD PENGUMPUL PENDAPATAN DAERAH	TOTAL NILAI SKOR
1	Dinas Kependudukan dan Capil	146
2	Dinas Kop,UMKM dan Indag	131
3	Sekretariat Daerah	125
NOMOR URUT/RANGKING	SKPD NON PENGUMPUL PENDAPATAN DAERAH	TOTAL NILAI SKOR
1	Sekretariat DPRD	115
2	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kel.	114
3	Kecamatan Padang Panjang Barat	112

WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG,


EDWIN

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



WALIKOTA PADANG PANJANG

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR : 710/77/WAKO-PP/2012

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMENANG EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kinerjanya, perlu ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemenang Evaluasi Kinerja untuk Semester II Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemenang Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Semester II Tahun 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Lembar Kedua : Salinan Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 710/77/WAKO-PP/2012
Tanggal : 5 Maret 2012

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Hasil rapat Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah Semester II Tahun 2011 pada tanggal 26 Januari 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMENANG EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2011**

KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemenang Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Semester II Tahun 2011 dengan urutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Penghargaan (Reward) dengan rincian sebagai berikut ;

A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah

1. Nomor Urut/Ranking I : Rp. 15.000.000,-
2. Nomor Urut/Ranking II : Rp. 12.500.000,-
3. Nomor Urut/Ranking III : Rp. 10.000.000,-

Lembar Ketiga : Salinan Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 710/77/WAKO-PP/2012
Tanggal : 5 Maret 2012

B. Satuan Kerja Perangkat Daerah Non Pengelola Pendapatan Daerah

1. Nomor Urut/Ranking I : Rp. 12.000.000,-
2. Nomor Urut/Ranking II : Rp. 10.000.000,-
3. Nomor Urut/Ranking III : Rp. 7.500.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 pada kode rekening 1.20.1.20.03.39.02.5.2.1.10.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Maret 2012

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO PADANG PANJANG**



ZULKIFLI, SH
NIP.196304221989031010

Salinan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Sumatera Barat.
- 2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang.
- 3. Muspida Kota Padang Panjang.
- 4. Inspektur Kota Padang Panjang.
- 5. Kepala DPPKAD Kota Padang Panjang.
- 6. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Lampiran : Salinan Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 710/77/WAKO-PP/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemenang Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Semester II Tahun 2011

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMENANG EVALUASI KINERJA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2011

NOMOR URUT/RANKING	SKPD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata

NOMOR URUT/RANKING	SKPD NON PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Kecamatan Padang Panjang Barat
3	Kecamatan Padang Panjang Timur

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO PADANG PANJANG**

**ZULKIFLI,SH
NIP.196304221989031010**

Lampiran : Salinan Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 710/77/WAKO-PP/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemenang Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Semester II Tahun 2011

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMENANG EVALUASI KINERJA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2011

NOMOR URUT/RANKING	SKPD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata

NOMOR URUT/RANKING	SKPD NON PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Kecamatan Padang Panjang Barat
3	Kecamatan Padang Panjang Timur

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

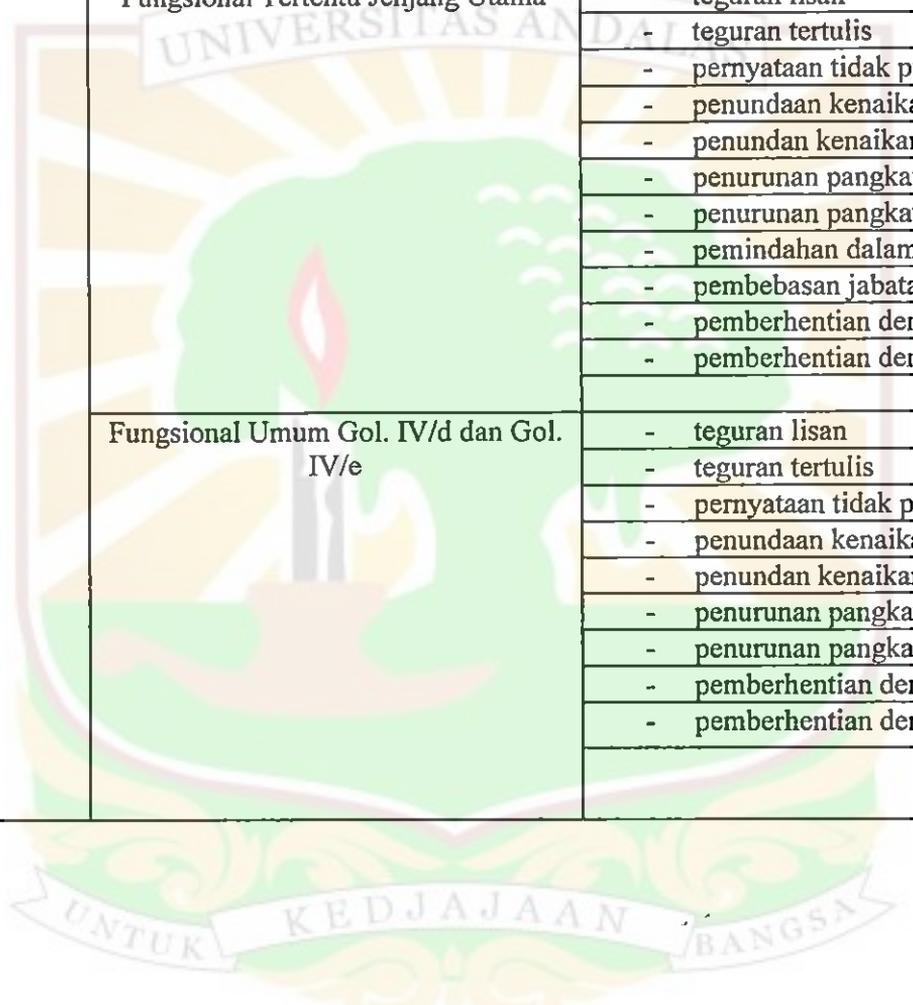
SUIR SYAM

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO PADANG PANJANG**

ZULKIFLI,SH
NIP.196304221989031010

HUKUMAN DISIPLIN PNS MENURUT PP NO.

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP	JENIS HUKUMAN D
<p>WALIKOTA</p> <p>❖ PNS yang menduduki jabatan :</p>	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (s - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda
	<p>Fungsional Tertentu Jenjang Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (s - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemindahan dalam rangka penurunan ja - pembebasan jabatan - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seb
	<p>Fungsional Umum Gol. IV/d dan Gol. IV/e</p>	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (s - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seb



PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Fungsional umum Gol. I/a s/d I/d	- penundaan kenaikan gaji berkala selama
		- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
Eselon V dan Pejabat Setara	Fungsional umum Gol. I/a s/d Gol. I/d	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
PNS yang menduduki jabatan :		
PNS yang dipekerjakan dan diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Fungsional umum Gol. I/a s/d Gol. I/d	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis



PNS yang dibebaskan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum Gol. II/c s/d Gol. III/b	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (s)
PNS yang menduduki jabatan : Eselon III	Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum Gol. II/c s/d Gol. III/b	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis
	Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum Gol. II/a dan Gol. II/b	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (s)
PNS yang dipekerjakan atau dibebaskan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum Gol. II/c s/d Gol. III/b	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis
PNS yang dibebaskan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum Gol. II/a dan Gol. II/b	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (s)
PNS yang menduduki jabatan : Eselon IV dan Pejabat Setara	Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum Gol. II/a dan Gol. II/b	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis
	Fungsional Umum Gol. I/a s/d Gol. I/d	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (s)
PNS yang dipekerjakan dan dibebaskan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum Gol. II/a dan Gol. II.b	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis



Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota	Struktural Eselon II	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
❖ PNS yang menduduki jabatan :	Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum Gol. III/c dan Gol. III/d	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
❖ PNS yang menduduki jabatan :	Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksanaan Lanjutan, dan Fungsional Umum Gol. II/c s/d Gol. III/b	- penundaan kenaikan gaji berkala selama
		- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (s)
❖ PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Struktural Eselon III, jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Jabatan Fungsional Umum Gol. III/c dan Gol. III/d	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
❖ PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan Fungsional Umum Gol. II/c s/d III/b	- penundaan kenaikan gaji berkala selama
		- penundan kenaikan pangkat selama 1 (sa
❖ PNS yang menduduki jabatan : Eselon II	Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, dan fungsional umum Gol. III/c dan Gol. III/d	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
❖ PNS yang menduduki jabatan :	Struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum Gol. II/c s/d III/b	- penundaan kenaikan gaji berkala selama
		- penundan kenaikan pangkat selama 1 (sa
❖ PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, dan jabatan fungsional umum Gol. III/c dan Gol. III/d	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis



	Fungsional Umum Gol. IV/e ke bawah	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (s) - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seb
PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan :	Struktural Eselon II ke bawah dan Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Utama ke bawah serta Jabatan Fungsional Umum Gol. IV/e ke bawah	<ul style="list-style-type: none"> - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seb
PNS yang dipekerjakan dan diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri		<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (s) - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seb
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri		<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (s) - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seb



	Fungsional Umum Gol. IV/a s/d Gol. IV/e	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda
	Struktural Eselon II dan Fungsional Tertentu Jenjang Madya	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemindahan dalam rangka penurunan jab - pembebasan jabatan
	Struktural Eselon III ke bawah dan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemindahan dalam rangka penurunan jab - pembebasan jabatan
	Fungsional Umum Gol III/c dan Gol III/d	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda
❖ PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan :	Struktural Eselon II ke bawah dan Fungsional Tertentu Jenjang Utama ke bawah	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seb



❖ PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
	Fungsional Tertentu Jenjang Utama	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
		- pemindahan dalam rangka penurunan ja
		- pembebasan jabatan
❖ PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :	Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
		- penundaan kenaikan gaji berkala selama
		- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (sa
		- penurunan pangkat setingkat lebih renda
		- penurunan pangkat setingkat lebih renda
	Fungsional Tertentu Jenjang Utama	- teguran lisan
		- teguran tertulis
		- pernyataan tidak puas secara tertulis
		- penundaan kenaikan gaji berkala selama
		- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (
	- penurunan pangkat setingkat lebih renda	
	- penurunan pangkat setingkat lebih renda	
	- pemindahan dalam rangka penurunan ja	
	- pembebasan jabatan	



Struktural Eselon II dan Fungsional Tertentu Jenjang Madya dan Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemindahan dalam rangka penurunan jab - pembebasan jabatan - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seba
Fungsional Umum Gol. IV/a s/d Gol. IV/c	<ul style="list-style-type: none"> - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seba
Struktural Eselon III ke bawah dan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemindahan dalam rangka penurunan jab - pembebasan jabatan - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seba
Fungsional Umum Gol. III/d ke bawah	<ul style="list-style-type: none"> - penundaan kenaikan gaji berkala selama - penundanan kenaikan pangkat selama 1 (sa - penurunan pangkat setingkat lebih renda - penurunan pangkat setingkat lebih renda - pemberhentian dengan hormat tidak atas - pemberhentian dengan tidak hormat seba



PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

No.	JENIS KEWAJIBAN DAN LARANGAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN			DIATUR DALAM PASAL	KETERANGAN
		RINGAN	SEDANG	BERAT		
1.	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 1	
2.	Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 2	
3.	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 3	
4.	Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 4	
5.	Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 5	
6.	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 6	

7.	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 7	
8.	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 8	
9.	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa : a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja. c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja.	✓ ✓ ✓			Pasal 8 angka 9 huruf a Pasal 8 angka 9 huruf b Pasal 8 angka 9 huruf c	
10.	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 10	
11.	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	✓			Pasal 8 angka 11	
12.	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	✓			Pasal 8 angka 12	

13.	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	✓			Pasal 8 angka 13	
14.	Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.	✓			Pasal 8 angka 14	
15.	Mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.		✓		Pasal 9 angka 1	
16.	Mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.		✓		Pasal 9 angka 2	
17.	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan		✓		Pasal 9 angka 3	
18.	Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 4	
19.	Melaksanakan tugas kedisiplinan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 5	
20.	Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 6	

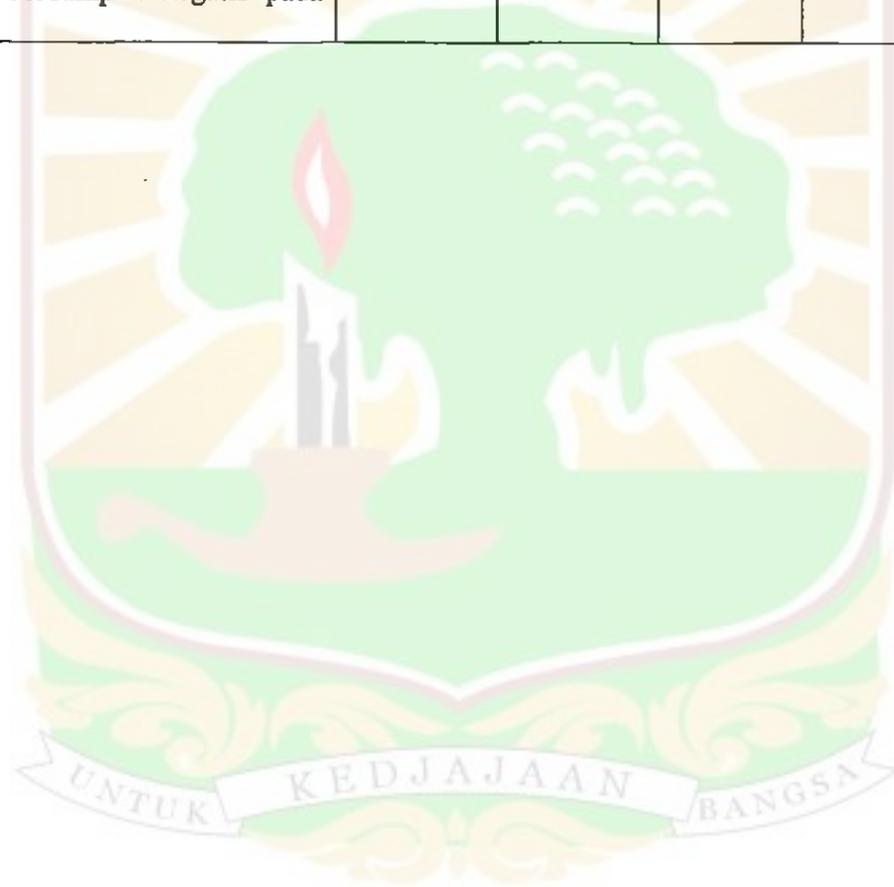
21.	Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 7	
22.	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 8	
23.	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 9	
24.	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 10	
25.	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja. b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) hari kerja.		✓		Pasal 9 angka 11 huruf a	
			✓		Pasal 9 angka 11 huruf b	

	c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) hari kerja.		✓		Pasal 9 angka 11 huruf c	
26.	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai 50% (lima puluh persen).		✓		Pasal 9 angka 12	
27.	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 13	
28.	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		✓		Pasal 9 angka 14	
29.	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja.		✓		Pasal 9 angka 15	
30.	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja.		✓		Pasal 9 angka 16	
31.	Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.		✓		Pasal 9 angka 17	
32.	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 1	

33.	Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 2	
34.	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 3	
35.	Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 4	
36.	Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 5	
37.	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 6	
38.	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 7	
39.	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 8	

40.	<p>Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja. b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai 40 (empat puluh) hari kerja; c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih; 			✓ ✓ ✓ ✓	<p>Pasal 10 angka 9 huruf a</p> <p>Pasal 10 angka 9 huruf b</p> <p>Pasal 10 angka 9 huruf c</p> <p>Pasal 10 angka 9 huruf d</p>	
41.	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);			✓	Pasal 10 angka 10	
42.	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 11	

43.	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			✓	Pasal 10 angka 12	
44.	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.			✓	Pasal 10 angka 13	



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 019 /SP.X.FISIP.2012

Tentang
Tim Penguji Proposal

A.N.: Inola Anwar

BP. 0810831002

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

Nama : Inola Anwar
No.BP. : 0810831002
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Analisis Karakteristik Kepemimpinan Walikota Padang Panjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2003-2008

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0196/O-1995 tentang SOTK Unand;
4. Keppres No.79/M/Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas.
5. SK.Rektor Univ.Andalas :1351/III/A2008 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unand.
6. Buku Pedoman FISIP Unand 2011/2012.
7. DIPA Unand Tahun.2011 Nomor. 0675/023-042.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

	Nama Dosen	Jabatan	Honor
1.	Drs. Syaiful, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2.	Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3.	Doni Hendrik, S.IP, M.Soc.Sc	Anggota	Rp. 15.000,-
4.	Dr. Asrinaldi, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
5.	Indah Adi Putri, S.IP, M.IP	Anggota	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Inola Anwar
No.BP. : 0810831002
Jurusan : Ilmu Politik

- Kedua : seminar Proposal dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Maret 2012

Jam : 09.00 WIB

Tempat : R. Sidang Jurusan

- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan/pimpinan fakultas.

- Keempat : Syarat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Tembusan :

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

DITETAPKAN DI : PADANG.
PADA TANGGAL : 08 MARET 2012



DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 011/ISP.X.FISIP.2012

Tentang

Tim Penguji Proposal

A.N.: Inola Anwar

BP. 0810831002

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

Nama : Inola Anwar
No.BP. : 0810831002
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Analisis Karakteristik Kepemimpinan Walikota Padang Panjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2003-2008

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0196/O-1995 tentang SOTK Unand;
4. Keppres No.79/MTahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas.
5. SK.Rektor Univ.Andalas :1351/III/A2008 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unand.
6. Buku Pedoman FISIP Unand 2011/2012.
7. DIPA Unand Tahun.2011 Nomor. 0675/023-042.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Drs. Syaiful, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Doni Hendrik, S.IP, M.Soc.Sc	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Dr. Asrinaldi, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
5. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP	Anggota	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Inola Anwar
No.BP. : 0810831002
Jurusan : Ilmu Politik

- Kedua : seminar Proposal dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Maret 2012

Jam : 09.00 WIB

Tempat : R. Sidang Jurusan

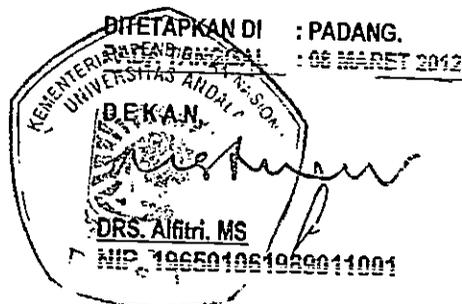
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan/pimpinan fakultas.

- Keempat : Syarat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Tembusan :

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 110 /SP.X.FISIP.2012

Tentang

Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa

A.N.: Inola Anwar

BP. 0810831002

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

imbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan/penulisan skripsi dan telah memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti ujian skripsi.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

N a m a : Inola Anwar

No.BP. : 0810831002

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi tersebut.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa dimaksud dengan surat keputusan.

- ingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0196/O-1995 tentang SOTK Unand;
4. Keppres No.79/M/Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas.
5. SK.Rektor Univ.Andalas :1351/III/A2008 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unand.
6. Buku Pedoman FISIP Unand 2011/2012.
7. DIPA Unand Tahun.2011 Nomor. 0675/023-042.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

etapkan :
tama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

1. Ketua : Drs. Syaiful, M.Si
2. Sekretaris : Tengku Rika Valentina, S.IP, M.A
3. Anggota : Dr.Sri Zul Chairiyah, MA
4. Anggota : Desna Aromatica, S.AP, M.AP
5. Anggota : Dr. Asrinaldi, M.Si / Indah Adi Putri. S.IP, M,IP

Tim penguji ujian skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a : Inola Anwar

No.BP. : 0810831002

Jurusan : Ilmu Politik

ua : Ujian dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 30 Agustus 2012

J a m : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Jurusan

ga : Tim Penguji agar melaporkan dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.

mpat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG.

PADA TANGGAL : 29 AGUSTUS 2012

usan :

th.Rektor Universitas Andalas

etua Jurusan di lingkungan

SIP Univ. Andalas

ubag. Keuangan FISIP Unand di Padang



Prof. Dr. Rer.soz. Nursvirwan Effendi

NIP-19640624 199001 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang, Telp (0751) 71266 Fax.71266

Nomor : 39 /UN.16.09/PP/2012
 Lamp. : -
 Hal : Survei Awal.

Kenada Yth:

Sebelumnya Bapak Kota PADANG PANJANG

di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp. : 0810831002
 Nama : Inola Anwar
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
 Alamat : Komplek Pondok Pinang RT.02 RW.04
 Dengan Judul : Kepemimpinan Walikota Padang Panjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2003-2008
 Lokasi : Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan penelitian/survei awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan saudara dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 12 Januari 2012

An. Dekan
 Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Afrizal, MA
 Nip.19620520 198811 1 001

Tembusan:

1. Rektor Univ. Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

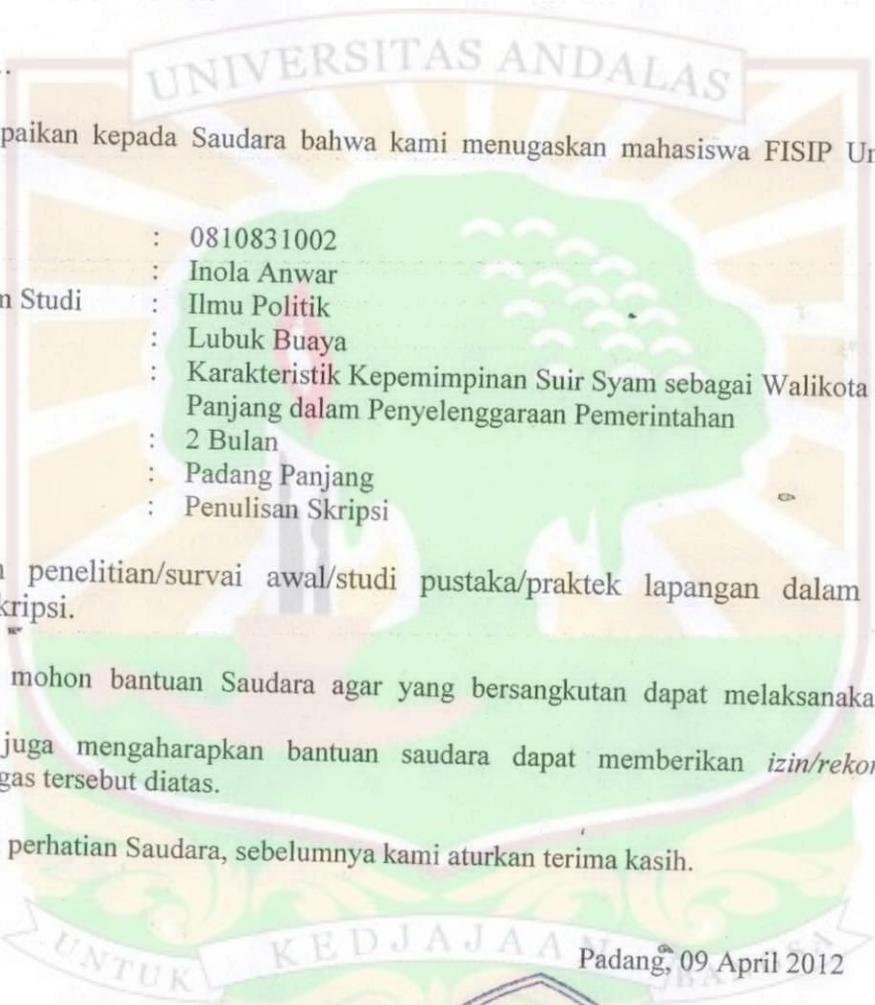
Nomor : 685 /UN.16.09/PP/2012
amp. : -
I a l : Izin Penelitian.

kepada Yth:

.....

.....

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;



- Nomor Bp. : 0810831002
- N a m a : Inola Anwar
- Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
- Alamat : Lubuk Buaya
- Dengan Judul : Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- Waktu : 2 Bulan
- Lokasi : Padang Panjang
- Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survei awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Menghimping itu kami juga mengharapkan bantuan saudara dapat memberikan izin/rekomendasi lainnya mengenai tugas tersebut diatas.

Segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 09 April 2012



Au, Dekan
 Pembantu Dekan I,

[Handwritten Signature]

Prof. Dr. Afrizal, MA
 NIP.19620520 198811 1 001

san:
 or Univ.Andalas
 a Jurusan
 n Pembimbing
 siswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 - 31554 Padang

REKOMENDASI

No.B.0701/473/WAS-BKPL/2012

TENTANG

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor : 685/UN.16.09/PP/2012 tanggal 9 April 2012 Perihal permohonan izin melakukan penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatra Barat yang dilakukan oleh :

Nama : INOLA ANWAR.
 Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 17 April 1990.
 Pekerjaan : Mahasiswa.
 Alamat : Komplek Pondok Pinang Rt.02,Rw.04 Lubuk Begalung Padang.
 No.Kartu Identitas : 0810831002.
 Judul Penelitian : KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN SUIR SYAM SEBAGAI WALI KOTA PADANG PANJANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
 Lokasi Tempat Penelitian : Padang Panjang.
 Waktu Penelitian : 2 Bulan.
 Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud pobservasi yang akan dilaksanakan dengan menun jukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu,baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Kesbaggpol Dan Linmas Propinsi Sumatra Barat.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitiati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 16 April 2012.

An. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
 PROV.SUMATERA BARAT
 KABID KEWASPADAAN

MAIZAL,S.H.

PenataTK I.

NIP. 19570502 198503 1 004.

Tembusan Kpd Yth :

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (Sbg Laporan).
3. Sdr.Walikota Padang Panjang Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Padang Panjang.
4. Yang Bersangkutan

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Mr. Asaat No. 14, Lapangan Kantin Kota Padang Panjang
Telp. ☎ (0752) 485395 Fax. ☎ (0752) 485395

REKOMENDASI

Nomor : 070/119/KPPT-PP/IV-2012

**Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian**

Setelah mempelajari Surat dari Bapak Kabid Kewaspadaan Badan Kesbangpol Dan Linmas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/543/WAS-BKPL/2012 Tanggal 16 April 2012 perihal Izin Penelitian maka dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian / Permintaan Data di Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh:

N a m a	: INOLA ANWAR
Tempat /Tanggal Lahir	: Padang, 17 April 1990
Alamat	: Komplek Pondok Pinang RT.02 RW 04 Lubuk Begalung Padang
No. Kartu Identitas	: 0810831002
Pekerjaan	: Mahasiswi
Judul Penelitian	: "Karakteristik Kepemimpinan Suir Syam Sebagai Walikota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan"
Lokasi Penelitian	: SKPD Kota Padang Panjang, KAN DPP Partai PAN, LSM
Lama Penelitian	: 25 April s/d 25 Juni 2012

alam rangka mengadakan penelitian, peneliti diwajibkan/diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Peneliti harus melaporkan diri kepada pihak yang berwenang di tempat penelitian.

Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat penelitian.

Peneliti diwajibkan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Padang Panjang melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.

Peneliti dilarang melakukan penelitian di luar hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang di tempat penelitian.

Apabila penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 25 April 2012

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PADANG PANJANG**



NULDRYMAN, SH,MM

Pembina Tk.I / NIP. 19670205 199312 1 001

usan disampaikan kepada Yth :

pk. Kepala SKPD se Kota Padang Panjang di Padang Panjang

pk.Ketua KAN se Kota Padang Panjang di Padang Panjang

pk.Ketua DPP Partai PAN Padang Panjang di Padang Panjang

pk Ketua LSM se Kota Padang Panjang di Padang Panjang

rsip

KLIPING

Suir Syam Terus Ukir Prestasi

Padang Panjang, DETEKSI

Walikota Padangpanjang dr H Suir Syam Mkes MMR berhasil meraih piagam penghargaan dalam bidang ketahanan pangan tingkat Nasional tahun 2010, penghargaan tersebut diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, di Istana Negara, Jumat (3/12/2010) siang.

Penghargaan ini diperoleh Suir Syam, berkat kepedulian dan konsistensinya pada sektor peningkatan ketahanan pangan di Kota Padang Panjang. Kepedulian itu antara lain, melahirkan Perda Ketahanan Pangan.

Dikatakan Suir Syam, bentangan lahan pertanian di Kota Padang Panjang mencapai 690 hektar, hampir separuhnya te-



Suir Syam lah menggunakan pupuk organik. Dan menurut catatan statistik, masyarakat Padang Panjang telah mengurangi konsumsi beras 1,5 persen pertahunnya.

"Reward ini sebuah pengakuan dari pemerintah pusat buat Kota Padang Panjang dan

praktis ini adalah milik segala elemen masyarakat terutama masyarakat petani," ujar Suir Syam didampingi Kepala Ketahanan Pangan Rusli, SP dan Kabag Humas Setdako Padang Panjang Drs.H.Ampera Salim, SH, M.Si.

"Mereka telah membuktikan keseriusan ketika pemerintah berupaya memberikan yang terbaik bagi kehidupan percontoman masyarakat petani. Intinya, kebersamaan yang saling bersinergi telah tercipta. Kedepannya, antara pemerintah dan masyarakat petani perlu lebih meningkatkan apa yang sudah terhangun," kata Suir Syam lagi.

Selain Walikota Suir Syam, penerima penghargaan lain dari

koran ini dirumahnya kerjanya. Rabu (22-12-2010) siang.

Dirinci Rafles, sejumlah kegiatan yang telah diadakan, pertama : pada minggu tanggal 19 Desember lalu diadakan gerak jalan sehat dan senam massal di GOR Khatib Sulaiman Banca Laweh. Diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pelajar, dan organisasi wanita Se-Kota Padangpanjang.

Siangnya pada hari yang sama, dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis oleh Walikota Padangpanjang Suir Syam sebagai tindak lanjut dari program nasional Penanaman penanaman 1 Milyar pohon .

Kedua : pada hari Selasa tanggal 21 Desember kemarin, telah pula digelar Seminar Hari Ibu dengan tema 'Konsep Diri Ibu'. Dengan peserta organisasi wanita se-Kota Padangpanjang.

Kota Padang Panjang yakni drh indra yang didaulat sebagai dokter puskesmas teladan nomor 3 tingkat nasional.

Sementara, penerima penghargaan lain dari Propinsi Sumatera Barat, yakni N Dri Sinarajo kepala Desa Jorong Sim-

rempuan peraih penghargaan di beberapa kategori. Antara lain, dalam kategori Bina Keluarga Balita. Terpilih Bina Keluarga Pasang Kota Padangpanjang sebagai Juara I BLB tingkat Provinsi Sumatera Barat.

"Dengan kemenangan tersebut, BLB Kelurahan Pasar Usang diundang Kementerian Pemberdayaan Wanita guna menghadiri upacara puncak peringatan Hari Ibu di Jakarta," ujar Rafles.

Peraih penghargaan lainnya, terpilihnya Rumah Sakit Islam Yarsi Ibnu Sina Padangpanjang sebagai juara II tingkat Provinsi dalam kategori perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita.

Terakhir, kata Rafles, terpilihnya Ibu Yumnaini Roza sebagai terbaik III Ibu teladan tingkat Provinsi Sumatera barat. (Aifian YN)

pang Tigo, Sariak laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota dan kelompok Tani binaan PKK Kelompok Wanita Tani (KWT) Angrek, Kelurahan Talang, kecamatan Payakumbuh Barat Kota payakumbuh (Aifian YN)





Walikota Padang Panjang H. Suir Syam (kiri) menyerahkan kenang-kenangan kepada Bupati Way Kanan Bustami Zainudin (kanan). (foto:ist)

Pemkab Way Kanan Study Banding ke Padang Panjang

Pdg. Panjang, Lintas Media

Pemkab Way Kanan, Provinsi Lampung, melakukan study banding ke Kota Padang Panjang, Rabu (22/12). Pemkab Way Kanan yang dipimpin Bupati Bustami Zainudin itu berangkatkan delapan orang mempelajari dibidang kesehatan dan pendidikan.

Rombongan disambut Walikota Padang Panjang Suir Syam dan wakilnya Edwin, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Humas Stdako Ampera Salim serta instansi terkait lainnya. Kunjungan yang dilakukan ke Kota Padang

Panjang tersebut kata Bustami, melihat keberhasilan Kota yang berhawa sejuk itu dikedua bidang tersebut.

"Padang Panjang relatif berhasil di bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga hal itu merupakan sebagai acuan bagi kami untuk melakukan study banding ke Kota Serambi Mekah ini," katanya.

Sementara, Walikota Padang Panjang Suir Syam menyampaikan terimakasih dengan kunjungan yang dilakukan Pemkab Way Kanan ke kota perlintasan itu. "Kita sangat berterima kasih

Pemkab Way Kanan menjadikan sektor kesehatan dan pendidikan di daerah ini sebagai acuan" katanya.

Bukti keberhasilan Kota Padang Panjang bidang Pendidikan kata walikota, adanya penghargaan atas suksesnya para pelajar yang bisa bersaing di tingkat nasional pada berbagai mata pelajaran. Sedangkan di bidang kesehatan, Padang Panjang juga sudah berhasil meningkatkan kesehatan warga dengan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

(bento/bb)

Suir Syam : Padang Panjang Sudah Jadi Kota Tujuan Wisata

Pdg. Panjang, Lintas Media
Walikota Padang Panjang Suir Syam mengatakan, Padang Panjang tidak lagi menjadi kota persinggahan namun sudah menjadi tujuan wisata. "Keadaan tersebut diketahui dari jumlah pengunjung dan pertumbuhan para pedagang yang ada di Kota Padang Panjang," kata Suir Syam melalui Kabag Humas **Serdak Padang Panjang Ampera Salim, Senin (14/3)**.
Ramainya pengunjung ke Kota Padang Panjang lanjut dia, terlihat di saat pagi hari hingga sore dan bahkan sampai malam hari. Selain itu sebut dia, pertumbuhan pedagang juga ter-

lihat signifikan. Keadaan tersebut dipicu kata dia, semenjak adanya berbagai macam wisata yang ada di bumi serambi Mekkah itu, yang bisa menarik pengunjung.
Ia menjelaskan, beberapa andalan wisata Kota Padang Panjang tersebut, terbukti menarik minat pengunjung dari berbagai daerah di Sumbang dan Indonesia, bahkan mancanegara. "Di Kota Padang Panjang ada beberapa wisata yang sangat menarik pengunjung seperti, wisata budaya perkampungan Minang Kabau, wisata hiburan Minang Fantasi (Mifan), wisata kuliner, wisata kesehatan dan

lainnya," katanya.
"Pertumbuhan pedagang yang menyajikan berbagai dagangan khas Padang Panjang mulai bermunculan, keadaan tersebut sangat mendukung perekonomian masyarakat," sebutnya. Ia berharap keadaan tersebut bisa berlangsung untuk kedepannya, sehingga kesejahteraan masyarakat Kota yang berhawa sejuk itu bisa meningkat dari yang sekarang. "Selagi ada kemaunan untuk maju, maka hal itu pasti bisa terlaksana seperti yang diharapkan. Tangkaplah peluang positif yang ada untuk kemajuan kita bersama,"harapan Walikota. (ben)

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Dirikan Tempat-Workshop

Padang Panjang, Expose
Pemko Padangpanjang melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangpanjang mendirikan tempat workshop untuk pengembangan industri kulit. Tahun 2010 ini kita akan mendirikan delapan lokasi tempat work shop untuk pengembangan industri kulit di Kota Padang Panjang ini,"

kata Kepala Dinas Koperindag melalui Sekretaris Amir Hamzah
Dari delapan lokasi workshop tersebut nantinya akan dibagi di dua kecamatan, masing-masing kecamatan hanya empat lokasi di empat kelurahan dari jumlah total kelurahan tiap kecamatan masing-masing delapan kelurahan. Melihat dari perkembangan industri kulit itu sendiri saat ini

di Kota Padang Panjang jumlah industri kulit Rumah tangga sekitar 40 kelompok. Mereka bisa menghasilkan berbagai macam industri yang berasal dari kulit seperti, tas, sepatu, dompet, topi, ikat pinggang dan lainnya.
Amir Hamzah berharap, program Pemko di bidang ekonomi kerakyatan tersebut bisa terimplemtasi dengan baik

dan lancar demi kesejahteraan masyarakat Kota itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya pennebahan tempat workshop di Kota Padangpanjang ini, bisa memotivasi para generasi muda dan masyarakat lainnya yang tidak memiliki pekerjaan untuk berlatih mengembangkan industri kulit di Kota yang berhujuk Serambi Mekah itu,harapnya. (M.Hamzah)

KPPT Siap Berikan Layanan Terbaik

PADANG PANJANG, HALEAN
— Terbentuknya SKPD baru Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) diharapkan dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Fungsi dan tugas KPPT yang cukup strategis diharapkan

akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Harapan itu mengemuka dalam kunjungan lapangan Komisi II DPRD Padang Panjang Bidang Keuangan dan Ekonomi ke kantor KPPT Jumat lalu.

Rombongan Komisi II yang dipimpin Abrar diterima Kepala KPPT, Tufi Abdul Rajab beserta staf.
Tufi menjelaskan, lembaga baru yang dipimpinnya ini melayani 17 jenis perizinan meliputi Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), jasa konstruksi, perizinan usaha kepariwisataan, perizinan usaha dan jasa kesehatan, perdagangan, industri, pengisian bahan bakar sampai masalah perizinan penyedotan tinja.
Pihaknya dalam waktu tiga

bulan pertama ini dengan tenaga aparatur terlatih akan berupaya menyiapkan pelayanan dengan optimal. Ia juga menyatakan membuka diri menerima kritikan dan masukan dari dewan dan berbagai lapisan masyarakat. (N/As)

melihat Malaysia cukup ideal sebagai mitra sekaligus penjamin lapangan kerja kelak bagi siswa yang telah menamatkan pendidikan.
Demikian pula dari aspek sosial budaya dan ekonomi, bermitra dengan Malaysia tidak akan menjadi hambatan besar bagi siswa yang rata-rata datang dari keluarga ekonomi menengah ke ta-

Askes Center RSUD Padangpanjang Diresmikan

Padangpanjang—Upaya mempermudah masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi atas jaminan kesehatan di Kota Padangpanjang, PT Askes mendirikan gedung Askes Center di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota setempat dan diresmikan Wali Kota Padangpanjang dr Suir Syam M Kes MMR, kemarin.

Katanya, kerjasama yang dijalin Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang dengan PT Askes merupakan program pemerintahan dalam memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat kota Serambi Makah itu.

"Baik masyarakat kurang mampu atau miskin, maupun

masyarakat berekonomi majuan atau kaya, semuanya mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan dari pemerintah. Hanya saja, perbedaan layanan dalam pengobatan akan tetap terlihat perbedaan," sebut Suir Syam saat peresmian Askes Center itu.

Perbedaan dari layanan itu hanya dalam bentuk fasilitas. Seperti disebutkan, bagi keluarga kurang mampu akan ditempatkan di ruangan standar dan bagi keluarga mampu akan memem-

pati ruangan VIP.

"Namun, pasien ruangan VIP yang pada umumnya dari keluarga mampu itu, kita kenakan lagi biaya tambahannya. Alhamdulillah, beban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima sudah terwujud atas kerjasama dengan PT Askes," terangnya. Lanjutnya,

seperti sebelumnya bahwa kebiasaan masyarakat akan berobat apabila

penyakit yang diderita sudah berlarut, karena biaya untuk berobat tidak ada. Tapi sekarang malah sebaliknya, tidak enak badan saja sudah mendaftari RSUD

Ita juga menyebutkan, dengan tidak adanya jaminan kesehatan selama ini, RSUD juga sudah menjadi tempat menamatkan dan berakhirnya umur seseorang karena penyakit yang diderita sudah kronis.

"Namun sekarang asumsi masyarakat tentang itu tidak ada lagi kita dengar, karena masyarakat saat ini, sudah sering keluar masuk ke RSUD dengan memanfaatkan fasilitas dari Pemko Padangpanjang dan PT Askes," sebutnya.

Sementara Direktur utama PT Askes (Persero) dr Igede Subawa M. Kes menyebutkan, kerjasama PT Askes dengan Pemko Padangpanjang sudah berlangsung beberapa tahun lalu.

"Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, kita sudah serahkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan kepada Pemko Padangpanjang dengan total nilai sekitar Rp100 juta," sebutnya.

Hadir dalam peresmian tersebut, Wakil Wali Kota Padangpanjang Edwin, Direktur utama PT Askes (Persero) dr Igede Subawa M. Kes, Muspida plus para kepala SKPD dilingkungan pemko setempat dan undangan lainnya. □

YUSUF/ANTARA



Suir Syam

Disdukcapil Sosialisasikan Kebijakan Kependudukan

Realitas, Padangpanjang

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyosialisasikan kebijakan kependudukan bagi aparaturnya kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, dan dasawisma se Kota Padangpanjang di aula kantor camat kecamatan Padangpanjang Barat, Selasa (8/3). Sosialisasi itu dibuka oleh Wali Kota Padangpanjang Suir Syam yang diikuti sekitar 50 orang dari berbagai elemen.

Suir Syam mengatakan, sosialisasi yang akan dilaksanakan itu adalah peraturan daerah (perda) Kota Padangpanjang nomor 17 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

"Sosialisasi ini nantinya diharapkan bisa

menjembatani Pemko Padangpanjang dalam menyosialisasikan hal tersebut langsung kepada masyarakat," pintanya.

Suir Syam juga mengatakan, Perda nomor 17 tersebut merupakan amanah dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggara administrasi kependudukan Indonesia.

"Undang-undang tentang administrasi kependudukan telah memuat pengaturan yang reformatif tentang pelayanan administrasi kependudukan dalam konstalasi pelayanan publik melalui penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) yang wajib

dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan lainnya," katanya.

Sosialisasi itu dilaksanakan kata Suir Syam, juga Schubungan akan dilaksanakan penerbitan KTP elektronik sesuai dengan amanah peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan peraturan presiden 35 tahun 2010 tentang penerapan KTP nasional berbasis NIK secara nasional.

"Kita juga berharap, penerapan KTP elektronik di Kota Padangpanjang ini bisa terealisasi dengan baik, sehingga program pemerintah pusat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan," katanya. dms

Pengalaman Padang Panjang Dalam

Pengendalian Rokok Dan Penyakit Tidak Menular (4)

(Padang Panjang Experience In The Control Of Smoking And Non Infectious Diseases.)

Untuk mendukung pelaksanaan Perda dan Peraturan Walikota tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan terhib rokok telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk kebijakan antara lain:

Sosialisasi Perda dan Perwako tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan terhib rokok. Kebijakan ini adalah dalam rangka membangun dan mengukuhkan komitmen serta

penyamaan persepsi tentang bahaya rokok dan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan terhib rokok.

b. Membentuk Forum Peduli Penyakit Tidak Menular (FP-PTM), adalah semacam forum yang memotivasi dan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan penyakit tidak menular kegiatan yang dilakukan oleh Forum

Peduli Penyakit Tidak Menular diantaranya adalah melaksanakan sosialisasi tentang penyakit tidak menular kepada masyarakat, sosialisasi tentang pengaruh rokok terhadap penyakit tidak menular, memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan Poshibidu penyakit tidak menular dan berpartisipasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang me-

nujng tertanggulangnya penyakit tidak menular dan terhidarnya masyarakat dan bahaya rokok.

c. Membentuk Forum atau Komunitas Remaja Anti Rokok, dimana untuk tahap awal ini lebih difokuskan pada sekolah-sekolah lanjutan atas, namun pada gilirannya nanti

>> ke Hal.11

Oleh:
dr. Suir Syam, M. Kes, MMR





Jadi Pembicara Kesehatan di Myanmar

Meliputi Bidang Perang adalah salah satu aspek penting di Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan. Berbagai masalah, terutama akibat dari pengaruh di dalam tubuh, berakumulasi di tingkat kesehatan. Kita sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Andalas tentu harus siap menghadapi tantangan yang akan datang.



Perjuangan di bidang kesehatan adalah perjuangan yang panjang dan melelahkan. Kita sebagai mahasiswa kedokteran harus memiliki ketahanan mental dan fisik yang kuat. Selain itu, kita juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, karena kita akan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Kita harus siap menghadapi tantangan yang akan datang dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab.

Perjuangan di bidang kesehatan adalah perjuangan yang panjang dan melelahkan. Kita sebagai mahasiswa kedokteran harus memiliki ketahanan mental dan fisik yang kuat. Selain itu, kita juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, karena kita akan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Kita harus siap menghadapi tantangan yang akan datang dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab.



Pemko Padang Panjang Aju 5 Ranperda

UNIVERSITAS ANDALAS

H. Suir Syam : Penyusunan RKPD Prioritaskan Aspirasi dari Bawah

Padang Panjang, 20 April 2014. Bupati Padang Panjang H. Suir Syam mengatakan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 mendatang, pemerintah daerah akan memprioritaskan aspirasi masyarakat dari bawah.

Suir Syam mengatakan, RKPD tahun 2015 akan disusun dengan mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. "Kita akan mengutamakan aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.

Menurut Suir Syam, RKPD tahun 2015 akan mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. "Kita akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Suir Syam juga mengatakan, pemerintah daerah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Kita akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Padang Panjang, 20 April 2014. Bupati Padang Panjang H. Suir Syam mengatakan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 mendatang, pemerintah daerah akan memprioritaskan aspirasi masyarakat dari bawah.

Suir Syam mengatakan, RKPD tahun 2015 akan disusun dengan mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. "Kita akan mengutamakan aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.

Menurut Suir Syam, RKPD tahun 2015 akan mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. "Kita akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Suir Syam juga mengatakan, pemerintah daerah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Kita akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

PERGURUAN BELA DIRI Pinda 36 dan

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

SATU-SATUNYA DARI SUMBAR

Padangpanjang Raih Penghargaan

PEMERINTAH Kota Padangpanjang menerima penghargaan dari salah satu LSM ibu kota, NCW (National Corruption Watch). Lembaga ini memberikan apresiasi kepada 5 menteri, 5 pengusaha, 5 bupati dan 5 walikota, yang dinilai berprestasi secara nasional.

Penghargaan ini diterima Sekdako Padangpanjang Drs.H.Ali Asmar, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu. Ketika meraih penghargaan ini, Kota Padangpanjang, merupakan satu-satunya dari 19 daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Menurut Ali Asmar, di Padangpanjang, Rabu (16/3), NCW melihat dua hal dalam keberhasilan Pemerintah Kota Padangpanjang. Pertama, keberhasilan menegakkan komitmen untuk menegakkan Padangpanjang sebagai kota Serambi Mekah. Hal ini ditandai dengan teraturnya upaya penertiban penyakit masyarakat oleh Satpol PP dan penegak hukum daerah ini. Seperti razia minuman keras, wanita malam dan perjudian.

Kemudian, penanaman nilai Islam kepada



ALI ASMAR

anak usia dini, juga tidak luput dari perhatian NCW. Anak-anak PAUD telah belajar mengaji dan membaca Asm'ul Husna. Anak-anak SD dan SMP shalat berjamaah di masjid atau mushalla

sekolah, pada waktu zuhur. Wrid pengajian juga diadakan setiap seminggu sekali.

Hal kedua yang dinilai NCW, adalah bidang pendidikan. Padangpanjang dinilai berhasil memberikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Dalam Wajar Sembilan tahun ini, biaya pendidikan gratis bagi sekolah negeri dan kepada anak yang belajar di sekolah swasta dibantu Rp50 ribu per orang setiap bulannya.

Dalam hal ini Padangpanjang juga dinilai berhasil melaksanakan ujian nasional yang jujur, tidak dibantu oleh pihak manapun. Di sekolah juga dikembangkan, kantin kejujuran dengan maksud melatih anak-anak agar bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

"Tentu saja penilaian dari NCW ini juga ditopang oleh suksesnya program jaminan kesehatan masyarakat Padangpanjang yang dilayani pemerintah. Sehingga orang tua murid berada dalam kondisi kesehatan yang baik, hingga mereka bisa pula memberikan motivasi kepada keluarga untuk berlaku jujur dalam menempuh kehidupan," tukasnya. ●Adek

Walikota Sosialisasikan Pelayanan Terpadu

Padang Panjang, Jaya Pos

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan melalui strategi peningkatan proposional aparatur, sistem dan prosedur pelayanan, koordinasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberian penghargaan.

Walikota Padang Panjang Suir Syam, Rabu (23/3), mensosialisasikan pelayanan perizinan terpadu se Kota Padang Panjang, di Aula DPPKAD dihadiri para kepala SKPD, pejabat Eselon III dan IV di lingkungan pemkot. Sesai UU No 32 tahun 2004, yang filosofinya adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan peluang dan ruang gerak yang lebih luas bagi daerah untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang menja-

di kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, termasuk mengembangkan inovasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Suir Syam, inti dari strategi tersebut harus dimulai dari aspek yang paling mendasar yaitu reformasi pola pikir, pola tindak penyelenggara pelayanan, oleh sebab itu pembenahan pelayanan harus dilakukan terhadap kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan yang muaranya diharapkan menghasilkan suatu pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel. Tanpa dukungan variabel tersebut maka sulit menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal.

Dilihat dari segi aspek politik

akan mampu mencitrakan aparatur pemerintah yang lebih baik sekaligus memunculkan kepercayaan yang lebih proporsional, sedangkan dilihat dari aspek ekonomis akan memberikan peluang bagi usaha untuk lebih mengembangkan dan mengakses berbagai sumberdaya yang ada, dapat memacu percepatan perekonomian daerah sehingga lebih bergairah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara signifikan, dan dari upaya untuk mewujudkan efektifitas pencegahan tindak perilaku KKN dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sekaligus salah satu upaya untuk mengimplementasikan misi ke empat dari RPJM Kota Padang Panjang 2008-2013 yakni mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dms

RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inola Anwar
Tempat, tgl. Lahir : Padang, 17 April 1990
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Komplek Pondok Pinang rt 02, rw 04 jalan damai NO.6
Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Lubuk Buaya,
Kota Padang, 25173.

A. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Lenggogeni Lulus Berijazah Tahun 1996
2. SDN No 11 Lubuk Buaya Padang Lulus Berijazah Tahun 2002
3. SLTP N 34 Padang Lulus Berijazah Tahun 2005
4. SMU N 8 Padang Lulus Berijazah Tahun 2008
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Sumatera Barat

B. ORGANISASI

1. Staff Departemen Luar Negeri BEM KM UNAND, Kabinet Bersatu
2. Staff Departemen Luar Negeri BEM KM UNAND, Kabinet Kontribusi Nyata

C. Kepanitiaan yang pernah diikuti

1. Panitia Unand Award V, Seksi Dana dan Usaha, PSDM BEM KM UNAND.
2. Tim Pemantau Independent Mahasiswa (TPI), Pemilu Legislatif 9 April 2009, Kerjasama UNAND, ISCEL, Padang TV, JPPR.
3. Anggota Sie, TPS dan Kampanye (PPU) Pemira KM UNAND 2009.
4. Tim Pemantau Independent Mahasiswa (TPI), Pemilu Presiden 8 Juli 2009, Kerjasama UNAND, ISCEL, Padang TV, JPPR. KPU Pusat.
5. Panitia Pembinaan Anak Jalanan dan Buka Bersama, Seksi Bidang Acara, KESSMA BEM KM UNAND.
6. Panitia Temu Aktifis Mahasiswa Se-SUMBAR, Bidang Acara, Deplu BEM KM UNAND.
7. Panitia LKMM-TM, PSDM BEM KM UNAND.
8. Panitia Acara Seminar Nasional "Indonesia Lemah Atau Malaysia Kuat", DEPLU BEM KM UNAND.
9. Panitia PAHAMAN, PSDM BEM KM UNAND.

10. Panitia Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Sumatera Barat, FISIP, Ilmu Politik, UNAND.
11. Panitia WIP, dan TOT Living Value Education (LVE), Koordinator Notulen, FISIP, ILMU POLITIK, UNAND.

D. Prestasi Yang Pernah Diraih

1. Juara 3 Lomba Baca Puisi, dalam rangka HUT SMA 8 Padang.
2. Juara 2 Lomba Baca Puisi dalam rangka Maulid Nabi Muhamad, SAW, Tingkat SMA 8 Padang.
3. Penyiar Ekskul Plus, Arbes FM, (2006).
4. Penyiar LIBSCHOOL SIPP FEMALE Radio, (2007).
5. Penyiar Tamu, KGS (kirana Guest Star), Arbes FM (2008).
6. 10 Besar Presenter Padang TV.
7. Pemateri Intensive Coaching, BEM Fakultas Sastra UNAND.

E. Master Of Ceremony

1. MC Unand Award V.
2. MC Seminar Daerah Menuju SUMBAR yang bersih dan bermatabat.
3. MC Seminar Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Sumatera Barat.
4. MC PAHAMAN, at Plaza Andalas.
5. MC Pembukaan LKMM-TM Kerjasama DISPORA Sumbar dan BEM KM UNAND.
6. MC Seminar Nasional "Indonesia Lemah atau Malaysia Kuat"
7. MC LKMM-TM BAPELKES, Gunung Pangilun Padang.
8. MC Malam Inagurasi FISIP UNAND (2009).
9. MC Acara Seminar Regional KSR PMI UNAND.
10. MC Expo Telemetri Plaza Andalas.
11. MC LKMM Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UNAND.

INOLA ANWAR, S.IP